



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

LAPORAN KINERJA

2024



(0358) 321752



Jl. Dermojoyo No. 20 Nganjuk



www.pn-nganjuk.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dapat menyelesaikan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan baik.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Nganjuk ini memuat tentang

Informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi serta sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, dengan memperhatikan Standart Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Negeri Nganjuk juga menggunakan dana APBN, selayaknya



berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dan menjadi dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB selama tahun anggaran 2024 untuk dapat melakukan evaluasi kinerja dan sebagai pembanding antara target dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2024. Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2024, semoga bermanfaat dan berguna untuk Pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk dimasa yang lebih baik dimasa datang.

Nganjuk, 14 Februari 2025

Ketua

JAMUJI, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
TAHUN 2024**

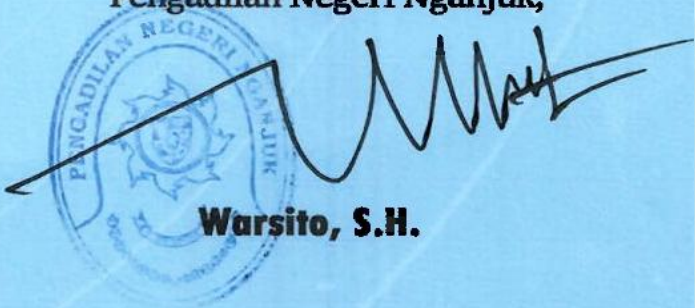
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Nganjuk.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Nganjuk, 14 Februari 2025
Ketua Tim Reviu AKIP
Pengadilan Negeri Nganjuk,



Warsito, S.H.

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

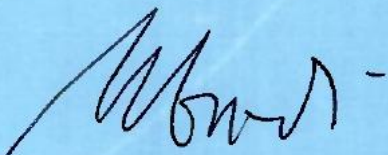
No.		Pernyataan	Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	v
		2. LKj telah menyampaikan informasi target kinerja	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	v
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pelaporan	v
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	v
		6. Telah meyajikan akuntabilitas keuangan	v
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	v
		2. Infromasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan infromassi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/infromasi disetiap unit kerja	v
		5. Data/infromasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit terkait	v
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi yang dibawahnya	v

No.	Pernyataan		Check List
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam lkj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam perjanjian kinerja	v
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	v
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
		4. Tujuan/sasarandalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam indikator kinerja	v
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	v
		6. Jika 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu,standart nasional dan sebagainay yang bermanfaat	v
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	v
		9. Jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai	v
		10. IKU dan IK telah SMART	v

Pereviu I


Warsito, S.H.

Nganjuk, 14 Februari 2025
Pereviu II


Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS
LKjIP PN. NGANJUK TAHUN 2023**

iii

iv

FORMULIR LKjIP TAHUN 2024

DAFTAR ISI

vi

ix

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR TABEL

xv

xxxi

DAFTAR GAMBAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

xxxiii

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	12
	C. Struktur Organisasi	15
	D. Pohon Kinerja	11
	E. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	18
	F. Sistematika Laporan	19
PERENCANAAN KINERJA		BAB II
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	22	
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	23	
C. Rencana Kinerja Tahunan 2024	42	
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	44	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	50
	A.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja	50
	A.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya	200
	A.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	205
	B. Realisasi Anggaran	206
PENUTUP		BAB IV
A. Simpulan	222	
B. Rekomendasi	222	

DAFTAR ISI

LAMPIRAN

- 1. SK Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024
- 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk
- 3. Reviu IKU
- 4. Matrik Reviu Rencana Strategis 2020-2024
- 5. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024
- 6. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 7. Monitoring Dan Evaluasi LKjIP per Triwulan

DAFTAR GRAFIK

59

GRAFIK 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2023

59

GRAFIK 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2023

63

GRAFIK 3.3

Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorativ Tahun 2022-2023

66

GRAFIK 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2020-2023

69

GRAFIK 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2023

72

GRAFIK 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Periode Tahun 2020-2022

75

GRAFIK 3.7

Perbandingan Capaian Indexs Responden Pencari Keadilan Periode Tahun 2020-2023

79

GRAFIK 3.8

Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Sampaikan Ke Para Pihak Periode Tahun 2020 - 2023

82

GRAFIK 3.9

Perbandingan Capaian Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Medasi

85

GRAFIK 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Periode Tahun 2020-2024

88

GRAFIK 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2020-2023



91

GRAFIK 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020-2024

94

GRAFIK 3.13

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024

99

GRAFIK 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pejabat yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2020-2024

102

GRAFIK 3.15

Pencapaian Target Kinerja Persentase Tingkat kelengkapan Data Kepegawaian Periode Tahun 2022-2023

105

GRAFIK 3.16

Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2023

108

GRAFIK 3.17

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022-2024

116

GRAFIK 3.18

Capaian Nilai IPK Periode Tahun 2022-2023

119

GRAFIK 3.19

Capaian Nilai IKM Periode Tahun 2020-2023

123

GRAFIK 3.20

Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNB
Periode Tahun 2022 - 2023

126

GRAFIK 3.21

Persentase Capaian Anggaran Belanja Tahun
2022-2023

128

GRAFIK 3.22

Capaian Kinerja Persentase Pegawai Yang
Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat
Waktu Tahun 2022-2023

131

GRAFIK 3.23

Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja
Anggaran Tahun 2022 - 2023

134

GRAFIK 3.24

Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan
Masuk Kerja Tahun 2022 – 2023

142

GRAFIK 3.25

Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Distribusi
Surat Tahun 2022-2024

144

GRAFIK 3.26

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase
Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022-
2024

146

GRAFIK 3.27

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase
Arsip Surat yang Dapat Ditemukan Dengan
Cepat dan Mudah Tepat Waktu Tahun 2022-
2024

158

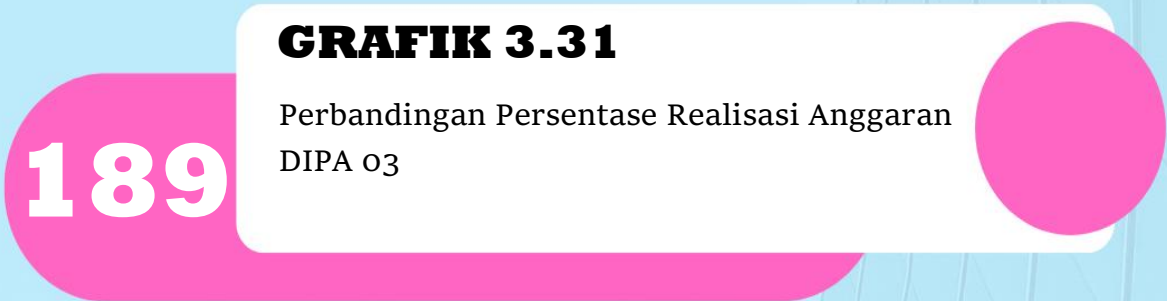
GRAFIK 3.28

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase
Pengusulan dan Penyelesaian Usulan
Kepegawaian Tahun 2022-2024

168

GRAFIK 3.29

Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam
Mendukung Layanan Peradilan Tahun 2022-
2024



DAFTAR TABEL

8

Tabel 1.1. Jumlah Tenaga Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

8

Tabel 1.2. Jumlah Tenaga NonTeknis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

9

Tabel 1.3. Jumlah Tenaga PPNNP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

9

Tabel 1.4. Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2024

10

Tabel 1.5. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

26

Tabel 2.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

31

Tabel 2.2. Matrik Rencana Stategis Tahun 2020 - 2024

42

Tabel 2.3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024

46

Tabel 2.4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024

48

Tabel 2.5. Anggaran Pendukung Tercapainya Sasaran Strategis

DAFTAR TABEL

51

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

56

Tabel 3.2. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1

58

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

58

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 -2024

59

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 -2024

62

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif tahun 2024

62

Tabel 3.7.Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2023-2024

62

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2022-2024

65

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

65

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023-2024

DAFTAR TABEL

65 **Tabel 3.11.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024

68 **Tabel 3.12.** Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

68 **Tabel 3.13.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasai Tahun 2023-2024

69 **Tabel 3.14.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024

71 **Tabel 3.15.** Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Diversi Tahun 2024

71 **Tabel 3.16.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Diversi Tahun 2023-2024

72 **Tabel 3.17.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020-2024

74 **Tabel 3.18.** Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

74 **Tabel 3.19.** Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024

75 **Tabel 3.20** Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023-2024)

DAFTAR TABEL

75 **Tabel 3.21.** Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Periode Tahun 2020-2024

77 **Tabel 3.22.** Capaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2024

78 **Tabel 3.23.** Capaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2023 - 2024

78 **Tabel 3.24.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Periode Tahun 2020 - 2024

81 **Tabel 3.25.** Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024

81 **Tabel 3.26.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2023 - 2024

81 **Tabel 3.27.** Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 -2024

83 **Tabel 3.28.** Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3

84 **Tabel 3.29.** Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2024

84 **Tabel 3.30** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2023 - 2024

DAFTAR TABEL

85 **Tabel 3.31.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2020 -2024

87 **Tabel 3.32.** Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2024

87 **Tabel 3.33.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2023 – 2024

88 **Tabel 3.34.** Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2020 -2024

90 **Tabel 3.35.** Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

90 **Tabel 3.36.** Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2024

91 **Tabel 3.37.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

91 **Tabel 3.38.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Gol. Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2020 - 2024

92 **Tabel 3.39.** Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 4

93 **Tabel 3.40** Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Tahun 2024

DAFTAR TABEL

94

Tabel 3.41. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Tahun 2023 - 2024

94

Tabel 3.42. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2024

98

Tabel 3.43. Capaian Kinerja Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2024

98

Tabel 3.44. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2023 - 2024

99

Tabel 3.45. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2022 - 2024

101

Tabel 3.46. Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2024

102

Tabel 3.47. Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2024

102

Tabel 3.48. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2022 - 2024

104

Tabel 3.49. Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2024

105

Tabel 3.50 Persentase Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2024

DAFTAR TABEL

105

Tabel 3.51. Perbandingan Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2023 – 2024

105

Tabel 3.52. Perbandingan Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2024

107

Tabel 3.53. Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2024

107

Tabel 3.54. Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2024

108

Tabel 3.55. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2023 – 2024

108

Tabel 3.56. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022-2024

109

Tabel 3.57. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 6

110

Tabel 3.58. Capaian Kinerja Nilai LKjIP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

111

Tabel 3.59. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai LKjIP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023 – 2024

111

Tabel 3.60 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai LKjIP Tahun 2022-2024

DAFTAR TABEL

113 **Tabel 3.61.** Capaian Kinerja Predikat Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2024

113 **Tabel 3.62.** Perbandingan Capaian Kinerja Predikat Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2023 – 2024

113 **Tabel 3.63.** Perbandingan Capaian Kinerja Predikat Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2022-2024

115 **Tabel 3.64.** Hasil IPK Berdasarkan Aplikasi e- Survey Badilum Tahun 2024

116 **Tabel 3.65.** Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2024

116 **Tabel 3.66.** Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2023 – 2024

116 **Tabel 3.67.** Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2022 – 2024

118 **Tabel 3.68.** Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

118 **Tabel 3.69.** Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2024

119 **Tabel 3.70** Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2023-2024

DAFTAR TABEL

119 **Tabel 3.71.** Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2020-2024

121 **Tabel 3.72.** Capaian Kinerja Predikat AMPUH

122 **Tabel 3.73.** Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPN Tahun 2024

123 **Tabel 3.74.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPN Tahun 2023-2024

123 **Tabel 3.75.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPN Periode Tahun 2022 - 2024

124 **Tabel 3.76.** Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

125 **Tabel 3.77.** Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

125 **Tabel 3.78.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 - 2024

125 **Tabel 3.79.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024

128 **Tabel 3.80** Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2024

DAFTAR TABEL

128

Tabel 3.81. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase
Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2023 – 2024

128

Tabel 3.82. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pegawai
Yang Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2022-2024

130

Tabel 3.83. Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran
Tahun 2024

131

Tabel 3.84. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Nilai
Kinerja Anggaran Tahun 2023 -2024

131

Tabel 3.85. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Nilai
Kinerja Anggaran Tahun 2022 – 2024

133

Tabel 3.86. Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Nganjuk
Tahun 2024

134

Tabel 3.87. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk
Kerja Tahun 2024

134

Tabel 3.88. Perbandingan Capaian Persentase Kedisiplinan
Masuk Kerja Tahun 2023 – 2024

134

Tabel 3.89. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase
Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022-2024

136

Tabel 3.90. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7

DAFTAR TABEL

137

Tabel 3.91. Capaian Kinerja Pemeliharaan Sarana Aplikasi Layanan Yang Telah Diselesaikan Tahun 2024

139

Tabel 3.92. Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2024

140

Tabel 3.93. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith Yang Memadai Tahun 2022 - 2024

141

Tabel 3.94. Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2024

141

Tabel 3.95. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2023 - 2024

142

Tabel 3.96. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2022 - 2024

144

Tabel 3.97. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2024

144

Tabel 3.98. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2023 - 2024

144

Tabel 3.99. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024

146

Tabel 3.100 Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2024

DAFTAR TABEL

146

Tabel 3.101. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2023 - 2024

146

Tabel 3.102. Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang dapat Ditemukan Dengan Cepat Dan Mudah Tahun 2022-2024

148

Tabel 3.103. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2024

148

Tabel 3.104. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2023 - 2024

148

Tabel 3.105. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2022-2023

150

Tabel 3.106. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2024

150

Tabel 3.107. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2023 - 2024

150

Tabel 3.108. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat di Media Tahun 2022-2024

152

Tabel 3.109. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2024

152

Tabel 3.110 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2023 - 2024

DAFTAR TABEL

152 **Tabel 3.111.** Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024

154 **Tabel 3.112.** Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2024

154 **Tabel 3.113.** Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2023 – 2024

154 **Tabel 3.114.** Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024

155 **Tabel 3.115.** Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2024

155 **Tabel 3.116.** Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 – 2024

156 **Tabel 3.117.** Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022-2024

157 **Tabel 3.118.** Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2024

157 **Tabel 3.119.** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2023 – 2024

158 **Tabel 3.120** Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2022 – 2024

DAFTAR TABEL

159 **Tabel 3.121.** Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2024

160 **Tabel 3.122.** Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2023 – 2024

160 **Tabel 3.123.** Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2023

161 **Tabel 3.124.** Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2024

161 **Tabel 3.125.** Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2023 – 2024

162 **Tabel 3.126.** Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2022 – 2024

163 **Tabel 3.127.** Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Tahun 2024

163 **Tabel 3.128.** Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Tahun 2023 – 2024

164 **Tabel 3.129.** Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2022 – 2024

165 **Tabel 3.130** Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2024

DAFTAR TABEL

165

Tabel 3.131. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2023 – 2024

166

Tabel 3.132. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2022 – 2023

167

Tabel 3.133. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 8

167

Tabel 3.134. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2024

168

Tabel 3.135. Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2023 – 2024

168

Tabel 3.136. Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2024

170

Tabel 3.137. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Rencana Jangka Menengah (Renstra 2020- 2024)

181

Tabel 3.138. Benchmark Kinerja Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2023 Sasaran Strategis 1

184

Tabel 3.139. Benchmark Kinerja Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2023 Sasaran Strategis 2

187

Tabel 3.140. Benchmark Kinerja Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2023 Sasaran Strategis 3

DAFTAR TABEL

189

Tabel 3.141. Benchmark Kinerja Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2023 Sasaran Strategis 4

191

Tabel 3.142. Benchmark Kinerja Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2024 Sasaran Strategis 1

194

Tabel 3.143. Benchmark Kinerja Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2024 Sasaran Strategis 2

196

Tabel 3.144. Benchmark Kinerja Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2024 Sasaran Strategis 3

198

Tabel 3.145. Benchmark Kinerja Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2024 Sasaran Strategis 4

200

Tabel 3.146. Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

201

Tabel 3.147. Data Pegawai/PPNPN Yang Diperbantukan Tahun 2024

203

Tabel 3.148 Program dan Anggaran Pendukung Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2024

204

Tabel 3.149. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2023 – 2024

204

Tabel 3.150. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2022 – 2023

DAFTAR GAMBAR

2

Gambar 1.1 Gedung Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk

2

Gambar 1.2 Rapat Laporan Kinerja Tahun 2024

3

Gambar 1.3 Ruang PTSP

4

Gambar 1.4 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Nganjuk

6

Gambar 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk

7

Gambar 1.6 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk

10

Gambar 1.7 Pohon Kinerja



DAFTAR GAMBAR

30

Gambar 2.1 Kerangka Kinerja Renstra Pengadilan Negeri Nganjuk

100

Gambar 3.1 Aplikasi SIKEP

101

Gambar 3.2 Monitoring Kelengkapan Data SIKEP

101

Gambar 3.3 Monitoring Kelengkapan E-DOC SIKEP

111

Gambar 3.4 Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip
Komdanas

130

Gambar 3.5 Capaian IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan
Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi OM-Span Tahun 2024

139

Gambar 3.6 Gambar Grafik Laporan Ketersediaan Banwith
Internet Tahun 2024

143

Gambar 3.7 Aplikasi PTSP + Untuk Pendistribusian Surat

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengacu kepada visi misi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung,



Maka dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020-2024 ditetapkanlah program penegakan dan pelayanan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Nganjuk sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang pada RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sedangkan program dukungan manajemen ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Nganjuk dengan sasaran yaitu:

1. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.
2. Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.
3. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima.
4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.



Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah system yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.



Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk adalah **107,49%**. Secara umum pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk telah berhasil mencapai target kinerja, namun tidak lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk sebesar **108,18%**. Pada tahun ini terdapat penurunan capaian kinerja sebesar **0,69%**.

Untuk tahun 2024, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang belum tercapai yaitu pada sasaran strategis 3, Akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan serta pada sasaran strategis sasaran strategis 6, mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik.

Pada sasaran strategis Akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan, terdapat 1 indikator kinerja yang belum terwujud, yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan capaian kinerja 0%, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) perkara prodeo yang didaftarkan namun sampai dengan akhir tahun 2024 perkara tersebut masih dalam proses persidangan. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan capaian kinerja yang tidak dapat diperhitungkan, hal ini dikarenakan selama tahun 2024 tidak terdapat perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Pada sasaran strategis mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya < 100% yaitu predikat pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan predikat Sertifikasi Peradilan Unggul dan Tanggung (AMPUH). Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk tidak dapat meraih WBK dan predikat AMPUH juga belum diraih, jadi capaian kinerja pada indikator ini adalah 0%. Hal ini menjadi acuan untuk Pengadilan Negeri Nganjuk agar dapat berusaha lebih keras untuk mencapai sasaran strategis tersebut pada tahun selanjutnya.

Laporan Kinerja tahun 2024 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
			1.	Pidana	95%	100%	105,26%
			2.	Perdata	75%	97,20%	129,6%
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100%	100%
		c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	93,67%	117,09%
		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	95,61%	106,23%
		e.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	--NA--	--NA--
		f		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,28%	105,87%
Rata- Rata Capaian Kinerja						110,68%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	100%	111,11%
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%	11,90%	119%
Rata- Rata Capaian Kinerja						115,06%	
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%
		b.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%	--NA--	--NA--
		c.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%

Rata- Rata Capaian Kinerja							50%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	78,57%	157,14%
Rata- Rata Capaian Kinerja							157,14%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.		Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	90%	100%
		b.		Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%	100%	125%
		c.		Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
		d.		Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%
Rata- Rata Capaian Kinerja							106,25%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.		Nilai LKJiP minimal “BB”	(BB)	BB	100%
		b.		Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK	-	0%
		c.		Nilai IPK	90%	95,28%	105,87%
		d.		Nilai IKM	90%	98,94%	109,93%
		e.		Predikat Ampuh	Unggul	-	0%
		f.		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%
		g.		Persentase realisasi anggaran belanja	95%	95,62%	100,65%
		h.		Persentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%
		i.		Persentase nilai Kinerja Anggaran	90%	99,18%	110,2%
		j.		Persentase kedisiplin masuk kerja	95%	97,92%	103,07%
Rata- Rata Capaian Kinerja							83,50%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretaraian yang baik dan	a.		Pemeliharaan sarana apliaksi layanan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

	prima	b.		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps	120 Mbps	120%
		c		Persentase distribusi surat	100%	100%	100%
		d		Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e		Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%	111,11%
		f		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3	3	100%
		g		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita	44 berita	183,33%
		h		Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan	7 Layanan	100%
		i		Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang	341 orang	170,5%
		j		Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang	266 orang	332,5%
		k		Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%
		l		Jumlah pemeliharaan gedunG	3.000 m2	3.000 m2	100%
		m		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit	3 unit	60%
		n		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit	119 unit	104,39%
		o		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
		Rata- Rata Capaian Kinerja					
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan	a.		Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%	100%	111,11%

	peradilan						
Rata- Rata Capaian Kinerja							111,11%
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024							107,49%

BAB I

PENDAHULUAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi,



karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).



Upaaya Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk mewujudkan terselenggaranya *Good Governace*, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024 yang sistematis sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

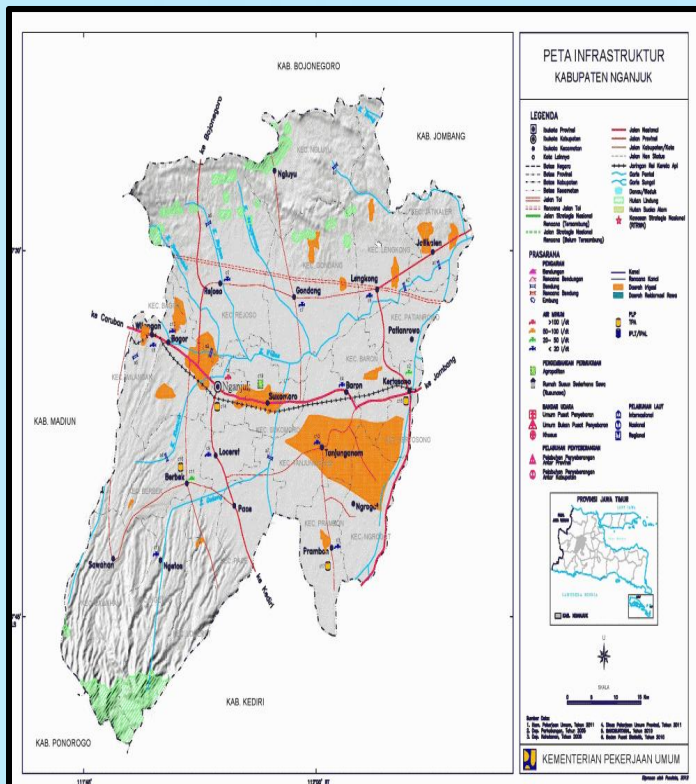
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan



Kedudukan Pengadilan Negeri Diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 yaitu :

- a. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, (pasal 2)
- b. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, (pasal 3 ayat 1)
- c. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Negara tertinggi, (pasal 3 ayat 2)



Gambar 1.4 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Nganjuk.

Pengadilan Negeri Nganjuk terletak di wilayah Kabuapten Nganjuk, tepatnya di Jalan Dermojoyo Nomor 20, Kelurahan Payaman, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk. Kota Nganjuk menempati posisi yang sangat strategis karena berada perlintasan jalur utama Surabaya - Jogjakarta, selain itu menjadi persimpangan jalur menuju kota Kediri. Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk meliputi 20 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bagor
2. Kecamatan Baron
3. Kecamatan Berbek
4. Kecamatan Gondang
5. Kecamatan Jatikalen
6. Kecamatan Kertosono
7. Kecamatan Lengkon
8. Kecamatan Loceret
9. Kecamatan Nganjuk
10. Kecamatan Ngetos
11. Kecamatan Ngluyu
12. Kecamatan Ngronggot
13. Kecamatan Pace
14. Kecamatan Patianrowo
15. Kecamatan Prambon
16. Kecamatan Rejos
17. Kecamatan Sawahan
18. Kecamatan Sukomoro
19. Kecamatan Tanjunganom
20. Kecamatan Wilangan

2. Tugas Pokok

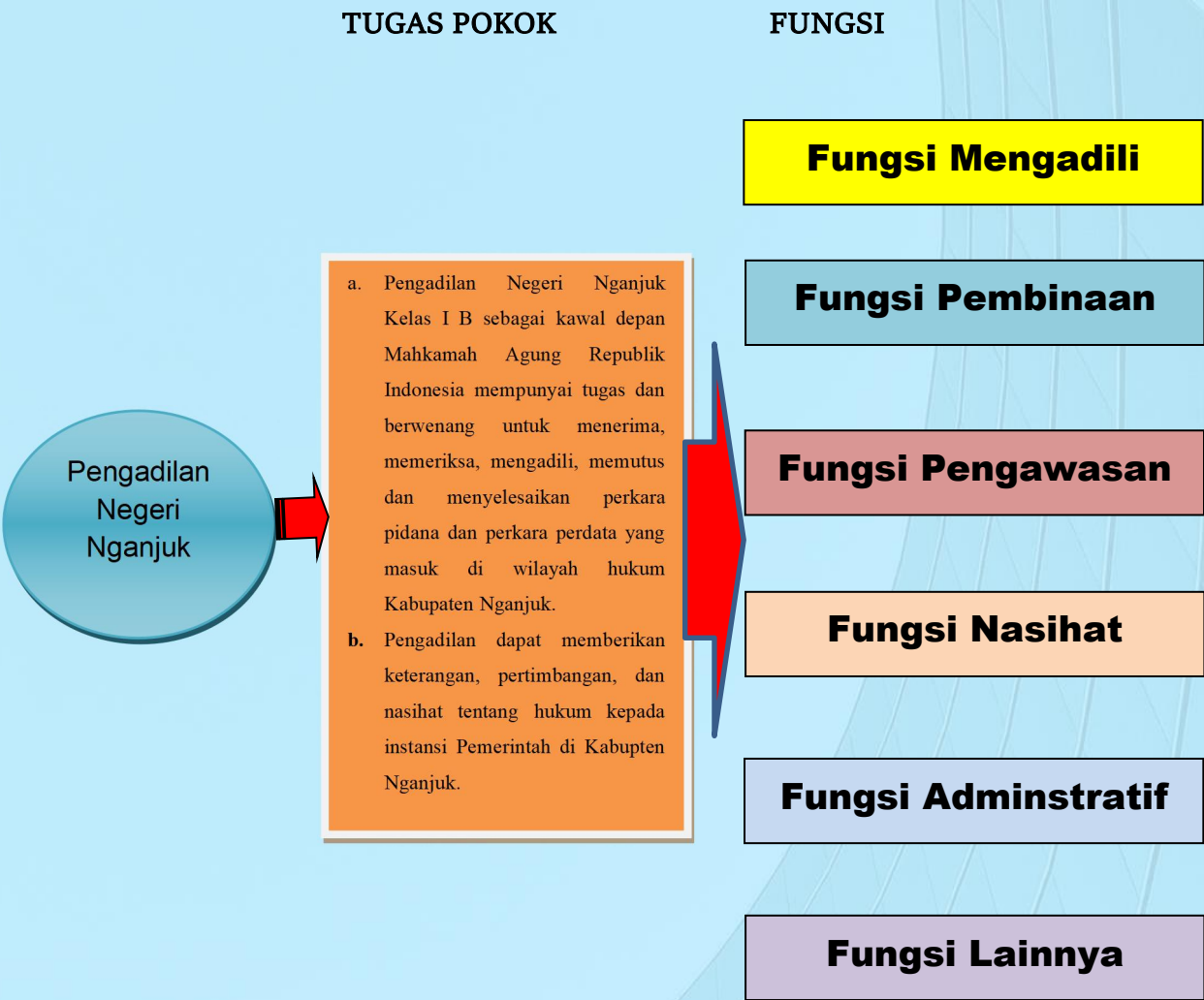
- a. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk.
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di Kabupaten Nganjuk.

3. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB antara lain:



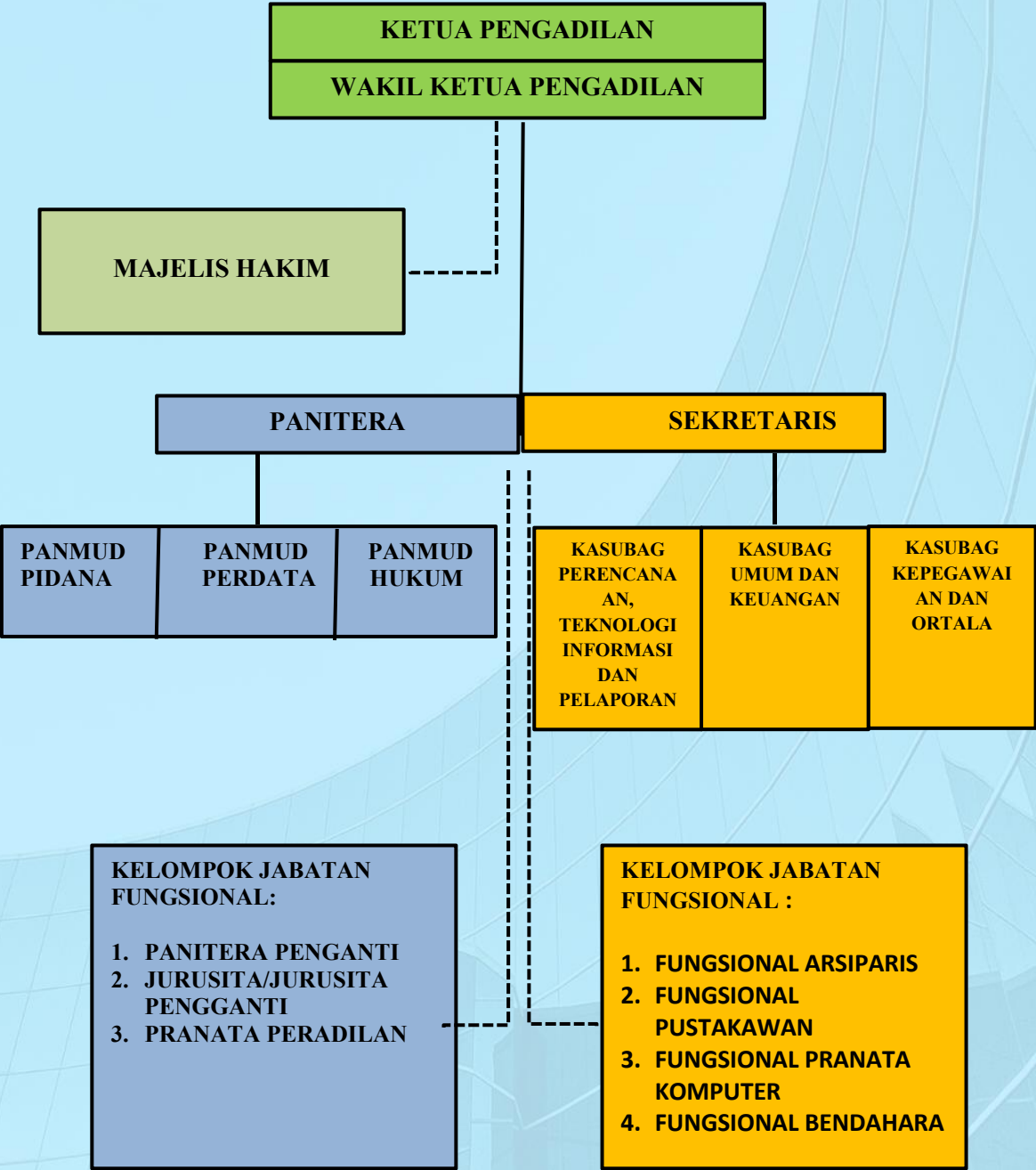
Gambar 1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Negeri



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Perma No. 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk



Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 5 orang Hakim, 1 Orang Panitera, 1 orang Sekretaris, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Kepala Sub Bagian, 8 orang Panitera Pengganti, 6 orang Jurusita /

Jurusita Pengganti, 12 orang Analis perkara Peradilan (termasuk Calon Hakim), 2 orang analis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 2 Orang Pengadministrasi Register Perkara 1 orang arsiparis pelaksana, 1 orang PPPK dan 9 orang PPNP.

C. 1 Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin.

Secara kuantitas, sumber daya manusia berdasarakan jenis kelamin di Pengadilan di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Teknis

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Ketua	1	-	1
2.	Wakil Ketua	1	-	1
3.	Hakim	4	1	5
4.	Cakim	5	3	8
5.	Panitera	1	-	1
6.	Panitera Muda	2	1	3
7.	Panitera Pengganti	4	4	8
8.	Jurusita/Jurusita Pengganti	4	2	6
Total		22	11	33

2. Tenaga Non Teknis

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Non Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

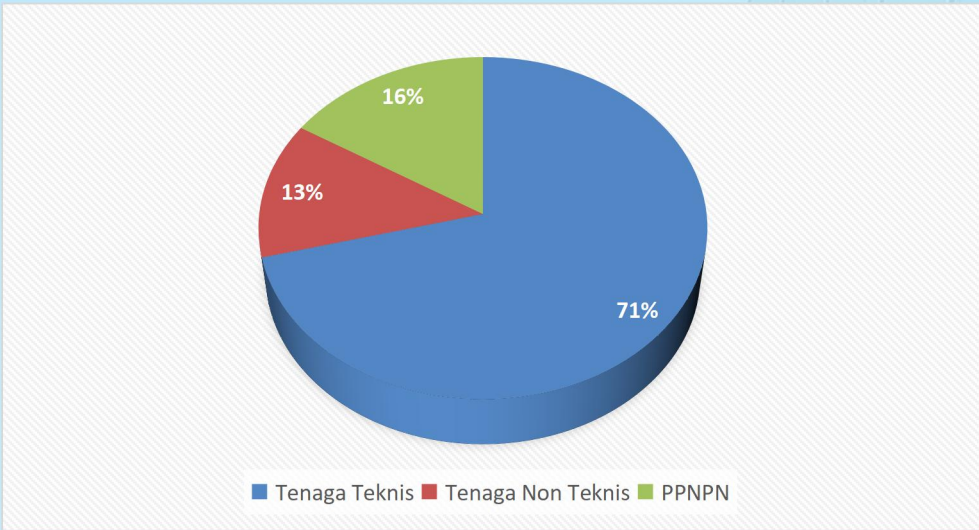
No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretaris	1	-	1
2.	Kepala Sub. Bagian	2	1	3
3.	Pelaksana	1	5	6
4.	PPPK	-	1	1
5.	CPNS	-	3	3
Total		4	10	14

3. PPNPN

Tabel 1.3 Jumlah Tenaga PPNPN Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

No.	Tupoksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Satpam	3	-	3
2.	Sopir	1	-	1
3.	Pramubakti	-	5	5
Total		4	5	9

Grafik 1.1 Kuantitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk Brdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



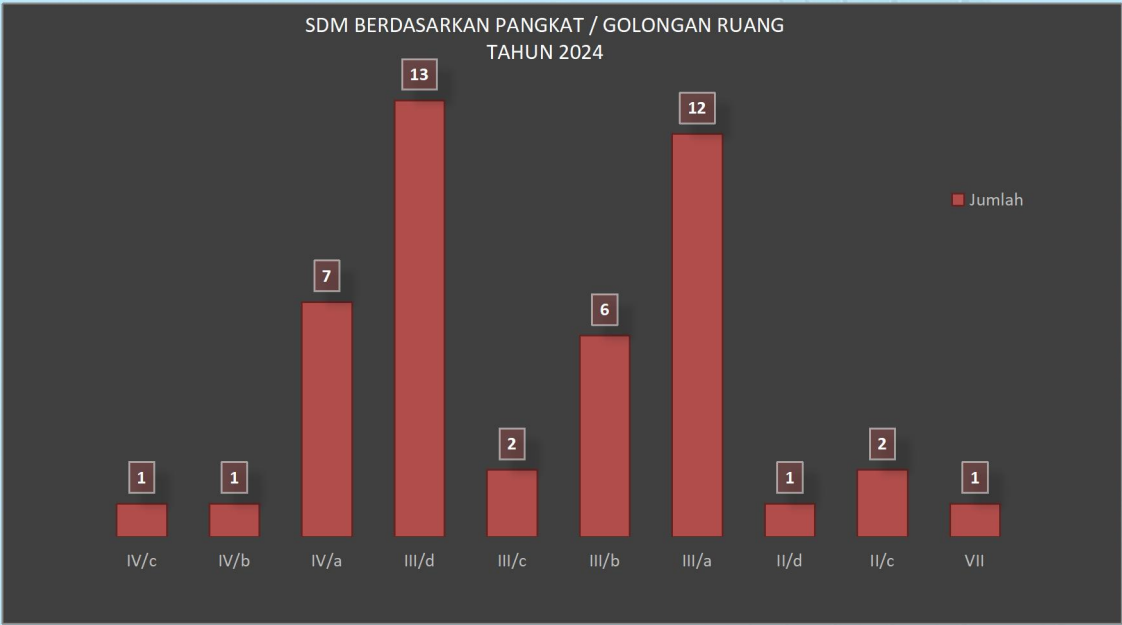
C.2 Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang.

Keadaan Sumber daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang Tahun 2024

	Pangkat/Golongan Ruang	JUMLAH
PNS	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	7
	Penata TK. I III/d)	13
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk. I (III/b)	6
	Penata Muda (III/a)	12
	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	2
PPK	VII	1

Grafik 1.2 SDM Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2024



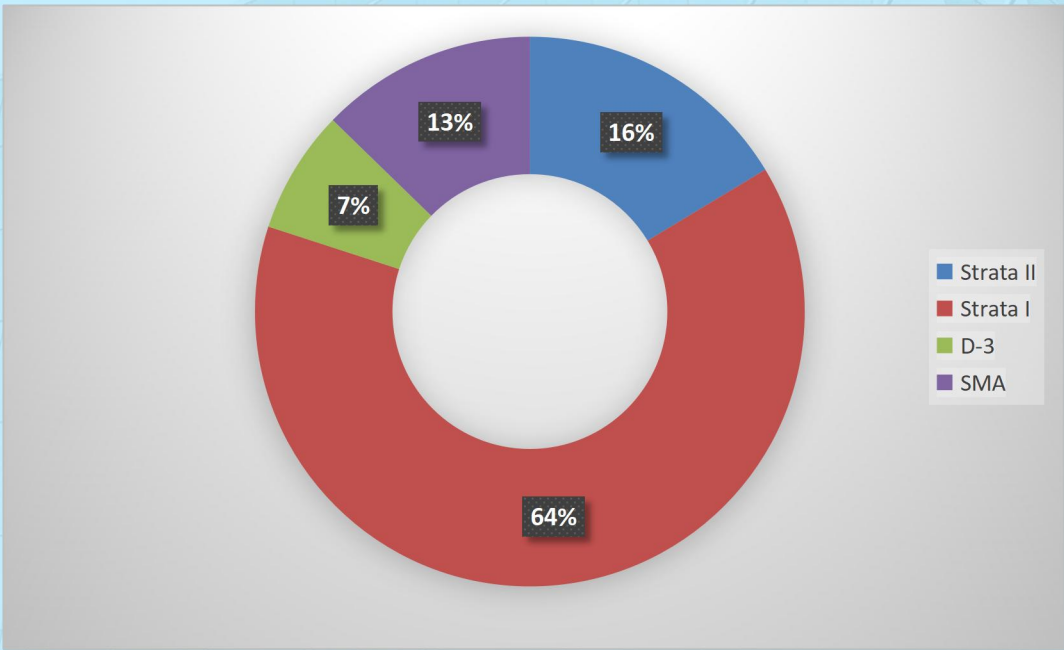
C.3 Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.

Keadaan Sumber daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada data sebagai berikut:

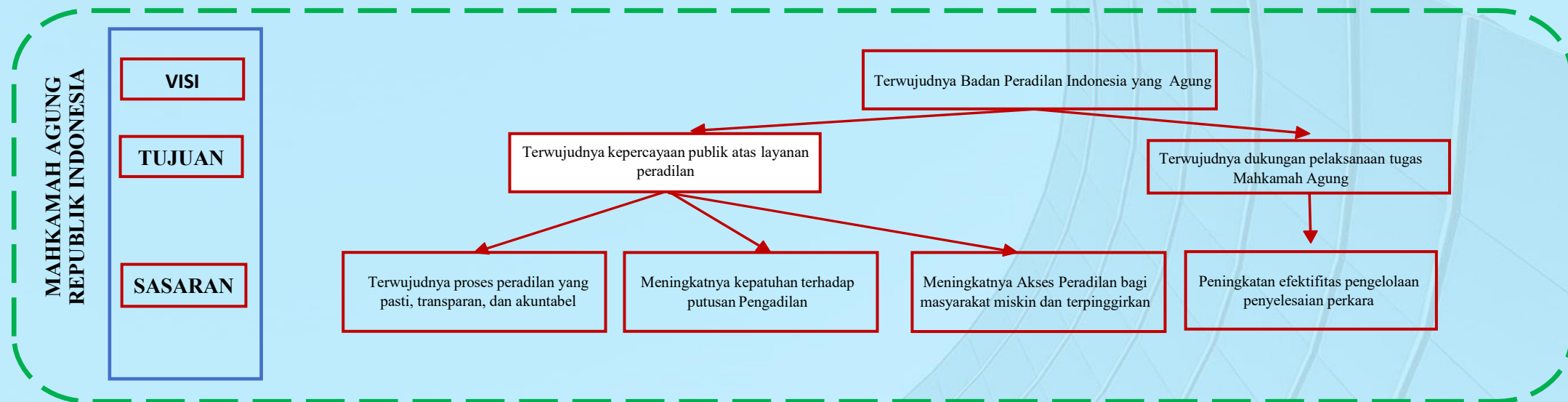
Tabel 1.5 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

	Jenis Pendidikan Pegawai					
	Strata 2 (S-2)	Strata 1 (S-1)	Doplama 3 (D-3)	SMA	SMP	SD
JUMLAH	9	35	4	7	-	-

Grafik 1.2 SDM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

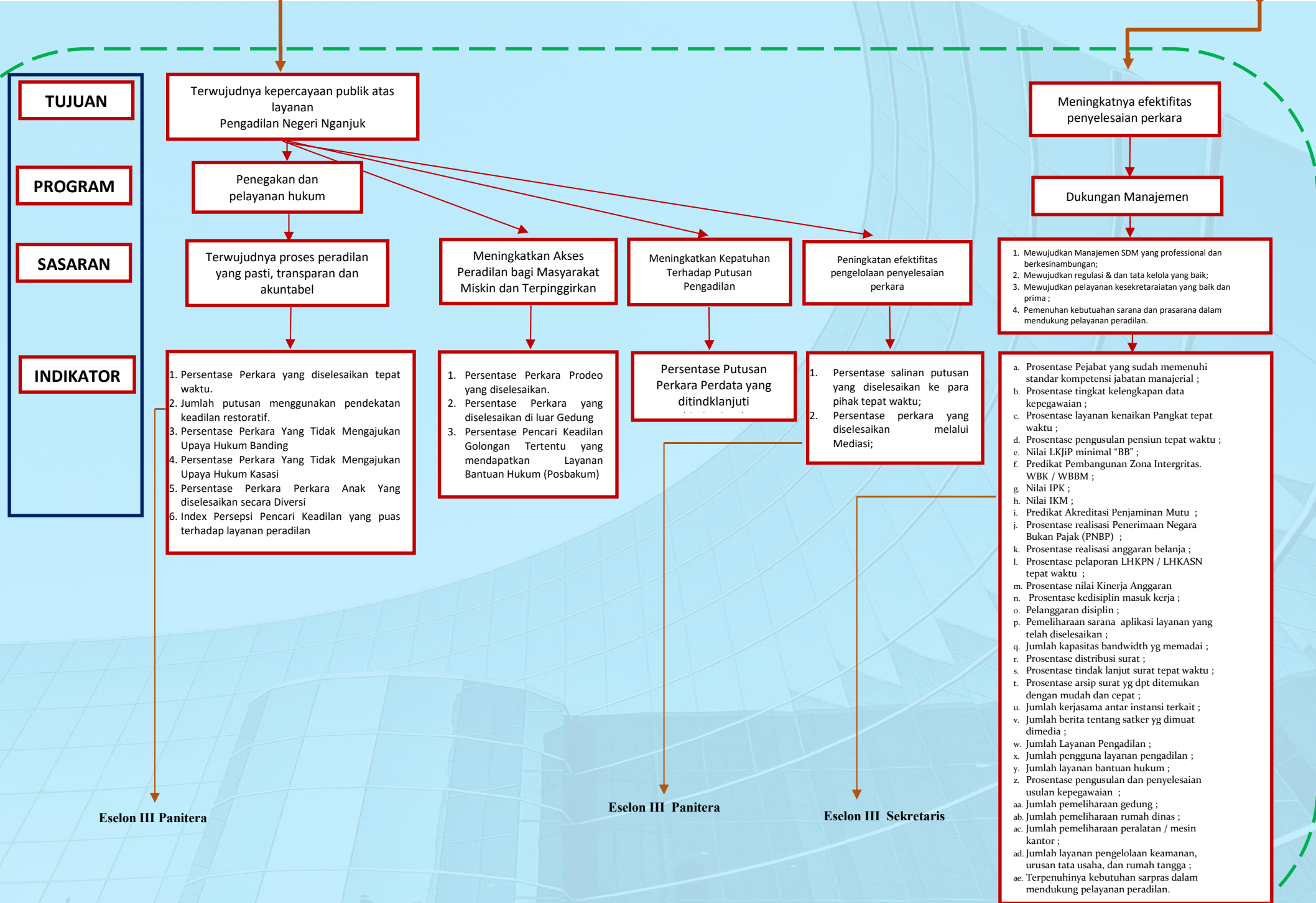


POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI NGANJUK



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung





KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara

Terlaksananya efektifitas dalam menerima, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya

Persentase perkara yang diterima, diputus dan diselesaikan tepat waktu

Melaksanakan tugas pengawasan bidang

Terlaksananya pengawasan bidang

Persentase pengawasan bidang yang ditindaklanjuti

Pimpinan (Sasaran 1)

Pimpinan (Sasaran 2)

Pimpinan (Sasaran 1)

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PANITERA

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Terwujudnya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

1. Persentase pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis yang berkualitas dan tepat waktu;
2. Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata dan pidana yang berkualitas dan tepat waktu;
3. Persentase penyajian data perkara yang disajikan secara transparan dan tepat waktu;
4. Persentase pelaksanaan mediasi yang berhasil;
5. Persentase penyelesaian administrasi keuangan perkara yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu;
6. Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk yang berkualitas dan tepat waktu;

Eselon IV Bagian Kepaniteraan

SEKRETARIS

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

1. Persentase pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
2. Persentase pelaksanaan urusan kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu ;
3. Persentase pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Persentase pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang efektif dan efisien ;
5. Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolkan, hubungan masyarakat dan perpustakaan yang efektif, efisien, dan tepat waktu;
6. Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan yang berkualitas dan tepat waktu;
7. Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk yang berkualitas dan tepat waktu;

Eselon IV Bagian Kesekretariatan

Crosscutting Panitera dengan Sekretaris

ESELON III

Eselon III (Panitera)

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PANMUD PERDATA

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata

Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien

- Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Persentase registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Persentase distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Persentase penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Persentase pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir dengan baik;
- Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Persentase penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Persentase pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Persentase penerimaan konsinyasi;
- Persentase penerimaan permohonan eksekusi;
- Persentase penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Persentase penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Persentase urusan tata usaha Kepaniteraan;
- Persentase fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANMUD PIDANA

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana

Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien

- Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Pidana;
- Persentase registrasi perkara pidana;
- Persentase penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Persentase distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Persentase penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- Persentase penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik;
- Persentase penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Persentase pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Persentase pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Persentase penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Persentase pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Persentase pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Persentase penerimaan permohonan eksekusi;
- Persentase penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Persentase penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Persentase urusan tata usaha kepaniteraan;
- Persentase fungsi yang lain diberikan oleh Panitera;

PANMUD HUKUM

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum

Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan

- Persentase pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara ;
- Persentase penyajian statistik perkara;
- Persentase penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Persentase penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Persentase kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Persentase penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Persentase penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- Persentase fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

PANITERA PENGGANTI

Melaksanakan dukungan administrasi persidangan

Terlaksananya dukungan administrasi persidangan dan administrasi perkara

- Persentase persiapan penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu;
- Persentase pencatatan proses persidangan tepat waktu.
- Persentase penyusunan berita acara persidangan tepat waktu;
- Persentase penyimpanan berkas perkara sd perkara diputus dan diminutasi tepat waktu;
- Persentase penyampaian berkas berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera muda untuk diteruskan kepada Panitera muda hukum

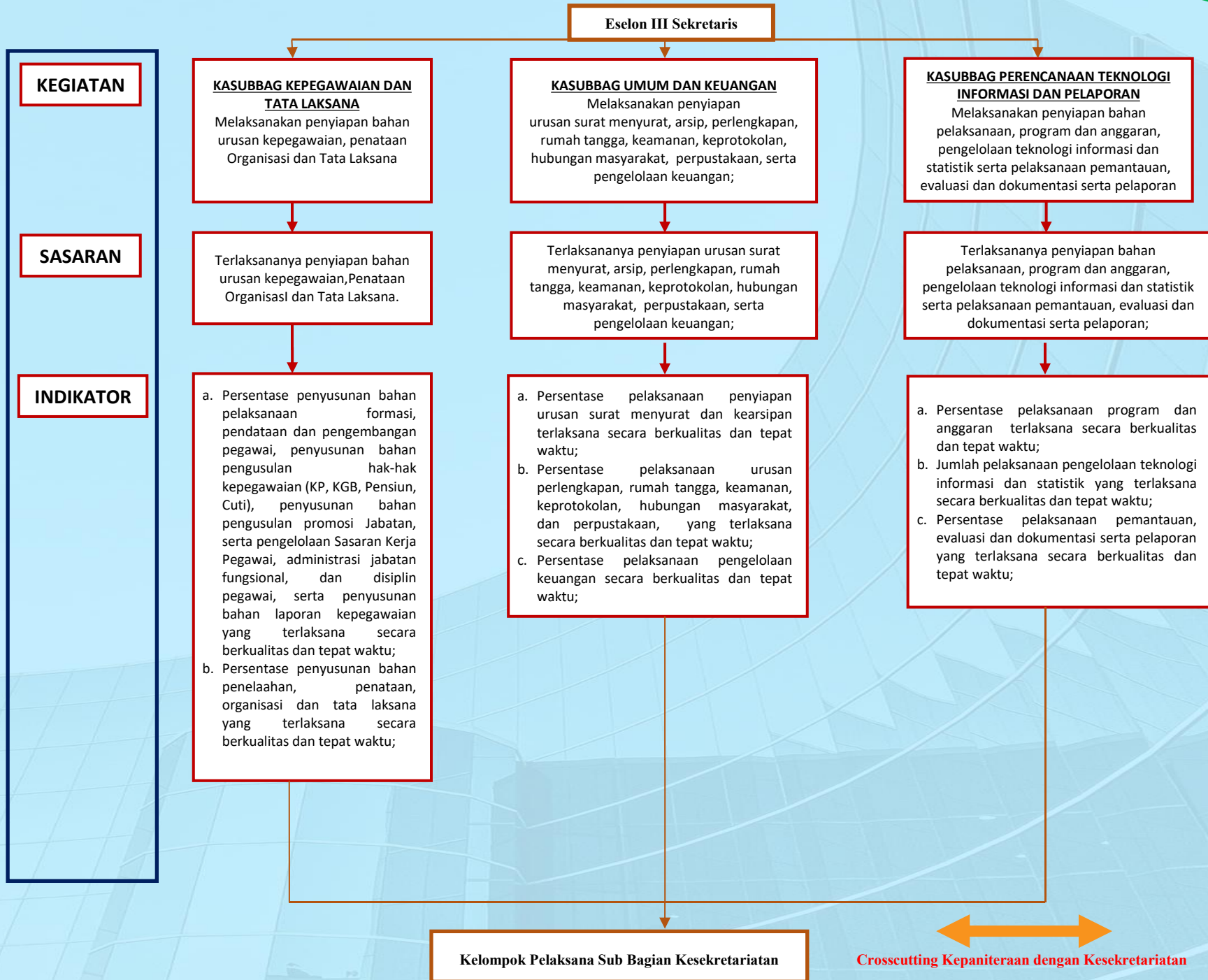
JURU SITA/ JURUSITA PENGGANTI

Melaksanakan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Terlaksananya dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- Persentase pemanggilan kepada para pihak persidangan yang tepat waktu;
- Persentase pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Persentase persiapan sita dan eksekusi;
- Persentase pelaksanaan sita dan eksekusi;
- Persentase penyusunan BA dan penyerahan BA sita dan eksekusi yang tepat waktu;

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan



KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pelaksana Sub Bagian Kesekretariatan

PELAKSANA SUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Membantu penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim urusan kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Terlaksananya penyiapan penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim urusan kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- Persentase menyiapkan bahan pelaksanaan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, menyiapkan bahan pengusulan hak-hak kepegawaian (KP, KGB, Pensiun, Cuti), menyiapkan bahan pengusulan promosi Jabatan, serta mengumpulkan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan disiplin pegawai, serta menyiapkan bahan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- Persentase menyiapkan konsep penelaahan, penataan, organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;

PELAKSANA SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Membantu penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolkan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan;

Terlaksananya penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolkan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan;

- Persentase menyiapkan konsep urusan surat menyurat dan kearsipan terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- Persentase menyiapkan bahan urusan perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolkan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- Persentase menyiapkan konsep keuangan secara berkualitas dan tepat waktu;

PELAKSANA SUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Membantu penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;

Terlaksananya penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;

- Persentase menyiapkan bahan program dan anggaran terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- Jumlah menyiapkan bahan pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- Persentase mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pelaksana Kepaniteraan

PELAKSANA PERDATA

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata

Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien

- Persentase pembuatan data laporan bulanan, 4 bulanan dan Tahunan tepat waktu;
- Persentase verifikasi pendaftaran perkara melalui e-Court tepat waktu;
- Persentase pencatatan register Perkara Perdata masuk dan Upaya Hukum yang tepat waktu;
- Persentase mencatat buku kas keuangan eksekusi, konsignasi dan buku penerimaan hak-hak Kepaniteraan PNPB yang tepat waktu;
- Persentase penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan banding, kasasi dan PK ke bagian Kepaniteraan Hukum;
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu;
- Persentase fungsi lain yang diberikan oleh Panitera Muda Perdata;

PELAKSANA PIDANA

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana

Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien

- Persentase pembuatan data laporan bulanan, 3 dan 6 bulanan tepat waktu;
- Persentase pencatatan register Perkara Pidana masuk, barang bukti, penahanan dan Upaya Hukum yang tepat waktu;
- Persentase pembuatan penetapan persetujuan penyitaan dan penggeledahan perkara pidana yang tepat waktu;
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan banding, kasasi dan PK ke bagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu;
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu;
- Persentase fungsi lain yang diberikan oleh Panitera Muda Pidana;

PELAKSANA HUKUM

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum

Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan

- Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3, dan 6 bulan tepat waktu;
- Persentase pencatatan Register bantuan hukum dan pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi baik;
- Persentase penanganan pendaftaran waarmeking yang tepat waktu;
- Persentase pengumpulan dan mengelola data serta menyajikan statistik perkara;
- Persentase pembuatan permohonan salinan Putusan BHT yang tepat waktu;
- Persentase penginputan Aplikasi pelaporan tepat waktu;
- Persentase penetapan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Persentase penginputan upaya hukum ke SIPP tepat waktu;
- Persentase fungsi lain yang diberikan oleh Panitera Muda Hukum;

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

A. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG DIHADAPI ORGANISASI

a. Isu Internal

1. Aspek Proses Peradilan

Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Adanya kekurangan tenaga Staf untuk menangani administrasi perkara dan umumnya para Staf yang ada juga merangkap jabatan lain, selain itu tenaga honorer yang bertugas sebagai cleaning service juga diperbantukan di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan sehingga tidak dapat fokus pada satu pekerjaan;
- b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB.

3. Aspek Sarana Dan Prasarana

Terdapat beberapa fasilitas yang belum bisa mendukung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

b. Isu eksternal

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perkara ;
- b. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Distribusi Hakim dan aparaturnya yang belum merata ;
- b. Adanya rangkap pekerjaan antara staf dan jurusita pengganti.

3. Aspek Pembinaan Dan Pengawasan

Adanya program akreditasi dan pembanguna ZI yang dicanangkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yang menuntut agar jajaran dibawahnya selalu

meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan sesuai dengan standart y\ng telah ditetapkan.

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- a. Adanya peraturan perundang - undangan yang selalu berubah menuntut aparatatur peradilan agar selalu meng update peraturan terbaru demi kelancaran pekerjaan ;
- b. Balasan bantuan relaas delegasi ke Pengadilan luar yang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk datangnya sering tidak tepat waktu, sehingga pada waktu pemeriksaan dipersidangan belum diketahui apakah panggilan sudah dilaksanakan atau belum;
- c. Kurang tepat waktunya para pencari keadilan dalam mematuhi jadwal sidang.

5. Aspek Sarana Dan Prasarana

- a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Nganjuk belum sesuai dengan kebutuhan rencana yang diajukan , sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan kantor;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menambah kenyamanan para pencari keadilan.

B. SISTEMATIKA PELAPORAN

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Nganjuk.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

A. RENCANA STRATEGIS



Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.



Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI



“TERWUJUDNYA PENGADILAN
NEGERI NGANJUK KELAS IB
YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi dalam melakukan aktifitasnya.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai berikut :



- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB ;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB;
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB;

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB.



Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparansi dan Akuntabel;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung. 3. Persentase pekara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. 4. Persentase pekara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. 6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan efektivitas pegelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu. 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi para pencari keadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. 3. Persentase pencari keadilan golngan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum).
Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	1. Persentase pejabat yang sudah memenuhi standard kompetensi jabatan manajerial. 2. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian.

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

		3. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu. 4. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu.
Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1. Nilai LKJIP minimal BB 2. Predikat pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. 3. Nilai IPK. 4. Nilai IKM. 5. Predikat Ampuh 6. Persentase realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 7. Persentase realisasi anggaran belanja. 8. Persentase pelaporan LHKPN dan LHK-ASN tepat waktu. 9. Persentase nilai kinerja anggaran. 10. Persentase kedisiplinan masuk kerja
Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	1. Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan. 2. Jumlah kapasitas banwith yang memadai. 3. Persentase distribusi surat. 4. Persentase tindak lanjut surat tepat waktu. 5. Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. 6. Jumlah kerjasama antara instansi terkait. 7. Jumlah berita tentang satker yang dimuat di media. 8. Jumlah layanan pengadilan. 9. Jumlah pengguna layanan pengadilan. 10. Jumlah layanan bantuan hukum. 11. Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian. 12. Jumlah pemeliharaan gedung. 13. Jumlah pemeliharaan rumah dinas. 14. Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor.

		15. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Pokok

- a. Layanan Perkantoran: Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraa Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
- b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
- b. Mewujudkan pelayanan kesekretaraiatan yang baik dan prima.
- c. Pemenuhan kebutuuahan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

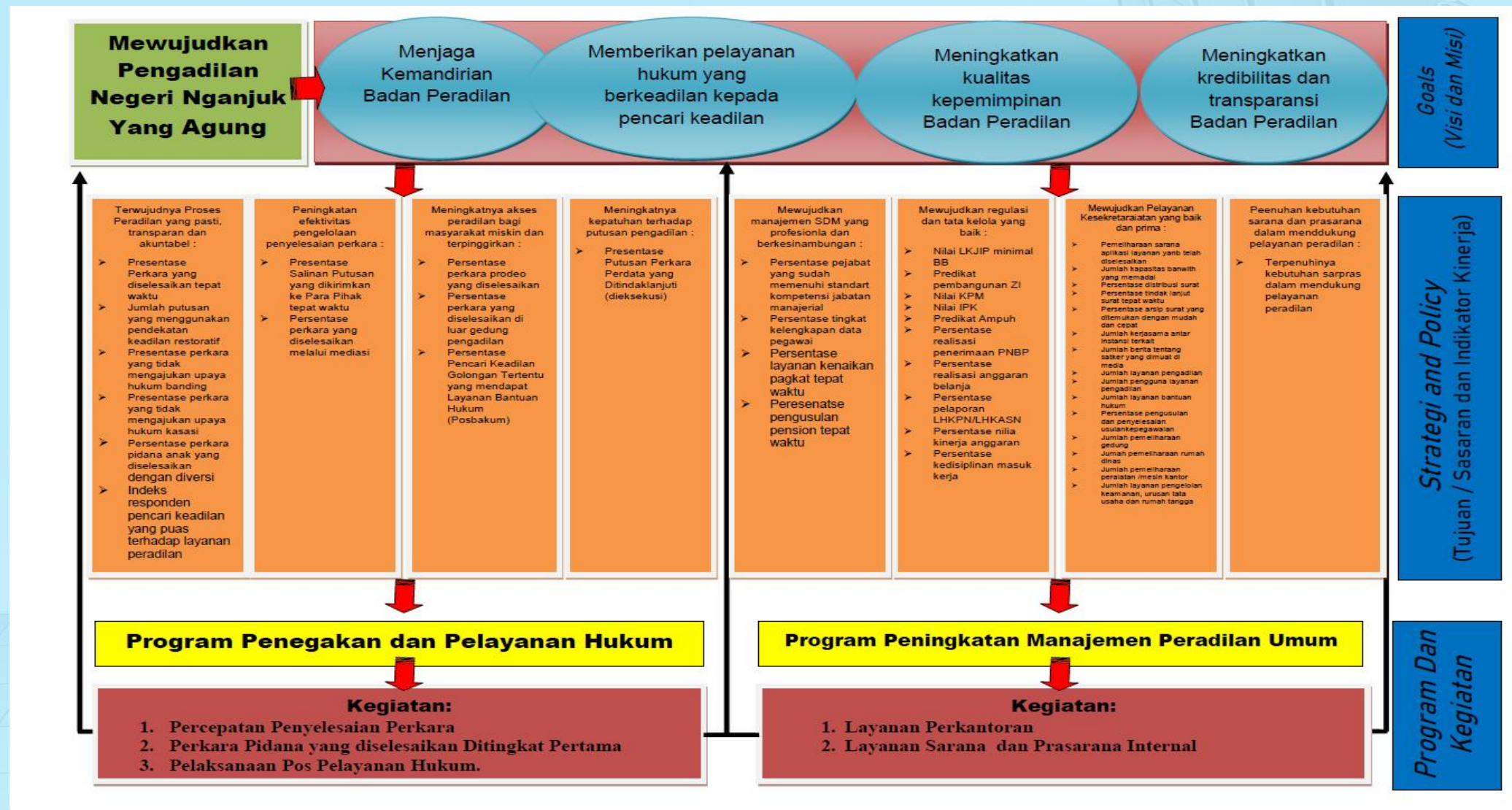
Kegiatan Pokok :

- a. Percepatan Penyelesaian Perkara
- b. Perkara Pidana yang diselesaikan Ditingkat Pertama
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Gambar 2.1 Kerangka Kinerja Renstra Pengadilan Negeri Nganjuk



Tabel 2.2 Matrik Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator kinerja	Jangka Menengah	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1.	Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	85%	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 70%	100% 70%	95% 75%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Percepatan penyelesaian	2 kegiatan	1.500.000
		b Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%		b Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	1%	1%	100%			Perakara Pidana yang diselesaikan di	356 perkara	111.000.000

	c	Persentas e perkara yang Tidak Mengajuk an Upaya Hukum Banding	80%		c	Persentase perkara yang Tidak Mengajuka n Upaya Hukum banding	94%	90%	80%	80%	80%			tingka t perta ma Layan an pos bantu an hoku m	28 o OJ	28.000. 000
	d	Persentas e perkara yang Tidak Mengajuk an Upaya Hukum Kasasi	90%		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajuka n Upaya Hukum Kasasi	94%	95%	90%	90%	90%					
	e	Persentas e perkara anak yang diselesaik an dengan Diversi.	70%		e	Persentase perkara anak yang diselesaika n dengan Diversi.	10%	15%	70%	70%	10%					
	f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap	90%		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap	85%	90%	90%	90%	90%					

		layananpe radilan.			layanan peradilan.										
2.	Memberik an pelayanan hukum yang berkeadila n kepada pencari keadilan	a	Persentas e salinan putusan yang disampaik an ke para pihak tepat waktu.	90%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaia n perkara	a	Persentase salinan putusan yang disampaika n ke para pihak tepat waktu.	100%	100 %	90%	90%	90%			
		b	Persentas e perkara yang diselesaik an melalui mediasi.	10%		b	Persentase perkara yang diselesaika n melalui mediasi.	15%	10%	7%	7%	10%			
3.	Memberik an aksesbilia tas yang mudah bagi masyarak at pencari keadilan	a	Persentas e perkara prodeo yang diselesaik an.	100 %	Meningkatn ya akses peradilan bagi masayarak t miskin dan terpinggirka n	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaika n.	100%	100 %	0%	1%	100 %			
		b	Persentas e perkara yang diselesaik an diluar	1%		b	Persentase perkara yang diselesaika n diluar	100%	100 %	0%	1%	1%			

		gedung pengadilan.			gedung pengadilan.										
		c Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%		c Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	80%	50%	50%	50%					
5.	Mewujudkan	a Persentase Pejabat	90%	Mewujudkan	a Persentase Pejabat	-	-	80%	80%	90%	Program	Pembiayaan	Layanan		6.519.107.000

6.	Manajeme n SDM yang profession al dan berkesina mbu ngan		yang sudah memenuhi standar kompeten si jabatan manajeria l	Manajemen SDM yang professional dan berkesinam bu ngan	yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial							Duku ng an mana je men	admi nistra si dan penge lolaan Keua ngan BUA	perka ntora n Layan an Saran a Intern al	77.278.0 00	
		b	Persentas e tingkat kelengkap an data kepegawai an		80%	b	Persentase tingkat kelengkap an data kepegawaia n	-	-	100 %	100 %					80%
		c	Persentas e layanan kenaikan Pangkat tepat waktu		100 %	c	Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	-	-	100 %	100 %					100 %
		d	Persentas e pengusula n pensiun tepat waktu		100 %	d	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	-	-	100 %	100 %					100 %
6.	Mewujudk	a	Nilai	BB	Mewujudka	a	Nilai LKJiP	-	-	75	75	BB				

an regulasi & tata kelola yang baik		LKJIP minimal “BB”		n regulasi & tata kelola yang baik		minimal “BB”													
	b	Predikat Pembangu nan Zona Intergrita s. WBK / WBBM	WBK		b	Predikat Pembangun an Zona Intergritas. WBK / WBBM	-	-	WBK	WBK	WBK								
	c	Nilai IPK	90%		c	Nilai IPK	-	-	90%	90%	90%								
	d	Nilai IKM	90%		d	Nilai IKM	-	-	90%	90%	90%								
	e	Predikat AMPUH	Ung gul		e	Predikat AMPUH	-	-	A	A	Ungg ul								
	f	Persentas e realisasi Penerimaa n Negara Bukan Pajak (PNBP)	100 %		f	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	100 %	100 %	100 %								
	g	Persentas e realisasi anggaran belanja	95%		g	Persentase realisasi anggaran belanja	-	-	97%	97%	95%								

		h	Persentas e pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%		h	Persentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	-	-	95%	95%	95%					
		i	Persentas e nilai Kinerja Anggaran	90%		i	Persentase nilai Kinerja Anggaran	-	-	80%	80%	90%					
		j	Persentas e kedisiplin masuk kerja	95%		j	Persentase kedisiplin masuk kerja	-	-	95%	95%	95%					
7.	Mewujudk an pelayanan Kesekreta riatan yang Baik / prima	a	Pemelihara aan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaik an	100 %	Mewujudka n pelayanan Keseekretari atan yang Baik / prima	a	Pemelihara an sarana aplikasi layanan yang telah diselesaika n	-	-	1 aplik asi	1 aplik asi	100 %					
		b	Jumlah kapasitas bandwidth yg	100 mbp s		b	Jumlah kapasitas bandwidth yg	-	-	50 Mbps	100 Mbps	100 Mbps					

38

		satker yg dimuat dimedia				satker yg dimuat dimedia													
		h	Jumlah layanan pengadila n	7lay a nan		h	Jumlah layanan pengadilan	-	-	7 laya nan	7 laya nan	7laya nan							
		i	Jumlah pengguna layanan pengadila n	200 oran g		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	-	-	250 oran g	250 oran g	200 oran g							
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	80 oran g		j	Jumlah layanan bantuan hukum	-	-	200 oran g	200 oran g	80 oran g							
		k	Persentas e pengusula n dan penyelesai an usulan kepegawai an	100 %		k	Persentase pengusulan dan penyelesaia n usulan kepegawaia n	-	-	100 %	100 %	100 %							
		l	Jumlah pemelihara aan gedung	3.00 o m2		l	Jumlah pemelihara an gedung	-	-	2.259 m2	3.00 om2	3.00 om2							

		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	-	-	5 unit	5 unit	5 unit						
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	-	-	103 unit	114 unit	114 unit						
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	-	-	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan						
8.	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana		Terpenuhi nya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung	90%	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung		Terpenuhi nya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung	-	-	90%	90%	90%						

dalam mendukung Pelayanan Peradilan	g Pelayanan Peradilan		Pelayanan Peradilan	Pelayanan Peradilan											
-------------------------------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024



Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Seiring dengan pelaksanaan kinerja selama satu tahun berjalan, terdapat beberapa target kinerja yang perlu disesuaikan agar target kinerja yang telah di tetapkan realistis dan bisa dicapai. Adapun perubahan target kinerja tertuang dalam Reviu Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1.	Pidana	95%
		2.	Perdata	75%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
		f	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal “BB”	BB
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Ampuh	Unggul
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	95%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.	Pemeliharaan sarana apliaksi layanan yang telah diselesaikan	100%
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c	Persentase distribusi surat	100%
		d	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e	Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita
		h	Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang
		k	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam medukung pelayanan peradilan	90%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Sama halnya dengan rencana kinerja tahun 2024, perjanjian kinerja 2024 Pengadilan negeri Nganjuk juga telah direviu untuk menyesuaikan antara target dengan realisasi agar target kinerja tetap realistis dan dapat dicapai oleh organisasi. Adapun Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1.	Pidana	95%
		2.	Perdata	75%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
		f.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal “BB”	BB
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Ampuh	Unggul
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	95%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.	Pemeliharaan sarana apliaksi layanan yang telah diselesaikan	100%
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c.	Persentase distribusi surat	100%
		d.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e.	Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita
		h	Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang
		k	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2024 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Pendukung Tercapainya Sasaran Strategis

No.	Program	Anggaran Sebelum Revisi	Anggaran Setelah Revisi
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.069.107.000	Rp.6.596.385.000
2.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Rp. 142.510.000	Rp. 140.969.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. 1 Analisis Akuntabilitas Kinerja



Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2023 dengan realisasinya. Adapun formulasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2023 adalah sebesar 108,18%.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
			1.	Pidana	95%	100%	105,26%
			2.	Perdata	75%	97,20%	129,6%
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100%	100%
		c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	93,67%	117,09%
		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	95,61%	106,23%
		e.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	--NA--	--NA--
		f.		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,28%	105,87%
Rata- Rata Capaian Kinerja							110,68%

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a .		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	100%	111,11%
		b .		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%	11,90%	119%
Rata- Rata Capaian Kinerja							115,06%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a .		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%
		b .		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%	--NA--	--NA--
		c .		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata- Rata Capaian Kinerja							50%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	78,57%	157,14%
Rata- Rata Capaian Kinerja							157,14%

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.		Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	90%	100%
		b.		Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%	100%	125%
		c.		Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
		d.		Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%
Rata- Rata Capaian Kinerja							106,25%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.		Nilai LKJiP minimal “BB”	(BB)	BB	100%
		b.		Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK	-	0%
		c.		Nilai IPK	90%	95,28%	105,87%
		d.		Nilai IKM	90%	98,94%	109,93%
		e.		Predikat Ampuh	Unggul	-	0%
		f.		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%
		g.		Persentase realisasi anggaran belanja	95%	95,62%	100,65%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja
		h	Persentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%
		i	Persentase nilai Kinerja Anggaran	90%	99,18%	110,2%
		j	Persentase kedisiplin masuk kerja	95%	97,92%	103,07%
Rata- Rata Capaian Kinerja						83,50%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%
		b	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps	120 Mbps	120%
		c	Persentase distribusi surat	100%	100%	100%
		d	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e	Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%	111,11%
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3	3	100%
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita	44 berita	183,33%
		h	Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan	7 Layanan	100%
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang	341 orang	170,5%
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang	266 orang	332,5%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja
		k	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2	3.000 m2	100%
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit	3 unit	60%
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit	119 unit	104,39%
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layana n	12 bulan layanan	100%
Rata- Rata Capaian Kinerja						126,20%
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam medukung pelayanan peradilan	90%	100%	111,11%
Rata- Rata Capaian Kinerja						111,11%
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024						107,49%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Startegis 1 : Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
1.	Pidana	95%	100%	105,26%
2.	Perdata	75%	97,20%	129,6%
2.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100%	100%
3.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	93,67%	117,09%
4.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	95,61%	106,23%
5.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	--NA--	--NA--
6.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,28%	105,87%
Capaian Kinerja sasaran Staregti 1				110,68%

Dari Tabel 3.2. didapatkan rata - rata capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebesar 110,68%.

Capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan .

Analisis Sasaran Strategis I

1. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Analisis Capaian Kinerja

Untuk perkara perdata, dari 286 jumlah perkara yang diselesaikan, 278 perkara diselesaikan tepat waktu, jadi persentase realisasi capaian tahun 2024 sebesar 97,20%. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75%, sedangkan realisasinya 97,20% sehingga capaian kinerja untuk tahun 2024 adalah sebesar 129,6%

Untuk perkara pidana, dari 283 jumlah perkara yang diselesaikan, 283 perkara diselesaikan tepat waktu, jadi persentase realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan target kinerja yang telah ditetapkan adalah 95%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 105,25%

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

Indikator kinerja			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
1. Perdata	75%	97,20%	129,6%
2. Pidana	95%	100%	105,26%

Realisasi kinerja untuk indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 adalah sebesar 100%, sama seperti realisasi kinerja pada tahun 2024. Untuk perkara perdata realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 99,53%, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 97,20%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terdapat 8 perkara perdata yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan.

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 -2024

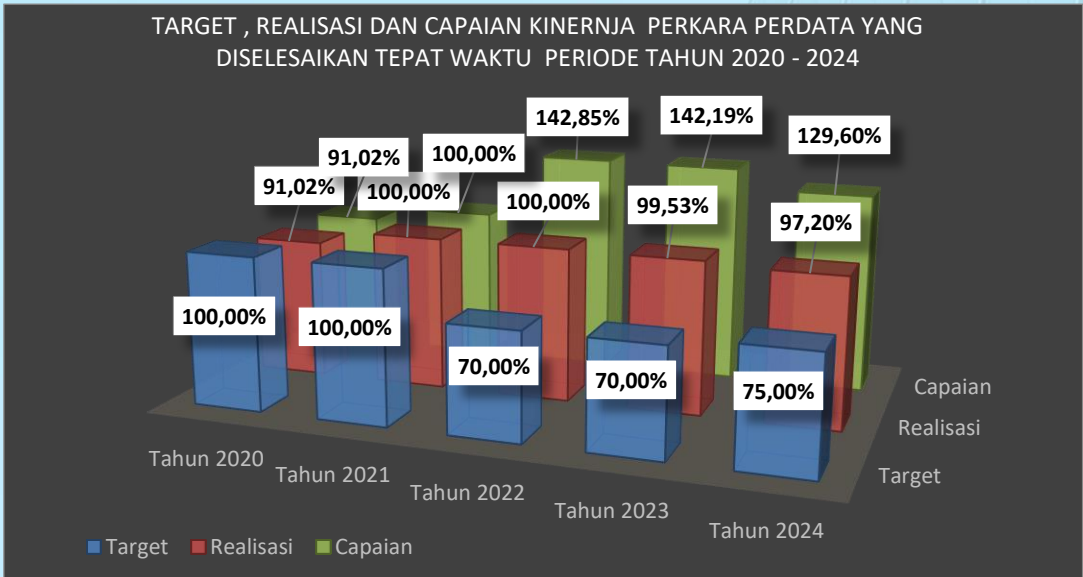
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Pidana	70%	99,53%	142,19%	75%	97,20%	129,6%
2. Perdata	100%	100%	100%	95%	100%	105,26%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 -2024

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	286	278	75%	97,20%	129,6%
	Pidana	283	283	95%	100%	105,26%
2023	Perdata	214	213	70%	99,53%	142,19%
	Pidana	255	255	100%	100%	100%
2022	Perdata	289	289	70%	100%	142,85%
	Pidana	384	384	100%	100%	100%
2021	Perdata	239	239	100%	100%	100%
	Pidana	334	334	100%	100%	100%
2020	Perdata	213	184	100%	91,02%	91,02%
	Pidana	412	375	100%	86,38%	86,38%

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024



Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 12,59% khususnya perkara perdata.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penurunan kinerja pada indikator ini dikarenakan perubahan kinerja dan juga perkara yang berubah tiap tahunnya. Perhitungan indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu dihitung sejak mediasi gagal atau semenjak gugatan dibacakan. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi khususnya pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) serta pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding . Pada tahun 2024 terdapat 8 (delapan) perkara perdata yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan para pihak yang berperkara sering tidak hadir dalam persidangan dan tempat tinggal para pihak jauh atau diluar Kabupaten Nganjuk. Meskipun demikian, capaian kinerja pada tahun 2024 untuk indikator ini adalah BAIK, karena capaian kinerja pada tahun ini diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan dengan baik.

HAL INI TIDAK TERLEPAS DARI UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN NEGERI NGANJUK YAITU DIANTARANYA:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara , sejak perkara masuk hingga putus melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara lewat WA grub setiap pagi oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk.

- 3. Dalam pelaksanaan rapat pembinaan dan pengawasan dan rapat-rapat insidentil, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk selalu menghimbau kepada seluruh hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku.
- 4. Penerapan SOP penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan.
- 5. Adanya inovasi pengiriman soft copy dakwaan dan tuntutan melalui aplikasi ASTRAL sehingga mempercepat distribusi soft file dari kejaksaan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk percepatan penyelesaian perkara.

2. Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung dihitung dari perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.

Penerapan Restoratif justice di lingkungan Mahakamah Agung diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan restorative. Perkara yang diajukan untuk restorative justice adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk menangani 1 (satu) perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative justice.

Target yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 100%, sedangkan realisasinya 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase putusan yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restorative adalah sebesar 100%

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2023-2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	--NA--	--NA--	100%	100%	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan Dengan restorative	Jumlah Perkara Yang diajukan restorative	Target	Realisasi	Capaian
2024	1	1	100%	100%	10.000%
2023	0	0	1%	--NA--	--NA--
2022	0	0	2%	--NA--	--NA--

Grafik 3.3. Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorativ Tahun 2022-2024



Perbandingan capaian kinerja pada indikator ini hanya dapat disajikan dari tahun 2022 samai dengan tahun 2024, karena indikator kinerja persentase putusan yang menggunakan restorative justice baru ditargetkan pada tahun 2022.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan data yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2024 sangatlah tinggi dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, hal ini disebabkan target kinerja untuk indikator ini 100% sedangkan realisasinya mencapai 100%, sehingga capain kienrja pada indikator ini sebesar 100%.

KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR INI DISEBABKAN KARENA ADANYA UPAYA- UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN NEGERI NGANJUK ANTARA LAIN:

- 1. Hakim mengupayakan perkara tindak pidana ringan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Restoratif justice.
- 2. Hakim melakukan dialog terbuka dan resposnsif antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang terkena dampak untuk mencapai rekonsiliasi.
- 3. Apabila terdapat tindak pidana anak yan diversinya tidak berhasil, Majelis Hakim menggunakan pendekatan Restortif justice dalam penyelesaian perkaranya.

4. Meningkatkan kapabilitas Hakim dalam penanganan perkara yang dapat diselesaikan melalui Restoratif justice melalui Diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilum.

3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Analisis Capaian Kinerja

Untuk perkara perdata, dari 286 perkara yang diputus, yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 275 perkara, sedangkan untuk perkara pidana, dari 283 perkara pidana yang putus, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 258 perkara.

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata adalah 569 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 533. Target pada indikator ini adalah 80%, sedangkan realisasinya adalah 93,67 %, sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 117,9%.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	93,67%	117,9%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023-2024

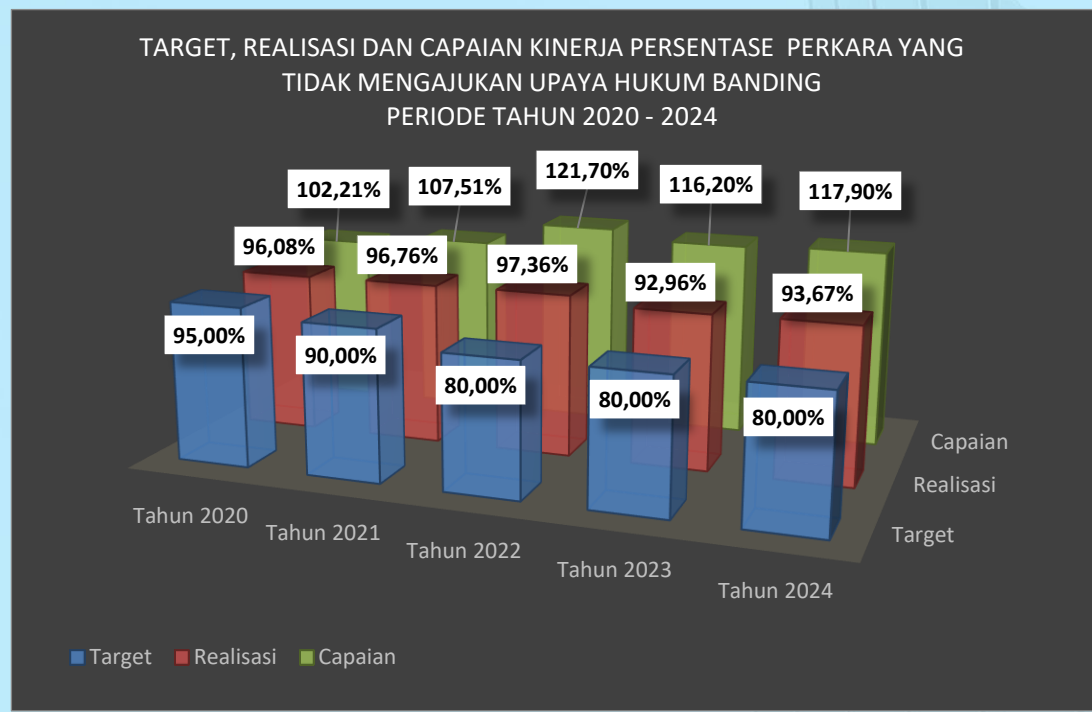
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	92,96%	116,2%	80%	93,67%	117,9%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
2024	569	533	80%	93,67%	117,9%
2023	469	436	80%	92,96%	116,2%
2022	682	664	80%	97,36%	121,70%
2021	573	557	90%	96,76%	107,51%
2020	562	540	94%	96,08%	102,21%

Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2020-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dari tahun 2020 sampai dengan 2024, terdapat penurunan capain kinerja pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalai kenaikan sebesar 1,7 % namun tidak lebih besar dari capaian kinerja pada tahun 2022.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding cukup signifikan yaitu dari 569 perkara pidana dan perdata yang putus, sejumlah 42 perkara menyatakan banding . Namun jika dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk cukup tinggi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk antara lain:

1. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Nganjuk mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial.
2. Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain.
3. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menghimbau untuk memaksimalkan keberhasilan upaya mediasi khususnya dalam penyelesaian perkara Perdata.

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah PerkaraYang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

X100%

Analisis Capaian Kinerja

Untuk perkara perdata, dari 286 perkara yang diputus, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 280 perkara. Untuk perkara pidana, dari 283 perkara pidana yang putus, 264 perkara menyatakan kasasi.

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata adalah 569 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 544. Target pada indikator ini adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 95,61 %, sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 106,23%.

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	95,61%	106,23%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasai Tahun 2023-2024

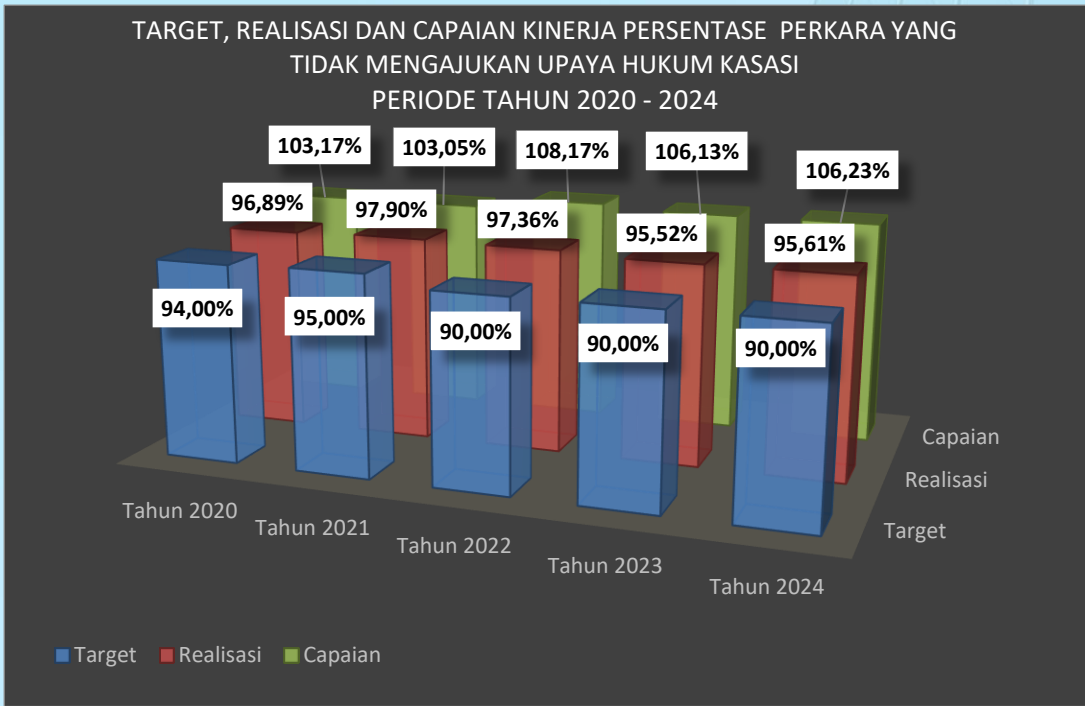
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	95,52%	106,13%	90%	95,61%	106,23%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	569	544	90%	95,61%	106,23%
2023	469	448	90%	95,52%	106,13%
2022	682	664	90%	97,36%	108,17%
2021	573	563	95%	97,90%	103,05%
2020	562	547	94%	96,98%	103,17%

Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024



Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa rata-rata persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,04%, sedangkan pada tahun 2024 persentase capaian kinerjanya hampir sama dengan tahun 2023.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, dimana dari 569 perkara yang diputus, terdapat 25 perkara yang mengajukan paya hukum kasasi, Namun jika dilihat secara keseluruhan dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk cukup tinggi.

Upaya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan persentase perkara tidak mengupayakan upaya hukum adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Nganjuk mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial.
- 2. Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain.
- 3. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menghimbau untuk memaksimalkan keberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian perkara Perdata.

5. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi.

Indikator kinerja persentase perkara anak yang diseleaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.

Penanganan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan Formulasi sebagai berikut:

Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Sepanjang tahun 2024, perkara pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 14 perkara. Dari 14 perkara pidana anak tersebut tidak terdapat perkara yang diajukan diversi karena ancaman hukumannya diatas 7 tahun, jadi realisasi untuk tahun 2024 adalah 0%

Target tahun 2024 untuk penyelesaian perkara anak melalui diversi adalah 10% sedangkan realisasinya adalah 0% sehingga capaian kinerja tahun 2024 adalah 0%.

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Diversi Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara anak yang diselesaikan diversi	10%	--NA--	--NA--

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Diversi Tahun 2023-2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara anak yang diselesaikan diversi	70%	100%	142,86 %	10%	--NA--	--NA--

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi antara tahun 2020-2024 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah perkara diversi	Jumlah Perkara Diversi Dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
2024	14	0	0	10%	--NA--	--NA--
2023	9	1	1	70%	100%	142,86%
2022	18	1	1	70%	100%	142,86%
2021	16	0	0	15%	0%	0%
2020	13	2	2	10%	15,38%	153,8%

Grafik 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020-2024



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dari tahun 2020 sampai dengan 2024, apabila dilihat dari jumlah perkara anak yang dapat didiversi cenderung kecil atau tidak ada sama sekali dan Pada tahun 2024 tidak terdapat perkara pidana anak yang diajukan dengan diversi, berbeda dengan tahun 2023 terdapat 1 perkara pidana anak yang diajukan melalui diversi.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Hal - Hal yang menyebabkan penurunan kinerja pada indikator ini diataranya:

1. Penyelesaian perkara diversi telah dilaksanakan di tingkat penyidikan maupun penuntutan.
2. Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk penyelesaian perkara dengan diversi adalah sebagai berikut:

1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi.
2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.

6. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Indikator Kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan perhitungannya disesuaikan dengan PERMENPAN no. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi internal harus > 80.

Analisis Capaian Kinerja

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.18. Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	Peroide	Jumlah Responden	Hasil Survei	Keterangan
1.	Triwulan I (Januari-Maret)	127	96,06%	Sangat Baik
2.	Triwulan II (April - Juni)	115	94,08%	Sangat Baik
3.	Triwulan III (Juli - September)	79	96,94%	Sangat Baik
4.	Triwulan IV (Oktober-Desember)	72	94,02%	Sangat Baik
Rata- Rata			95,28%	Sangat Baik

Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2024 adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 95,28% sehingga Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 105,87%,

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	95,28%	105,87%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023-2024

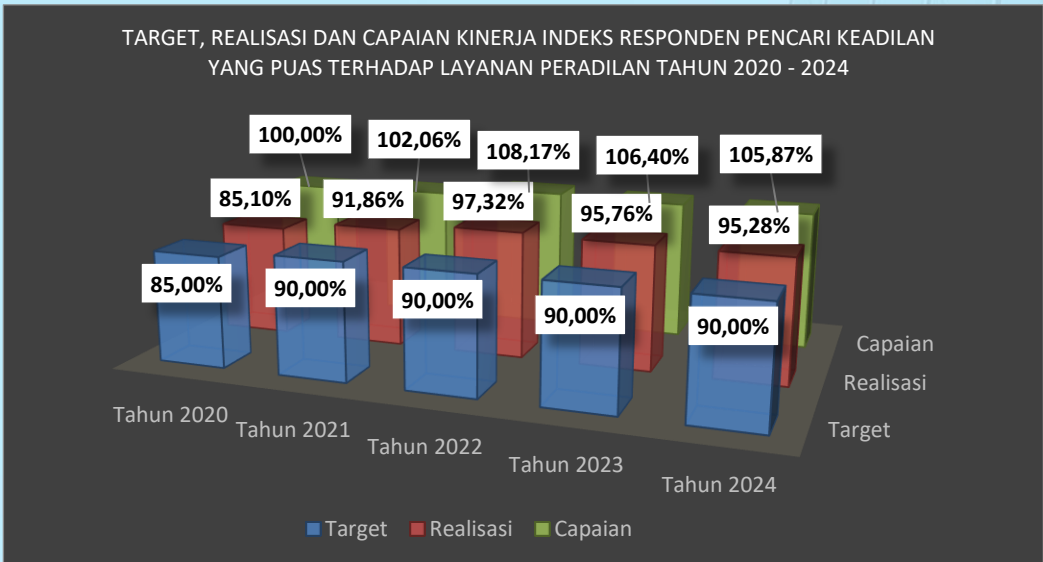
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	95,76%	106,4%	90%	95,28%	105,87%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan periode tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.21.Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	95,28%	105,87%
2023	90%	95,76%	106,4%,
2022	90%	97,32%	108,17%,
2021	90%	91,86%	102,06%
2020	85%	85,10%	100%

Grafik 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024



Grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya persentase indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, hasil survey Kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2024 berkategori SANGAT BAIK.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Upaya – Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan peradilan maupun pelayanan PTSP diantaranya:

- 1. Memberikan pelatihan bagi petugas PTSP tentang pelayanan prima, bekerjasama dengan Bank BTN.

- 2. Menyediakan petugas pada pojok e-court untuk melayani pihak yang berperkara melalui e-court.
- 3. Menyediakan mesin EDC pada kasir untuk pembayaran perkara perdata.
- 4. Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang waktu layanan dan jenis layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk
- 5. Menyediakan kompensasi pelayana bagi pengguna pengadilan apabila layana yang diberikan pada PTSP tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan.
- 6. Pemenuhan sarana dan prasarana penyanggand difabel.
- 7. Menyediakan ruang tunggu PTSP yang nyaman bagi pengunjung.

Sasaran Startegis 2 : Peningkatan Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase salinan putusan yang sampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	11,90%	119%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				115,06%

Analisis Sasaran Strategis II

1. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase salinan putusan yang sampaikan kepara pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.

Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2011 yaitu paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi
Dan Dikirim Tepat Waktu

Jumlah Putusan

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, dari 569 perkara pidana dan perkara perdata yang putus, salinan putusannya semuanya telah dikirimkan tepat waktu, sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%.

Target kinerja pada indikator persetae salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak adalah 90%, sedangkan realisasinya dalah 100%, ini berarti capain kinerja indikator ini adalah sebesar 111,11%.

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang di sampaikan ke pada pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2023 - 2024

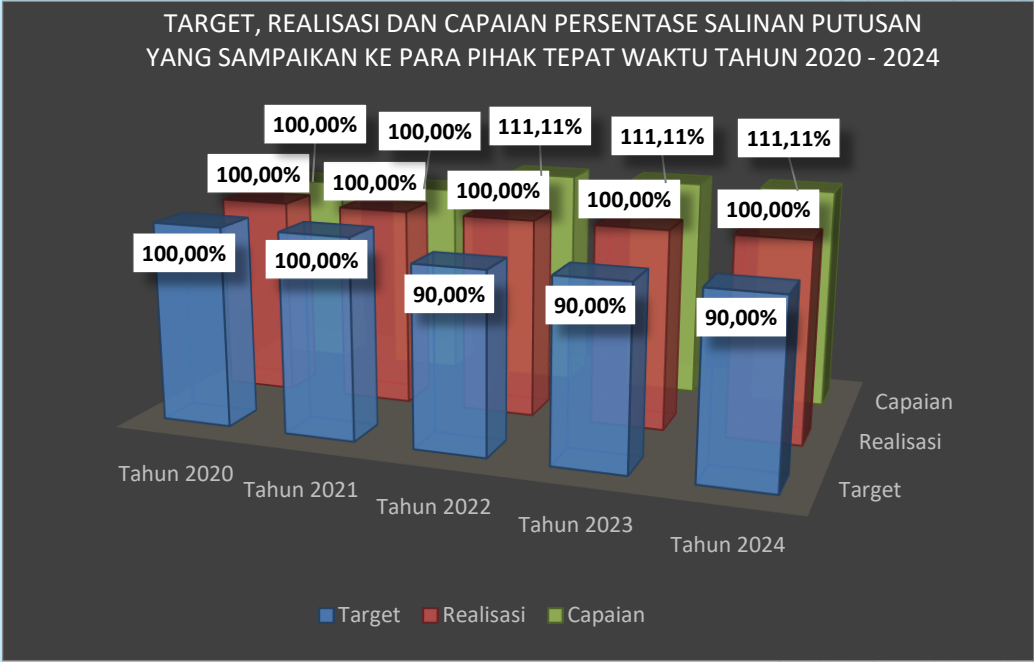
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang di sampaikan ke pada pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%	90%	100%	111,11%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu periode tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Periode Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	286	286	90%	100%	111,11%
	Pidana	283	283	90%	100%	111,11%
2023	Perdata	214	214	90%	100%	111,11%
	Pidana	255	255	90%	100%	111,11%
2022	Perdata	298	298	90%	100%	111,11%
	Pidana	384	384	90%	100%	111,11%
2021	Perdata	239	239	100%	100%	100%
	Pidana	334	334	100%	100%	100%
2020	Perdata	184	184	100%	100%	100%
	Pidana	375	375	100%	100%	100%

Grafik. 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Sampai ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024, persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Nganjuk dalam pengiriman salinan putusan tidak dapat diragukan lagi.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk antara lain:

1. Pengiriman salinan putusan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan melalui surat tercatat sehingga segera terkirim.
2. Penitera Muda melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengiriman salinan putusan.
3. Untuk perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera menginput salinan putusan pada e-court.

- 4. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk segera memverifikasi salinan putusan yang telah diinput oleh Panitera Pengganti pada e-court.
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk memerintahkan Panitera Muda Pidana untuk menggandakan salinan putusan Perkara Pidana yang telah diminutasi.

2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Prosedur mediasi di Pengadilan mengacu pada Perma nomor 1 Tahun 2016.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah PerkaraYang Diselesaikan Melalui
Mediasi Berhasil

Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah 70 perkara, 2 perkara berhasil mediasi, 37 perkara tidak berhasil mediasi, 3 perkara tidak dapat dilaksanakan dan 28 perkara mediasi masih berjalan. Dari 42 perkara yang telah selesai dilaksanakan mediasi, 2 perkara perkara perdata yang dilakukan mediasi, 2 diantaranya berhasil, sedangkan 3 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil, sehingga jumlah mediasi berhasil sebanyak 5 perkara.

Target untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 10%, sedangkan realisasinya adalah sebesar 11,90%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 119%.

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	11,9%	119%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	9%	128,57%	10%	11,9%	119%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.27. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 -2024

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	42	5	10%	11,9%	119%
2023	33	3	7%	9%	128,57%
2022	35	5	7%	14,29%	204,14%
2021	39	4	10%	10,25%	100%
2020	45	8	15%	17,78%	118,53%

Grafik 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 - 2024



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa secara umum realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun ke tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung kecil, dilihat dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor- faktor yang kecilnya tingkat penyelesaian mediasi diantaranya:

- 1. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- 2. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada pendapatan yang mereka peroleh dari klien.
- 3. Kurangnya pemahaman dari para pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Negeri Nganjuk tetap melakukan upaya untuk penyelesaian perkara melalui mediasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi diantaranya:

- 1. Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.
- 2. Hakim mediator mengupayakan agar perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Nganjuk dapat diselesaikan melalui jalan mediasi.

Sasaran Startegis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28. Capaian Target Knerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%	--NA--	--NA--
3.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				33,33%

Analisis Sasaran Strategis III

1. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

Indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesiakan dengan jumlah perkara yang daijukan secara prodeo.Penyelesaian perkara secara prodeo diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) perkara prodeo yang didaftarkan nanun sampai dengan akhir tahun 2024, perkara tersebut masih dalam proses persidangan, sehingga persentase realisasi pada indikator ini adalah 0%.

Target untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah sebesar 0%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0%.

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	0%	0%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2023 - 2024

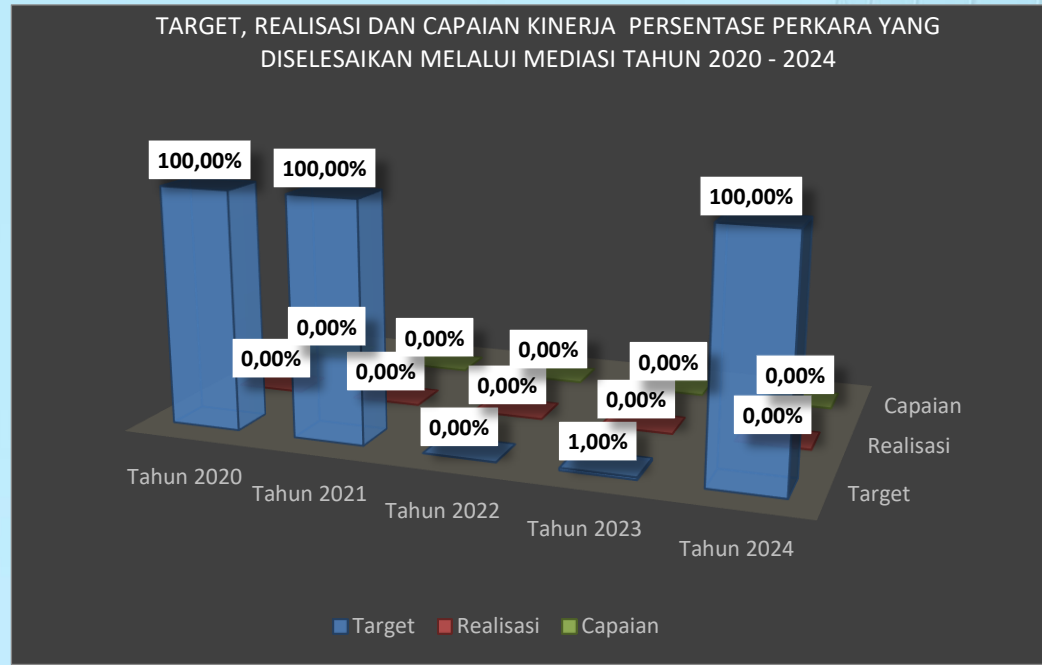
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	1%	--NA--	--NA--	100%	0%	0%

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.31. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2020 -2024

Tahun	Jumlah Perkara prodeo	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2024	1	0	100%	0%	0%
2023	0	0	1%	--NA--	--NA--
2022	0	0	0%	--NA--	--NA--
2021	0	0	100%	--NA--	--NA--
2020	0	0	100%	--NA--	--NA--

Grafik 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2020-2024



Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2024 realisasi dan capaian kinerja pada indikator ini adalah 0%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan anggaran untuk penyelesaian perkara prodeo dan terdapat 1 (satu) pendaftaran perkara prodeo, namun perkara tersebut sampai dengan akhir tahun masih dalam proses persidangan.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Hal – hal yang menyebabkan adalah perkara tersebut didaftarkan pada akhir tahun anggaran sehingga sampai dengan akhir tahun perkara tersebut masih berjalan.

Upaya – Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan perkara prodeo adalah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pem.Kab. Kabupaten Nganjuk, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal sosialisasi tentang penanganan perkara prodeo.
2. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo.

2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Berdasarkan SE Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 202 tentang pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, Sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana, seperti, permohonan ganti nama, izin menikah, anak angkat, akta kelahiran terlambat, perbailakn kesalahan dalam akta kelahiran.

Dengan Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, tidak terdapat perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, jadi untuk realisasi tahun ini adalah 0%.

Target pada indikator ini adalah 0%, sedangkan realisainya 0 %, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah sebesar 0%.

Tabel 3.32. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	1%	--NA--	--NA--

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2023 - 2024

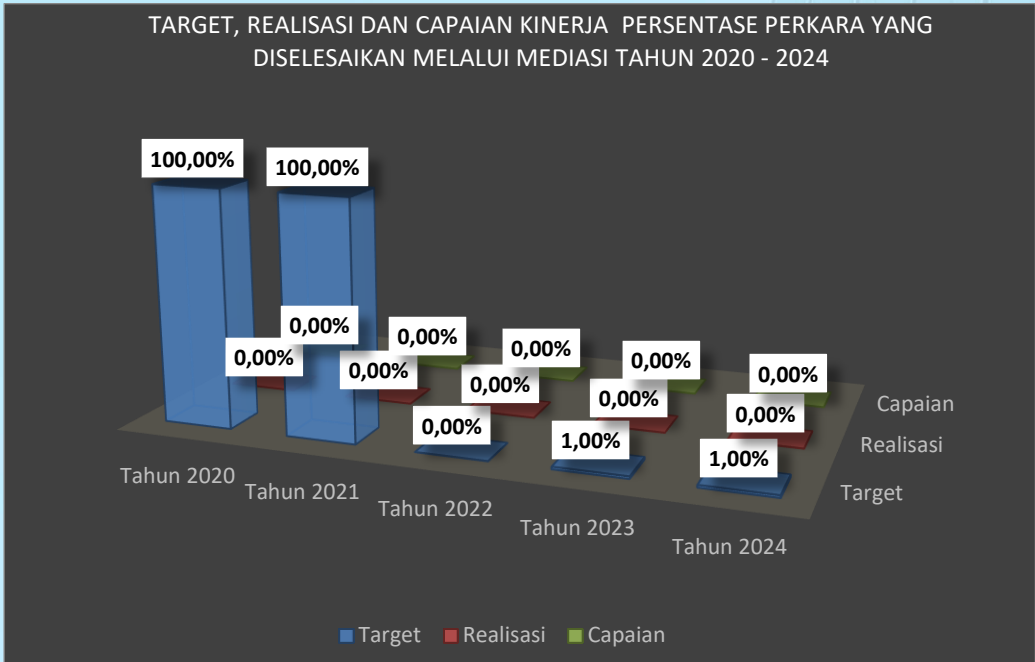
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	1%	--NA--	--NA--	1%	--NA--	--NA--

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan yang diselesaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.34. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2020 -2024

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2024	0	0	1%	--NA--	--NA--
2023	0	0	1%	--NA--	--NA--
2022	0	0	0%	--NA--	--NA--
2021	0	0	100%	--NA--	--NA--
2020	0	0	100%	--NA--	--NA--

Grafik 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sama, yaitu 0%.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya indikator ini dikarenakan hal – hal sebagai berikut:

- 1. Persidangan perdata dilakukan secara e litigasi.
- 2. Tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri Nganjuk untuk proses penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan.

Untuk meningkatkan perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan untuk Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan upaya antara lain :

1. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
2. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pem.Kab. Nganjuk, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal penyediaan tempat yang dapat dijangkau baik oleh Pemohon maupun Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk.
3. Memaksimalkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal sosialisasi tentang penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Permohonan layanan hukum. Pelaksanaan Posbakum di pengadilan diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Dengan Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah 240 orang, sedangkan jumlah permohonan layanan hukum yang diajukan pada posbakum adalah 240 orang, sehingga realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100 %.

Berikut ini adalah laporan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B:

Tabel 3.35. Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	20 orang
2.	Pebruari	33 orang
3.	Maret	25 orang
4.	April	24 orang
5.	Mei	29 orang
6.	Juni	16 orang
7.	Juli	15 orang
8.	Agustus	16 orang
9.	September	23 orang
10.	Oktober	22 orang
11.	Nopember	21 orang
12.	Desember	22 orang
Jumlah Total		266 orang

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum di targetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 %, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.36. Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2023 - 2024

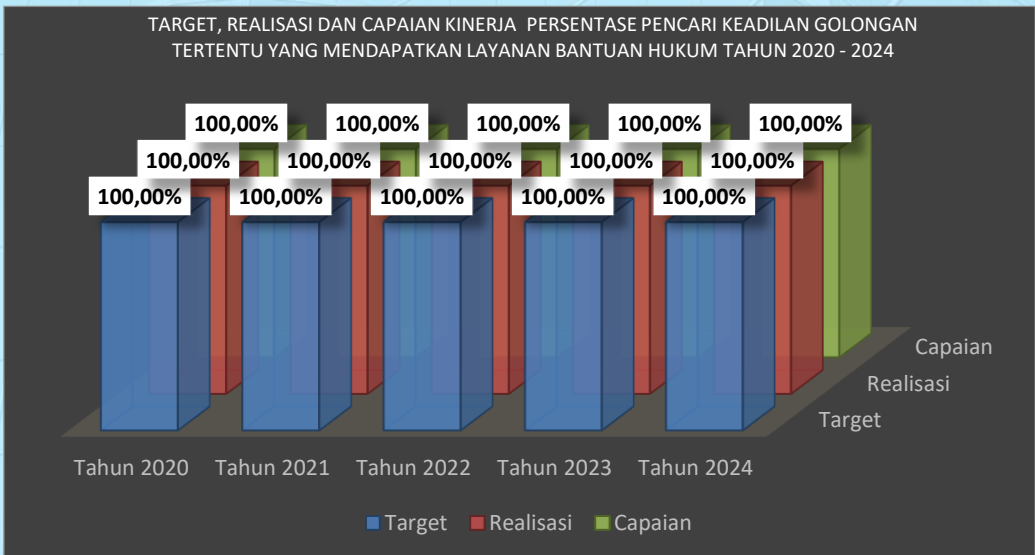
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan target , realisasi dan capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.38. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Gol. Terentu Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2024	266	266	100%	100%	100%
2023	240	240	100%	100%	100%
2022	240	240	100%	100%	100%
2021	242	242	100%	100%	100%
2020	84	84	100%	100%	100%

Grafik 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020-2024



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pos bantuan hukum yaitu diantaranya:
- 1. Pengadilan Negeri Nganjuk telah menanda tangani MOU dengan lembaga bantuan hukum yang terakrediatsi dan emmenuhi syarat untuk melakukan layanan bantuan hukum.
 - 2. Memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan layanan bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu sehingga dapat memaksimalkan pelayanannya.
 - 3. Sosialisasi adanya layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Nganjuk melalui website dan media sosial lainnya.

Sasaran Startegis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 44

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%	78,57%	157,14%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				157,14%

Analisis Sasaran Strategis IV

1. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi).

Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun 2024.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan

Jumlah Permohonan Eksekusi

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, terdapat 7 perkara permohonan eksekusi yang diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk dan perkara permohonan tahun lalu yang masih berjalan dan 7 perkara telah selesai di tindak lanjuti, 4 perkara di cabut. Permohonan eksekusi yang dicabut dianggap sebagai penyelesaian eksekusi.

Target pada indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 50%, sedangkan realisasinya adalah 78,57%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 157,14%.

Tabel 3.40. Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	50%	78,57%	157,14%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Tahun 2023 - 2024

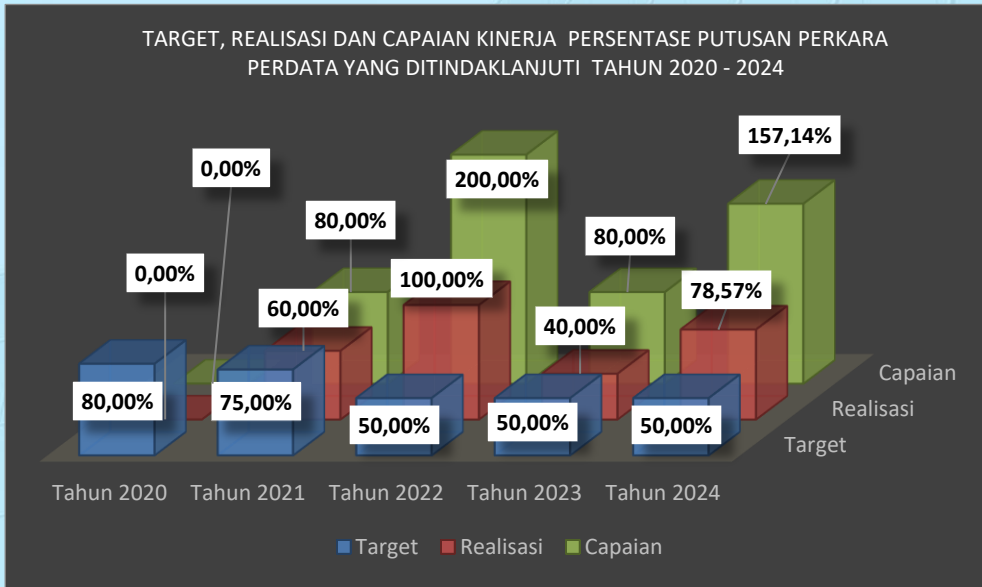
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	50%	40%	80%	50%	78,57%	157,14%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.42. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Jumah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
2024	14	11	50%	78,57%	157,14
2023	10	4	50%	40%	80%
2022	2	2	50%	100%	200%
2021	5	3	75%	60%	80%
2020	4	0	80%	0%	0%

Grafik 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti periode 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, pada tahun 2023 mengalami penurunan dan di tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 77,14%.

Hal ini tidak terlepas dari upaya- upaya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk terus meningkatkan penyelesaian eksekusi, terlebih penyelesaian eksekusi yang telah didaftarkan pada tahun- tahun sebelumnya.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- Upaya - upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi adalah:
- 1. Aktif menanyakan kepada para pihak melalui surat apakah permohonan eksekusi ditindaklanjuti, di cabut atau ditangguhkan.
 - 2. Mengundang para pihak untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan permohonan eksekusi yang diajukan apakah pihak serius dengan permohonannya.
 - 3. Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

Sasaran Startegis 5 : Mewujudkan Manajemen SDM Yang Profesional Dan Berkesinambungan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	90%	90%	100%
2.	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%	100%	125%
3.	Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
4.	Persentase pengsulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				106,25%

Analisis Sasaran Strategis V

1. Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial.

Indikator Kinerja Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial adalah perbandingan antara jumlah pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial dengan jumlah pemangku jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Standart kompetensi jabatan manajerial dilihat dari pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh personil yang telah menduduki jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Jabatan Manajerial di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah:

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Panitera.
- d. Sekretaris.
- e. Panitera Muda Pidana.
- f. Panitera Muda Perdata.
- g. Panitera Muda Hukum .
- h. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.
- j. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Standart
Kompetensi Jabatan Manajerial

Jumlah Pemangku Jabatan

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Berikut data Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan standart kompetensi jabatan yang dimiliki:

Tabel. 3.32. Daftar Nama Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan Manajerial

No.	Nama	Jabatan	Diklat Manajerial Yang Pernah diikuti	Tahun Pelaksanaan Diklat
1.	Jamuji, SH	Ketua	Bimtek Hakim	2013
2.	Warsito, SH	Wakil Ketua	Diklat Pimpinan Pengadilan	2018
3.	Fachriansyah Noor, SH,	Panitera	Pelatihan teknis Efective leadership	2010
4.	Ari Efendi, SH	Sekretaris	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2020
5.	Agus Prasetyo, SH.	Panmud Perdata	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Peradilan Umum	2020
6.	Rif'an Indra Yudha	Panmud Pidana	Pelatihan singkat Panitera Pengganti	2022
8.	Pujiyati, SH,MH	Panmud Hukum	Bimtek Panitera Pengganti	2015
8.	Ratih Dwi Anggraeni, SE	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2020
9.	Kamiran Sudiadi, SH	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Diklat Pim IV	2015
10.	Ivan Daniel Tentua, SE	Kasubag. Umum Dan Keuangan	-	-

Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial di targetkan 90 %, sedangkan realisasinya adalah 90%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja pada indikator persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.43. Capaian Kinerja Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	90%	90%	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2023 – 2024

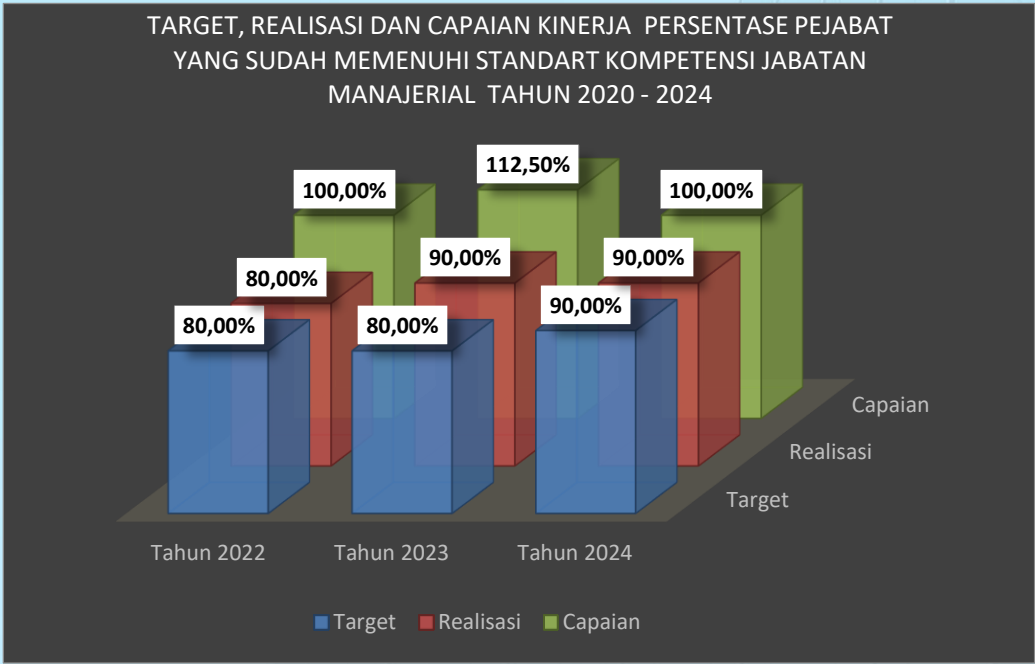
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	80%	90%	112,5%	90%	90%	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial tahun 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Pejabat PN Nganjuk	Jumah Pejabat Yang memenuhi standart Kompetensi Jabatan Manajerial	Target	Realisasi	Capaian
2024	10	9	90%	90%	100%
2023	10	9	80%	90%	112,5%
2022	10	8	80%	80%	100%

Grafik 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2022 – 2024



Perbandingan capaian kinerja pada indikator ini hanya dapat disajikan dari tahun 2022 samai dengan tahun 2024, karena indikator kinerja persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial baru ditargatkan pada tahun 2022.

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator ini pada periode tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,5%.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penurunan pada indikator kinerja ini dikarenakan pada tahun 2024 mengalami perubahan target kinerja dai 80% ke 90%. Namun apabila dilihat dari realisasinya sama.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini adalah:

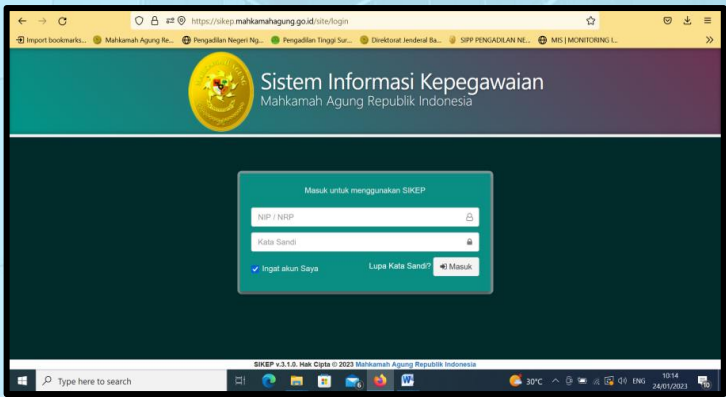
- a. Mengusulkan pelatihan Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan kepada Pusklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Mengusulkan pelatihan PKP/PKA Bagi pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial kepada Pusklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI.

2. Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).

Indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawain dapat dilihat pada aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Nganjuk dengan alamat website sikep.mahkamahagung.go.id

Gambar 3.1. Aplikasi SIKEP



Apabila dilihat dari monitoring kepegawaian dari aplikasi SIKEP tahun 2024, baik pada monitoring kelengkapan data maupun kelengkapan e-doc, kelengkapan data SIKEP Pengadilan Negeri Nganjuk menunjukkan angka 100%.

Gambar 3.2. Monitoring Kelengkapan Data SIKEP

MONITORING KELENGKAPAN DATA SIKEP														TOTAL 1 ITEM.
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	CPNS	PNS	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN	TOTAL	(-) CPNS	(-) PNS	(-) PANGKAT	(-) JABATAN	(-) PENDIDIKAN	
1	098242 - Pengadilan Negeri Nganjuk	47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	

Gambar 3.3. Monitoring Kelengkapan E-DOC SIKEP

MONITORING KELENGKAPAN E-DOC SIKEP														TOTAL 1 ITEM.
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	CPNS	PNS	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN	TOTAL	(-) CPNS	(-) PNS	(-) PANGKAT	(-) JABATAN	(-) PENDIDIKAN	
1	098242 - Pengadilan Negeri Nganjuk	47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	

Capaian Kinerja pada indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.46. Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	80%	100%	125%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2023 – 2024

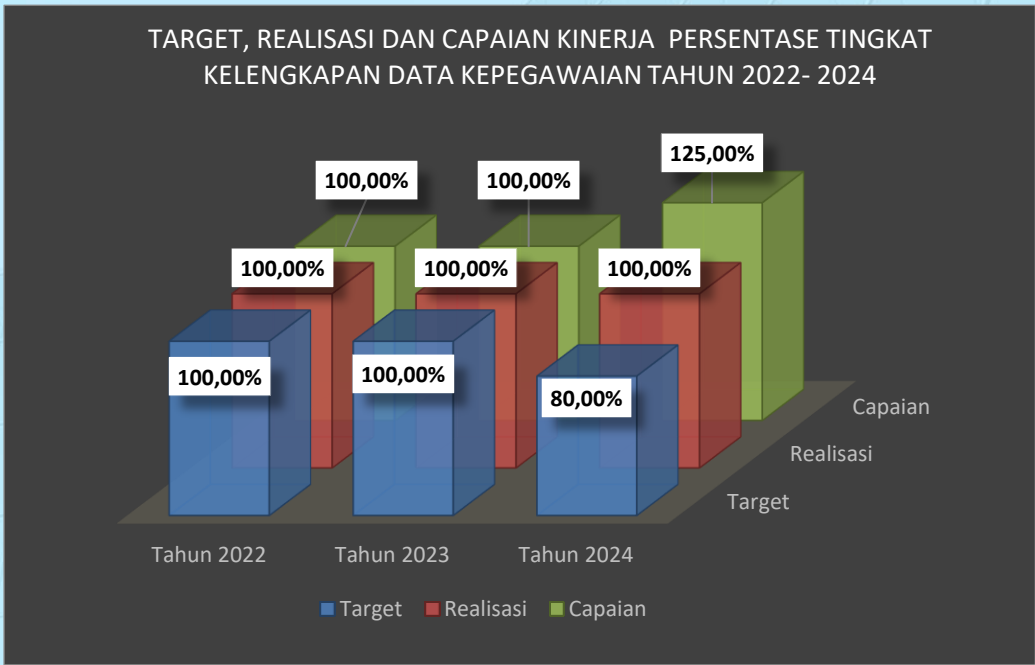
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	100%	100%	100%	80%	100%	125%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase tingkat kelengkapan kepagawaain tahun 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.48 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Pegawai	Target	Realisasi	Capaian
2024	47	80%	100%	125%
2023	48	100%	100%	100%
2022	37	100%	100%	100%

Grafik 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2022 – 2024



Perbandingan capaian kinerja pada indikator ini hanya dapat disajikan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, karena indikator kinerja persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian baru ditargetkan pada tahun 2022.

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator ini pada periode tahun 2022 sampai dengan 2023 sama yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 25%, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 mengalami perubahan target kinerja. Namun apabila dilihat dari realisasinya sama, yaitu sebesar 100%.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja kelengkapan data kepegawaian pada Pengadilan Negeri Nganjuk sangat baik, hal ini tidak terlepas dari upaya - upaya yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1. Melakukan update data apabila terdapat perubahan data pada pegawai.
- 2. Melakukan monitoring terhadap kelengkapan data pada aplikasi SIKEP.

3. Persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu.

Indikator Kinerja persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai yang mendapat hak kenaikan pangkat pada tahun 2024 dengan pegawai yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu. Pengusulan kenaikan pangkat (KP) pegawai dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan. Kenaikan Pangkat pegawai terjadi pada 6 (enam) periode yaitu pada bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat tepat Waktu

Jumlah Pegawai yang naik Pangkat

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, jumlah pegawai yang naik pangkat sebanyak 9 orang pegawai dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.49. Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Jamuji, SH,MH.	Ketua	TMT 1 April 2024
2.	Adiyaksa David Pradipta, SH, MH.	Hakim	TMT 1 Oktober 2024
3.	Feri Deiansyah, SH.	Hakim	TMT 1 Oktober 2024
4.	Fachriansyah Noor, SH.	Panitera	TMT 1 Agustus 2024
5.	Muhammad Khudlori Sahlan, SH.	Panitera Pengganti	TMT 1 April 2024
6.	Siti Asmaul Husna, SH.	Panitera Pengganti	TMT 1 April 2024
7.	Ely Dyan Prasetyowati, SE.	Jurusita Pengganti	TMT 1 Oktober 2024
8.	Lily faradina, SH.	Analisis Terkara Peradilan	TMT 1 Desember 2024
9.	Laudia Vallentine Aphrodita Agni, A.Md	Pengelola Penanganan perkara	TMT 1 Desember 2024

Dari 9 (sembilan) pegawai yang naik pangkat pada tahun 2024, semuanya telah mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu ditargetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%.

Capaian Kinerja pada indikator persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.50. Persentase Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.51. Perbandingan Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2023 – 2024

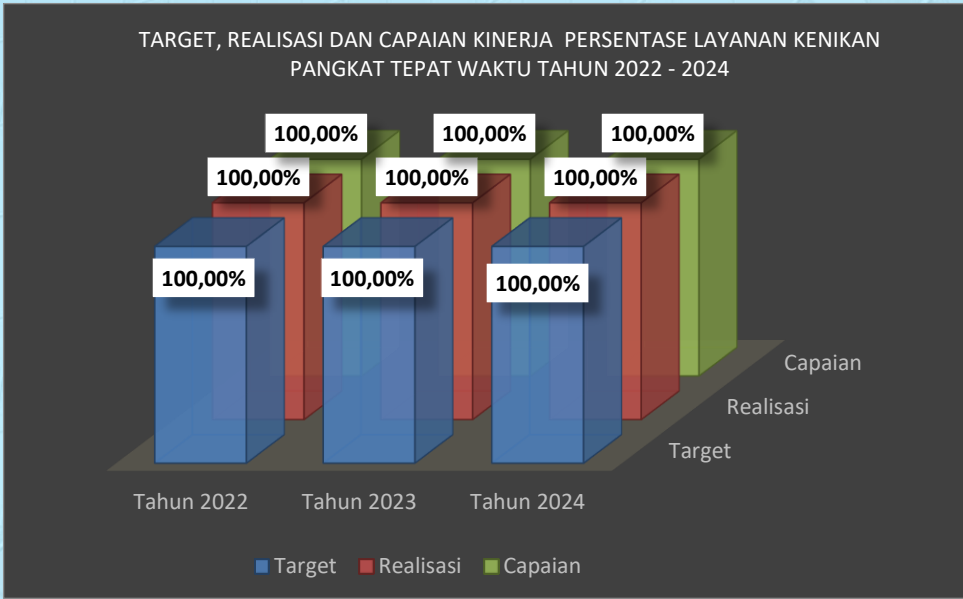
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu tahun 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.52 Perbandingan Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Naik Pangkat	Jumlah Layanan kenaikan pangkat Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	9	9	100%	100%	100%
2023	6	6	100%	100%	100%
2022	7	7	100%	100%	100%

Grafik 3.16. Perbadingan Capaian Kinerja Persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2024



Perbandingan target kinerja hanya disajikan untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 karena target kinerja indikator ini di tetapkan mulai tahun 2022. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kenaikan pangkat yang di lakukan oleh Sub Bagain Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Nganjuk dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak ada keterlambatan dalam layanan kenaikan pangkat pegawai.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA INI TIDAK TERLEPAS DARI UPAYA PENGADILAN NEGERI NGANJUK YAITU SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Melakukan pengusulan kenaikan pangkat secara tepat waktu ke Pengadilan Tinggi Surabaya.
- 2. Melakukan monitoring kenaikan pangkat, baik pada aplikasi data kepegawaian maupun papan kontrol kenaikan pangkat.
- 3. Melakukan peremajaan data pada aplikasi data kepegawaian.

3. Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu.

Indikator Kinerja persentase layanan pengusulan pensiun tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai pegawai yang pensiun pada tahun 2024 dengan pengawai yang mendapatkan layanan pengusulan pensiun tepat waktu.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pengusulan Pensiun Tepat Waktu

Jumlah Pegawai yang Pensiun

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Daftar nama pegawai yang pensiun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.53. Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1.	Mujiono	Panitera Muda Pidana	1 Januari 2024
2.	Jianto, SH.	Panitera Pengganti	12 Februari 2024

Pegawai atas nama Jianto, SH pengajuan usul pensiun dilakukan karena yang bersangkutan meninggal dunia.

Dari 2 (dua) pegawai yang pensiun pada tahun 2024, semuanya telah diusulkan tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase pengusulan pensiun tepat waktu ditargetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2043 sebesar 100 %.

Capaian Kinerja pada indikator persentase pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.54. Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2023 – 2024

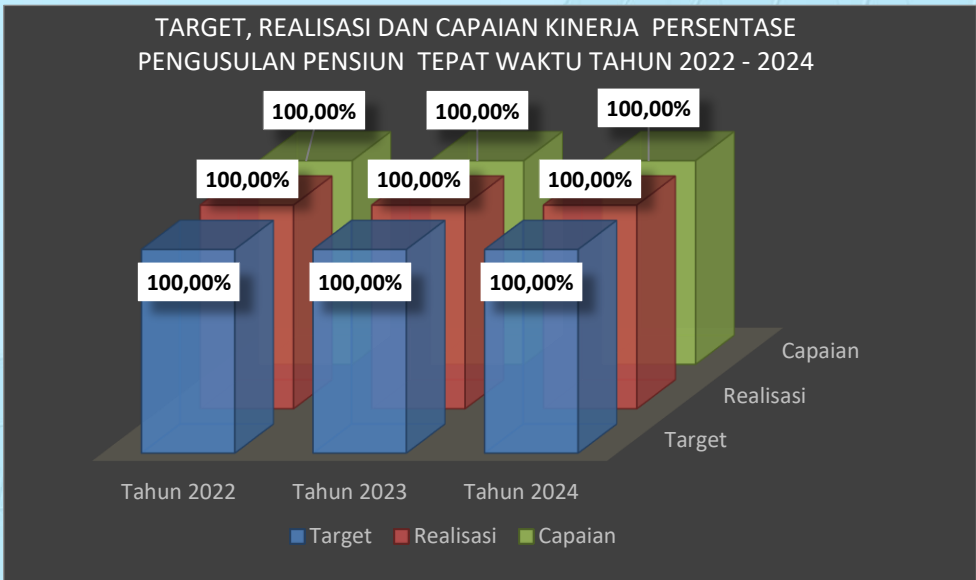
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.56 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Diusulkan Pensiun	Jumlah Usulan Pensiun Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	2	2	100%	100%	100%
2023	3	3	100%	100%	100%
2022	6	6	100%	100%	100%

Grafik. 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan 2024 semua pegawai yang akan pensiun diusulkan secara tepat waktu dan tidak ada keterlambatan dalam pengusulan pensiun. Pengukuran capaian kinerja persentase pengusulan pensiun tepat waktu dilakukan pada tahun 2022 samapi dengan 2024 karena target kinerja pada indikator dimulai pada tahun 2022.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA INI TIDAK TERLEPAS DARI UPAYA PENGADILAN NEGERI NGANJUK YAITU SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Melakukan pengusulan pensiun secara tepat waktu yaitu 1 (satu) tahun sebelum TMT pensiun pegawai yang bersangkutan.
- 2. Melakukan monitoring usulan pensiun, baik pada aplikasi data kepegawaian maupun papan kontrol kenaikan pangkat.
- 3. Melakukan peremajaan data pada aplikasi data kepegawaian.

Sasaran Startegis 6 : Mewujudkan Regulasi Dan Tata Kelola Yang Baik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Nilai LKJiP minimal BB	BB	BB	100%
2.	Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	WBK	-	0%
3.	Nilai IPK	90%	95,28%	105,87%
4.	Nilai IKM	90%	98,94%	109,93%
5.	Predikat AMPUH	Unggul	-	0%
6.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%
7.	Persentase realisasi anggaran belanja	95%	95,62%	100,65%
8.	Persentase pelaporan LHKPN /LHK ASN tepat waktu	95%	100%	105,26%
9.	Persentase nilai kinerja anggaran	90%	99,18%	110,2%
10.	Persentase kedisiplinan masuk kerja	95%	97,92%	103,07%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				83,50%

Analisis Sasaran Strategis VI

1. Nilai LKJiP Minimal “ BB”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap laporan SAKIP dan kemudian dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dilakukan evaluasi.

Analisis Capaian Kinerja

Hasil dari Evaluasi SAKIP 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan nilai 73,6(BB).

Target kinerja pada indikator ini adalah nilai sakip BB sedangkan realisasinya adalah BB, sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%

Capaian target kinerja Nilai LKJiP minimal BB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.58. Capaian Kinerja Nilai LKJiP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai LKJiP minimal “BB”	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.59. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai LKJIP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2023 – 2024

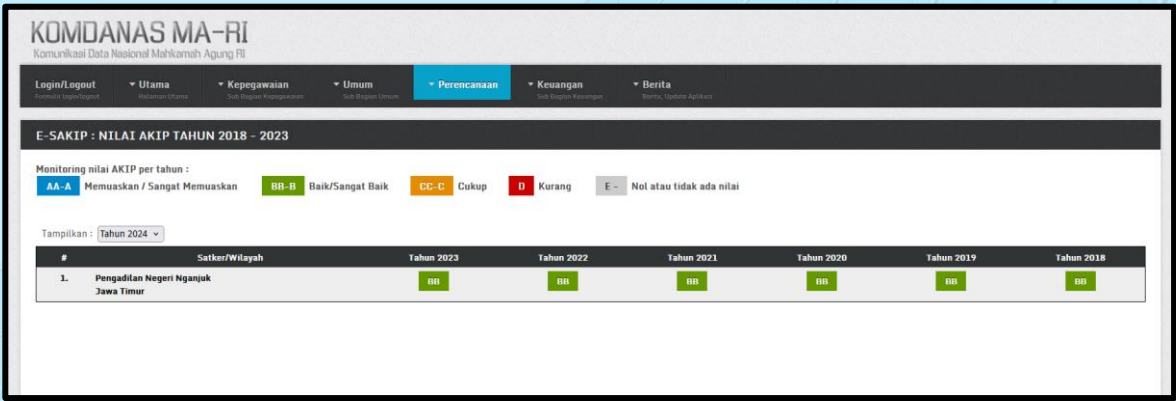
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai LKJIP miniman “BB”	BB	BB	100%	BB	BB	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja nilai LKJIP minimal BB tahun 2024 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.60 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai LKjIP Tahun 2022-2024

Tahun	Nilai LKJIP Pengadilan Negeri Nganjuk	Target	Realisasi	Capaian
2024	BB	BB	BB	100%
2023	BB	BB	BB	100%
2022	BB	BB	BB	100%

Gambar 3.4. Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas



Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai AKIP Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

UNTUK MENINGKATKAN NILAI AKIP PADA TAHUN –TAHUN SELANJUTNYA, UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN NEGERI NGANJUK ADALAH:

1. Mengikutsertakan personil yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti pelatihan atau diklat tentang akuntabilitas kinerja yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Maupn Mahkamah Agung.
2. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.
3. Berkoordinasi dengan seluruh personil di Pengadilan Negeri Nganjuk untuk pembuatan laporan SAKIP.
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan SAKIP sebelum dilaporkan ke Pengadilan Tinggi.

2. Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk mentargetkan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), namun tidak bias tercapai, sehingga realisasi dari indikator ini adalah o.

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Predikat Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61. Capaian Kinerja Predikat Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat Pembangunan Zona Integritas	WBK	-	0%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.62. Perbandingan Capaian Kinerja Predikat Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2023 – 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Predikat Pembangunan Zona Integritas	WBK	-	0%	WBK	-	0%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Predikat Pembangunan ZI tahun 2024 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.63 Perbandingan Capaian Kinerja Predikat Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	WBK	-	0%
2023	WBK	-	0%
2022	WBK	-	0%

Pengukuran capaian kinerja Predikat Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diukur dari tahun 2022 karena target dari indikator tersebut di tetapkan mulai tahun 2022.

Dari hasil capaian tahun 2022 sampai dengan tahun tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini belum mencapai target.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Ketidakberhasilan capaian kinerja pada indikator ini disebabkan karena Pengadilan Negeri Nganjuk belum memenuhi syarat untuk diajukan WBK.

BEBERAPA UPAYA YANG DILAKUKAN AGAR PENGADILAN NEGERI NGANJUK BISA MENCAPAI WBK ANTARA LAIN :

1. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan pembangunan ZI yang telah dilakukan satuan kerja.
4. Seluruh aparatur dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dikoordinasi berdasarkan enam area perubahan.
5. Melakukan evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing satker (self assessment) yang kemudian dinilai secara berjenjang dari tingkat tim penilai internal hingga tim penilai nasional.
6. Satuan kerja mampu mengkomunikasikan perubahan yang dilakukannya kepada publik dengan baik, sehingga publik mengetahui perubahan yang sedang terjadi di satuan kerja tersebut.

3. Nilai IPK.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membuat inovasi e-survey untuk mengukur Indeks persepsi anti korupsi dengan menggunakan aplikasi e-Survey Badilum dengan alamat website esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

Terdapat 10 Indikator untuk mengukur indeks persepsi anti korupsi yaitu:

- 1. Manipulasi peraturan.
- 2. Penyalahgunaan jabatan.
- 3. Menjual Pengaruh.
- 4. Transparansi biaya.
- 5. Transaksi rahasia.
- 6. Biaya Tambahan.
- 7. Hadiah.
- 8. Transparansi pembayaran.
- 9. Percaloan.
- 10. Perbuatan curang

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil dari aplikasi e-survey Badilum, Nilai IPK Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.64. Hasil IPK Berdasarkan Aplikasi e- Survey Badilum Tahun 2024

Jangka Waktu	Jumlah Responden	Indeks IPK
Triwulan I (Januari – Maret)	126 Responden	4,00/99,92%
Triwulan II (April – Juni)	87 Responden	4,00/100%
Triwulan III (Juli – September)	72 Responden	4,00/99,97%
Triwulan IV (Oktober – Desember)	77 Responden	3,84/95,88
Nilai Rata- Rata		98,94%

Target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja Nilai IPK adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 98,94%, jadi persentase capaian kinerja untuk indikator nilai IPK telah melampau target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 109,93%.

Capaian Kinerja Indikator Nilai IPK tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.65. Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai IPK	90%	98,94%	109,93%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.66. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2023 – 2024

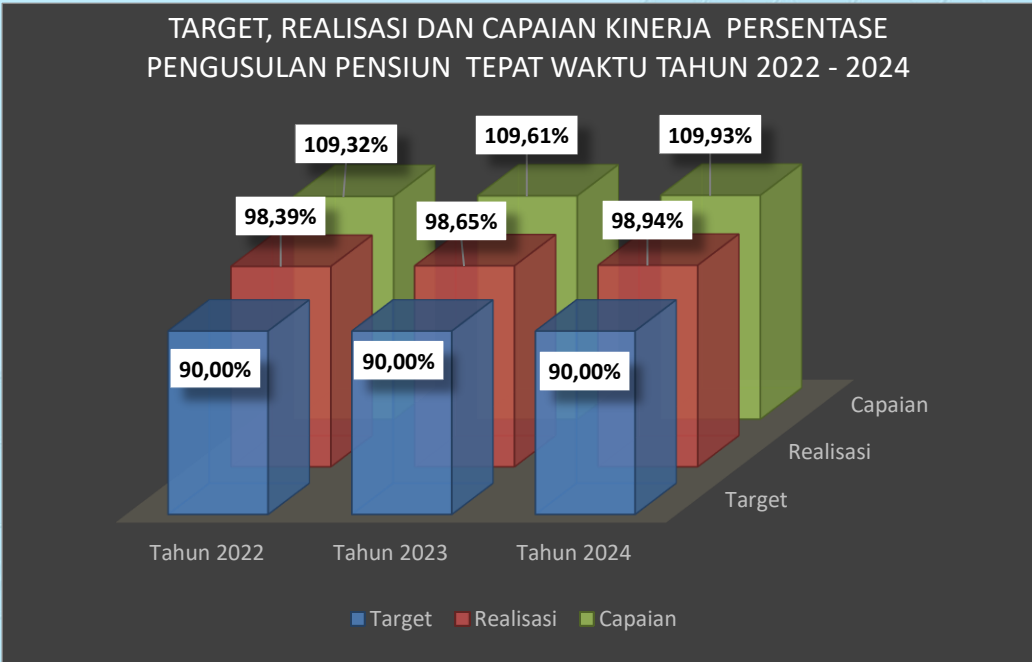
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai IPK	90%	98,65%	109,61%	90%	98,94%	109,93%

Perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja Nilai IPK dari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.67. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2022 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	98,94%	109,93%
2023	90%	98,65%	109,61%
2022	90%	98,39%	109,32%

Grafik 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2022 – 2024



Perhitungan capaian kinerja nilai IPK diukur dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dikarenakan target dari indikator ini ditetapkan mulai dari tahun 2022.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, nilai indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Negeri Nganjuk meningkat, hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perilaku anti korupsi pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk juga semakin tinggi dan Pengadilan Negeri Nganjuk masuk dalam Kategori Bersih dari korupsi.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR INI TIDAK TERLEPAS DARI UPAYA- UPAYA YANG DILAKUKAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK YAIUTU DIATARNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Peningkatan komitmen bersama seluruh pegawai untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk bersih dari Korupsi.
- 2. Adanya transparansi biaya dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan.
- 3. Penerapan persidangan melalui system elektronik yang dapat memangkas biaya serta waktu dalam proses persidangan.
- 4. Penguatan pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Peradilan.
- 5. Peningkatan kepatuhan terhadap kode etik Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Pegawai di Pengadilan Negeri Nganjuk.

7. Nilai IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sekarang menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ruang lingkup pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat adalah

- 1. Persyaratan.
- 2. Prosedur.
- 3. Waktu Pelayanan.

- 4. Biaya/Tarif.
- 5. Produk Spesifikasi Pelayanan.
- 6. Kompetensi Pelaksana.
- 7. Perilaku Pelaksana.
- 8. Sarana dan Prasarana.
- 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Analisis Capaian Kinerja

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.68. Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	Peroide	Jumlah Responden	Hasil Survei	Keterangan
1.	Triwulan I (Januari-Maret)	127	96,06%	Sangat Baik
2.	Triwulan II (April - Juni)	115	94,08%	Sangat Baik
3.	Triwulan III (Juli - September)	79	96,94%	Sangat Baik
4.	Triwulan IV (Oktober-Desember)	72	94,02%	Sangat Baik
Rata- Rata			95,28%	Sangat Baik

Target untuk indikator Nilai IKM tahun 2024 adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 95,28% sehingga Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 105,87%,

Tabel 3.69. Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai IKM	90%	95,28%	105,87%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.70. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2023-2024

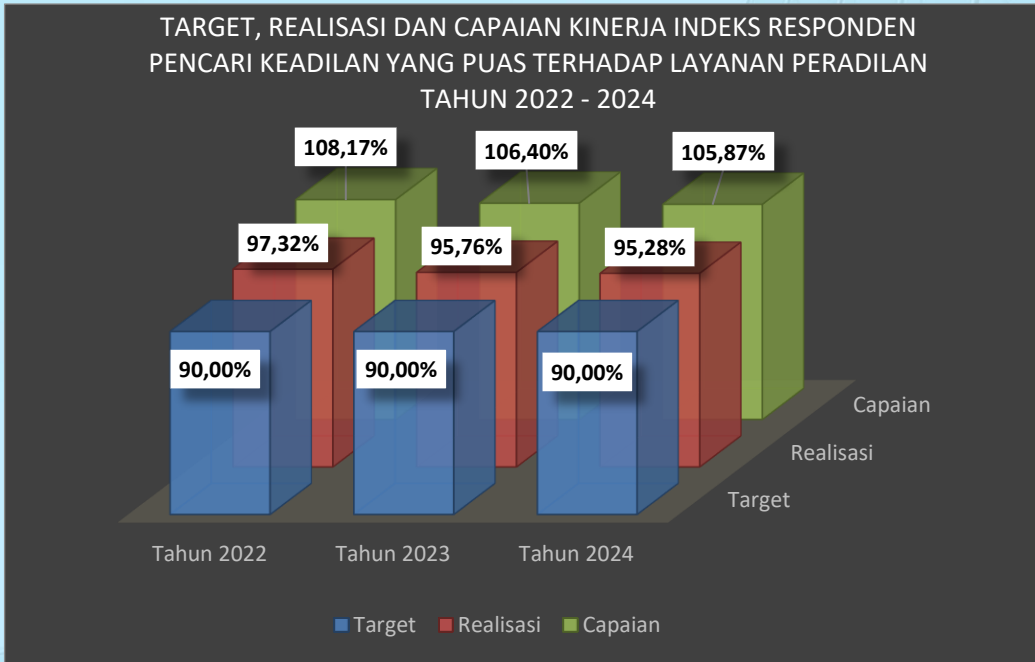
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai IKM	90%	95,76%	106,4%,	90%	95,28%	105,87%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Nilai IKM periode tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.71.Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	95,28%	105,87%
2023	90%	95,76%	106,4%,
2022	90%	97,32%	108,17%,

Grafik 3.19. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2022-2024



Grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya persentase indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, hasil survey Kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2024 berkategori SANGAT BAIK,

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK UNTUK TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BAIK PELAYANAN PERADILAN MAUAPUN PELAYANAN PTSP DIANTARANYA:

1. Memberikan pelatihan bagi petugas PTSP tentang pelayanan prima, bekerjasama dengan Bank BTN.
2. Menyediakan petugas pada pojok e-court untuk melayani pihak yang berperkara melalui e-court.
3. Menyediakan mesin EDC pada kasir untuk pembayaran perkara perdata.
4. Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang waktu layanan dan jenis layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk
5. Menyediakan kompensasi pelayana bagi pengguna pengadilan apabila layana yang diberikan pada PTSP tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana penyandang difabel.
7. Menyediakan ruang tunggu PTSP yang nyaman bagi pengunjung.

8. Predikat AMPUH

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum melalui Keputusan Dirjen Badilum Nomor : 142/DJU/SK.OT.1.6/II/2024 tetang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

Program ini merupakan program lanjutan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. Tujuan dari Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Program tersebut telah diterapkan mulai tahun 2024.

Analisis Capaian Kinerja

Target yang ditetapkan untuk inidkator ini adalah Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan predikat Unggul dari penilaian AMPUH, namun pada tahun ini target tersebut belum tercapai sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2024 untuk indikator ini adalah 0%.

Capaian Kinerja Indikator Predikat Ampuh tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.72. Capaian Kinerja Predikat AMPUH

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat AMPUH	Unggul	-	0%

Target dari indikator predikat AMPUH merupakan target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 pada Reviu Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum melalui Keputusan Dirjen Badilum Nomor : 142/DJU/SK.OT.1.6/II/2024. Jadi perbandingan dengan tahun – tahun sebelumnya tidak dapat disajikan dalam laporan ini.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

UNTUK DAPAT MENCAPAI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN, PENGADILAN NEGERI NGANJUK MELAKUKAN UPAYA- UPAYA SEBAGAI BERIKUT:

1. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai untuk dapat meraih predikat unggul ;
2. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur penilaian seperti dijelaskan pada Pedoman Sertifikasi Peradilan Unggul Dan Tangguh;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses tercapainya program AMPUH.
4. Seluruh aparatur dilibatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Apartur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri.

9. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Indikator kinerja ini mengukur perbandingan antara jumlah PNBP yang diterima dengan PNBP yang disetor ke kas Negara.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah PNBP yang disetor ke kas negara

Jumlah PNBP yang diterima

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, jumlah PNBP yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dari DIPA 01 adalah Rp. 4.799.704,- didapat dari sewa tanah gedung dan bangunan untuk kantin dan rumah dinas, sedangkan untuk DIPA 03 adalah Rp. 32.033.000,- didapat dari pendaftaran perkara, relaas eksekusi, redaksi surat kuasa, salinan putusan dan pendapatan lainnya yang diterima dari perkara.

Dari jumlah PNBP baik DIPA 01 dan 03 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, semua disetor ke kas Negara, jadi realisasi pada indikator ini adalah 100%.

Target yang telah ditetapkan adalah 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada untuk indikator ini adalah 100%.

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.73. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.74. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNB
Tahun 2023-2024

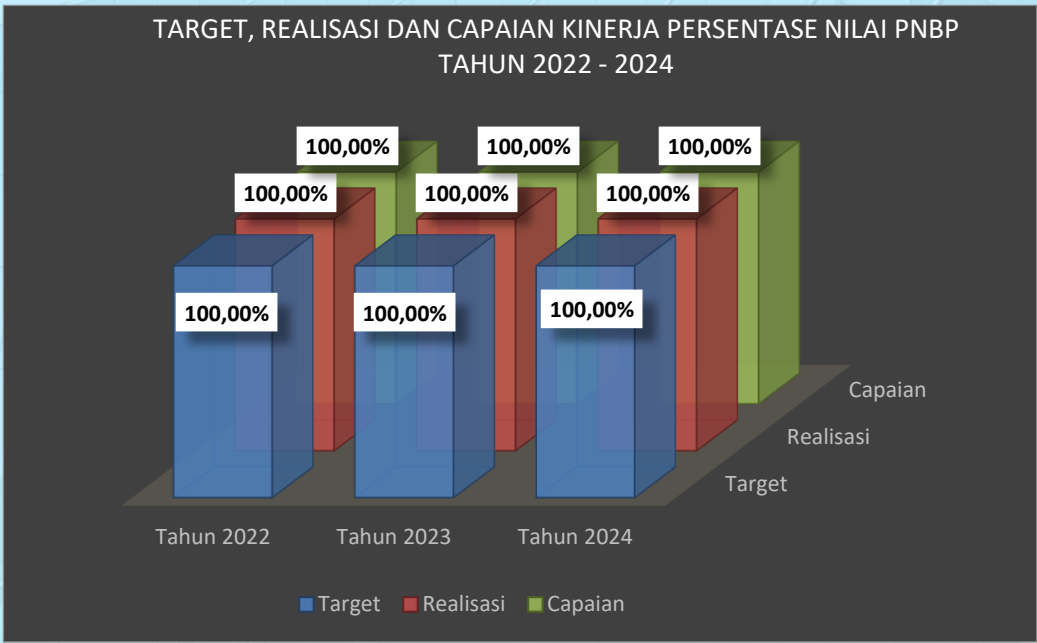
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.75. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNB
Periode Tahun 2022 - 2024

No.	Tahun	PNBP Yang Diterima (Rp)	PNBP Yang Disetor (Rp)	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024					
	DIPA 01	4.799.704	4.799.704	100%	100%	100%
	DIPA 03	32.033.000	32.033.000	100%	100%	100%
2.	2023					
	DIPA 01	5.497.704	5.497.704	100%	100%	100%
	DIPA 03	38.857.000	38.857.000	100%	100%	100%
3.	2022					
	DIPA 01	17.479.132	17.479.132	100%	100%	100%
	DIPA 03	50.690.500	50.690.500	100%	100%	100%

Grafik 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNB
Tahun 2022 - 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Pengadilan Negeri Nganjuk tertib dalam melaksanakan kewajiban untuk penyetoran PNBP ke kas Negara, dimana PNBP yang diterima sama dengan PNBP yang disetorkan ke kas Negara.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja indikator kinerja ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk tertib dalam penyetoran PNBP diantaranya :

- 1. Menetapkan target PNBP berdasarkan realisasi PNBP tahun sebelumnya.
- 2. Melakukan penyetoran PNBP secara tepat waktu.
- 3. Melakukan monitoring realisasi PNBP secara berkala.

10. Persentase Realisasi Anggaran Belanja

Indikator kinerja persentase realisasi anggaran belanja ini mengukur perbandingan antara anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dengan realisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Analisis Capaian Kinerja

Jumlah anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.76. Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2024

DIPA	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen	6.069.107.000	6.596.385.000	6.524.816.116
03	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	142.510.000	140.969.000	130.138.678

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%, untuk DIPA 01 realisasi anggaran mencapai 98,92%, untuk DIPA 03 realisasi anggarannya sebesar 92,32%, jadi realisasi penyerapan anggaran DIPA 01 dan 03 sebesar 95,62%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100,65%.

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.77. Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase realisasi anggaran belanja			
a.	DIPA 01	95%	98,92%	104,13%
b.	DIPA 03	95%	92,32%	97,18%
Rata- Rata		95%	95,62%	100,65%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.78. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 – 2024

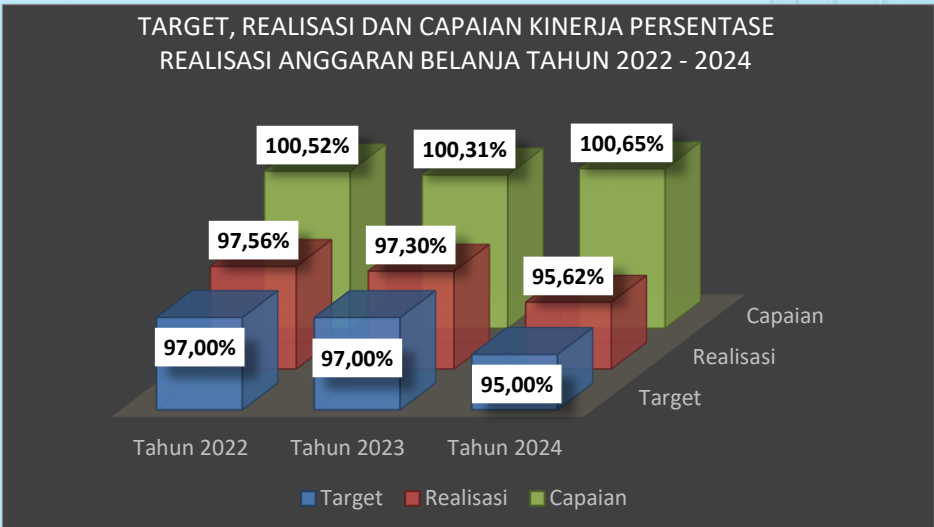
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi anggaran belanja	97%	97,30%	100,31%	95%	95,62%	100,65%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase capaian realisasi anggaran tahun 2022 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.79. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024

Tahun	Kode DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Capaian
2024	01	6.596.385.000	6.524.816.116	95%	98,92%	104,13%
	03	140.969.000	130.138.678	95%	92,32%	97,18%
Rata-Rata				95%	95,62%	100,65%
2023	01	6.346.277.000	6.065.964.437	97%	95,58%	98,54%
	03	123.800.000	122.576.633	97%	99,01%	102,07%
Rata-Rata				97%	97,30%	100,31%
2022	01	6.335.156.000	6.266.202.956	97%	98,91%	101,97%
	03	142.806.000	137.235.000	97%	96,10%	99,07%
Rata-Rata				97%	97,56%	100,52%

Grafik 3.21. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024



Pengukuran capaian kinerja Persentase realisasi anggaran belanja dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024, hal ini dikarenakan terगत kinerja ditetapkan pada tahun 2022.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian realisasi anggaran belanja pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 hampir sama setiap tahunnya.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA PADA IDNIKATOR INI TIDAK TERLEPAS DARI UPAYA - UPAYA YANG DILAKUKAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK UNTUK MENINGKATKAN PENYERAPAN ANGGARAN YAITU SEBAGAI BERIKUT:

1. Melakukan Reviu DIPA secara periodik dan melakukan revisi DIPA jika terdapat perubahan kebijakan/program pada RKA-KL.
2. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
3. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
4. Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

11. Persentase Pelaporan LHKPN /LHK ASN Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu ini mengukur perbandingan antara pegawai yang wajib lapor LHKPN dan LHK ASN dengan pegawai yang lapor tepat waktu. Batas waktu pelaporan LHKPN/LHKASN adalah 31 Maret Tahun berikutnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 2 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) menyatakan bahwa yang sebelumnya ASN dibebankan melaporkan LHKASN maka ditahun 2023 ASN cukup melaporkan SPT Tahunan.

Untuk wajib lapor LHKPN tetap melakukan pelaporan LHKPN. Data wajib Lapor LHKPN adalah Hakim, Pejabat Pengelola Keuangan, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pegawai yang lapor tepat waktu

Jumlah Pegawai Yang Wajib Lapor LHKPN

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator ini adalah sebesar 95%. Dari 22 Pegawai yang wajib lapor LHKPN, semuanya melaporkan tepat waktu, sehingga realisasinya adalah 100%, melebihi target yang ditetapkan. Jadi untuk capaian kinerja indikator persentase pelaporan LHKPN tepat waktu adalah sebesar 105,26%.

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8o Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.81. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase pegawai yang melaksanakan pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.82. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Wajib Lapor LHKPN/LHK ASN	Jumlah Wajib Lapor Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	22	22	95%	100%	105,26%
2.	2023	20	20	95%	100%	105,26%
3.	2022	22	22	95%	100%	105,26%

Grafik 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2022-2024



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi pelaporan LHKPN adalah 100%, jadi tidak ada yang terlambat dalam pelaporan harta kekayaan pegawai kepada KPK.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini karena tingkat kesadaran pegawai yang wajib lapor LHKPN sangat tinggi.

Upaya - upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja pada indikator Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

1. Membuat pengumuman di Grup WA terkait kewajiban pembuatan LHKPN / LHK ASN dan batas waktu pengiriman LHKPN / LHK ASN setiap tahunnya.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaporan LHKPN / LHK ASN melalui aplikasi SIKEP.

12. Persentase Nilai Kinerja Anggaran

Indikator kinerja persentase nilai kinerja anggaran ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengukuran nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada nilai IKPA yang diperoleh satuan kerja. Nilai IKPA dipengaruhi oleh penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP deviasi halaman III Dipa untuk revisi tahun berjalan dan capaian output.

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator ini adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 99,18% sehingga capaian kinerja indikator persentase realisasi kinerja anggaran tahun 2024 adalah 110,2%.

Capaian kinerja indikator kinerja anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.83. Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase realisasi kinerja anggaran			
a.	DIPA 01	90%	99,83%	110,92%
b.	DIPA 03	90%	98,53%	109,48%
Rata- Rata		90%	99,18%	110,2%

Gambar 3.5 Capaian IKPA DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Apliaksi OM-Span Tahun 2024

MONEVPA													
Indikator Pelaksanaan Anggaran													
FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER													
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP		
1	034	005	098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	Nilai	100.00	100.00	99.97	0.00	0.00	98.72	100.00	79.87
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.99	0.00	0.00	9.87	25.00	
					Nilai Aspek	100.00		99.35			100.00		

MONEVPA													
Indikator Pelaksanaan Anggaran													
FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER													
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP		
1	034	005	099148	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	Nilai	100.00	100.00	94.10	0.00	0.00	100.00	100.00	78.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.82	0.00	0.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	100.00		97.05			100.00		

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.84. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 -2024

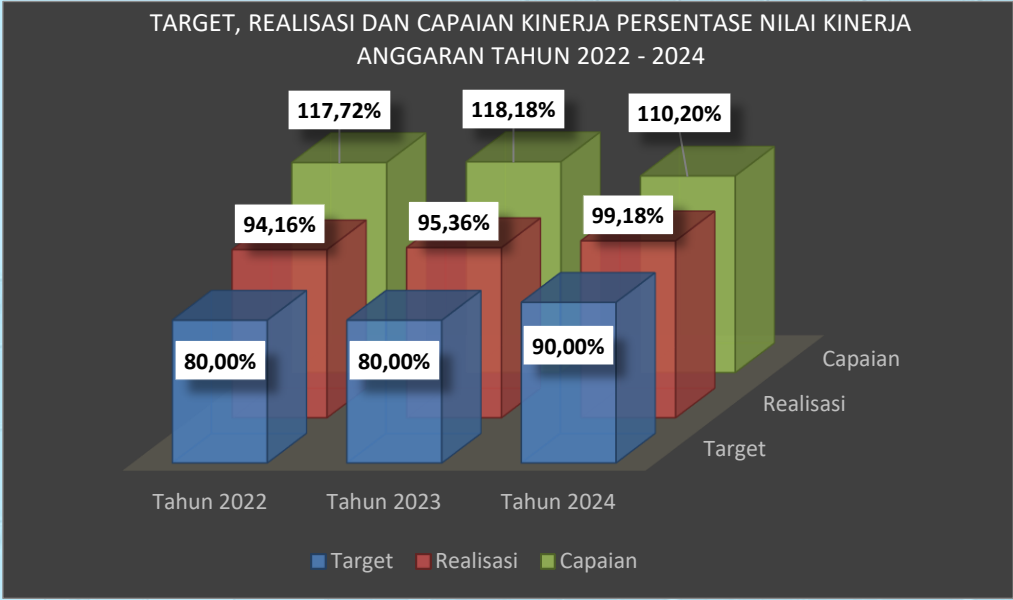
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi kinerja anggaran	80%	95,36%	119,18%	90%	99,18%	110,2%

Perbandingan Target, realisasi dan capaian kinerja persentase nilai kinerja anggaran tahun 2022-2024 pada Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.85. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 - 2024

Tahun	Kode DIPA	Target	Realisasi	Capaian
2024	01	90%	99,83%	110,92%
	03	90%	98,53%	109,48%
	Rata-Rata	90%	99,18%	110,2%
2023	01	80%	98,04%	122,5%
	03	80%	92,68%	115,85%
	Rata-Rata	80%	95,36%	119,18%
2022	01	80%	96,01%	120%
	03	80%	92,36%	115,44%
	Rata- Rata	80%	94,16%	117,72%

Grafik 3. 23 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja persentase nilai kinerja anggaran pada tahun pada tahun 2024 mengalami kenaikan, meskipun pada nilai capaian kinerja terjadi penurunan sebesar 8,9%.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja pada indikator kinerja persentase nilai kinerja anggaran pada tahun 2023 karena perubahan target dari tahun sebelumnya 80% menjadi 90%.

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN NEGERI NGANJUK UNTUK DAPAT MENINGKATKAN NILAI IKPA SATUAN KERJA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran apabila diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada satuan kerja .
2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik serta menyusun rencana penarikan dana dari masing- masing jenis belanja.
3. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal.
4. Untuk belanja kontraktual dilakkan percepatan lelang dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
5. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menundaproses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai.
6. Melakukan pengelolaan UP dan TUP secara efektif dan efisien.
7. Memantau progress penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam pemproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
8. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komperhensif, akurat dan disiplin dan melakukan pelaporan sebelum batas akhir periode pelaporan.

13. Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja

Indikator kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja ini mengukur tingkat kedisiplinan pegawai untuk mematuhi jadwal kerja yang telah ditetapkan.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah kehadiran

Jumlah hari kerja

x 100%

Analisa Capaian Kinerja

Berikut rekapitulasi ketidakhadiran pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan data pada Komdanas.

Tabel 3.86. Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Nganjuk Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Hari Efektif	Jumlah Ketidakhadiran
1.	Januari	22	0
2.	Februari	18	0
3.	Maret	18	0
4.	April	16	0
5.	Mei	18	0
6.	Juni	18	3
7.	Juli	23	1
8.	Agustus	22	0
9.	September	21	0
10.	Oktober	23	1
11.	November	21	0
12.	Desember	20	0
Total		240	5

Jumlah hari kerja selama tahun 2024 dalah 240 hari, sedangkan jumlah ketidakhadiran pegawai adalah 5 hari. Perhitungan pada indikator ini sebagai berikut:

Persentase kehadiran = (Jumlah hari tidak hadir : Jumlah hari kerja) x 100.

= (5 hari : 240 hari) x 100.

= 2.08 %

Persentase kehadiran = 100 % - 2,08% = 97,92%.

Target dari indikator persentase kedisiplinan masuk kerja adalah 95%, sedangkan realisasinya adalah 98,36%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 103,53%.

Capaian kinerja Indikator Persentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.87. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kedisiplinan masuk kerja	95%	97,92%	103,07%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.88. Perbandingan Capaian Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2023 – 2024

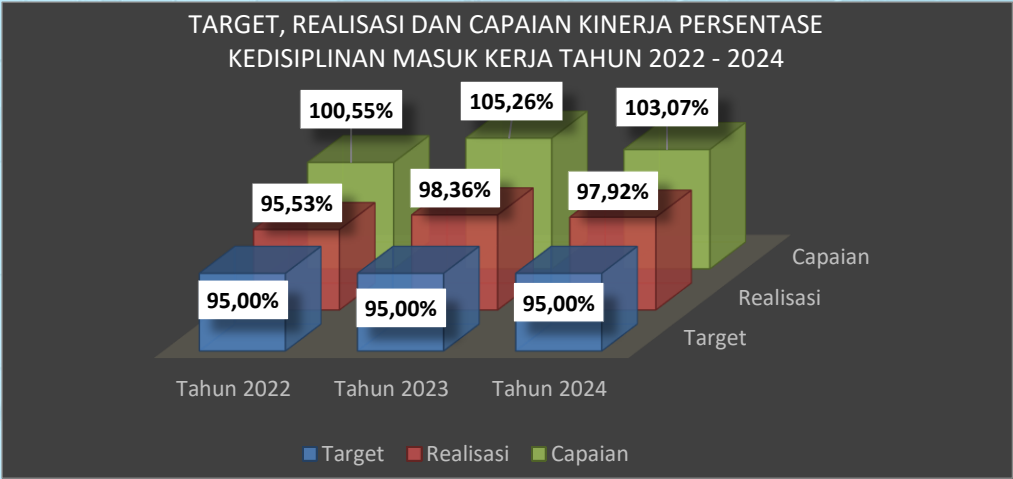
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kedisiplinan masuk kerja	95%	100%	105,26%	95%	97,92%	103,07%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2022- 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.89. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Kehadiran	Target	Realisasi	Capaian
2024	240	235	95%	97,92%	103,07%
2023	244	240	95%	98,36%	105,26%
2022	246	235	95%	95,53%	100,55%

Grafik 3. 24 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022 – 2024



Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja pada tahun 2024 menurun 2,19% dibandingkan dengan tahun 2023, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, namun apabila dilihat dari pencapaian target indikator ini telah memenuhi karena mencapai target kinerja diatas 100%.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%, artinya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti tingkat kedisiplinan pegawai pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah baik. Tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk di dukung dengan adanya remunerasi yang diberikan setiap bulannya untuk memotivasi pegawai agar bekerja secara efektif serta meningkatkan kinerja guna mewujudkan visi misi organisasi.

Upaya peningkatan kedisiplinan kerja pegawai di Pengadilan Negeri Nganjuk diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan melakukan pembinaan secara berkala pada saat apel, briefing ataupun rapat dinas terkait disiplin Pegawai yaitu dengan cara :
Mengingatkan Hakim dan Pegawai untuk mempedomani Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017, PP No 94 Tahun 2021, serta Perma No, 7,8,9 Tahun 2016
2. Mengingatkan Pegawai untuk selalu menjunjung tinggi kode etik dan integritas
3. Melakukan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahun.

Sasaran Startegis 7 : Mewujudkan Pelayanan Kesekretaraian Yang Baik Dan Prima

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.90. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Jumlah kapasitas banwith yang memadai	100 Mbps	120 Mbps	120%
3.	Persentase distribusi surat	100%	100%	100%
4.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%
5.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%	111,11%
6.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3	3	100%
7.	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	24 Berita	44 Berita	183,33%
8.	Jumlah layanan pengadilan	7 layanan	7 layanan	100%
9.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang	341 orang	170,5%
10.	Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang	266 orang	332,5%
11.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%
12.	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m ²	3.000 m ²	100%
13.	Jumlah pemelihraaan rumah dinas	5 unit	3 unit	60%
14.	Jumlah pemeiharaan peralatan/mesin kantor	114 unit	119 unit	104,39%
15.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan ata usaha dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				126,20%

Analisis Sasaran Strategis VII

1. Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan, Mahkamah Agung maupun Dirjen Badan Peradilan Umum membuat beberapa inovasi. Inovasi-inovasi tersebut di terapkan di seluruh pengadilan negeri termasuk Pengadilan Negeri Nganjuk. Aplikasi tersebut diantaranya, SIPP, MIS, EIS, Eraterang, E-Court dan yang terbaru adalah E- Berpadu.

Indikator ini mengukur pemeliharaan aplikasi yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri Nganjuk selama tahun 2024 dan manfaat yang didapatkan dari aplikasi tersebut.

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator ini adalah 100%, sedangkan realisasinya adalah 100% , jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk telah menyelesaikan pemeliharaan terhadap aplikasi layanan yang dimiliki oleh satuan kerja. Aktifitas yang dilaksanakan adalah update aplikasi satuan kerja dan pemeliharaan aplikasi.

Capaian kinerja indikator Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.91. Capaian Kinerja Pemeliharaan Sarana Aplikasi Layanan Yang Telah Diselesaikan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%

Indikator pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan adalah indikator yang ditetapkan pada tahun 2024, jadi untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan dalam laporan ini.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Upaya yang yang dilakuakn Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan update aplikasi setiap ada pengumuman untuk update aplikasi ke versi terbaru
2. Meningkatkan fitur- fitur apliaksi layanan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk.

2. Jumlah kapasitas banwith yang memadai

Indikator ini mengukur ketersediaan banwith yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menunjang kinerja pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Bandwidth jika dijabarkan secara lengkap adalah jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan client yang ditentukan dalam hitungan bit per second (bps). Dapat dikatakan pula, bandwidth adalah maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran data dalam satu waktu tertentu.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 724/SEK/OT.01.1/5/2019, tentang petunjuk pelaksanaan SP-SABA disebutkan bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan e- court berupa peningkatan banwith yang regular menggunakan jasa telekomunikasi bersifat dedicated dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah rendahnya 50 Mbps dan Pengadilan Tingkat pertama serendah-rendahnya 50 Mbps.

Analisis Capaian Kinerja

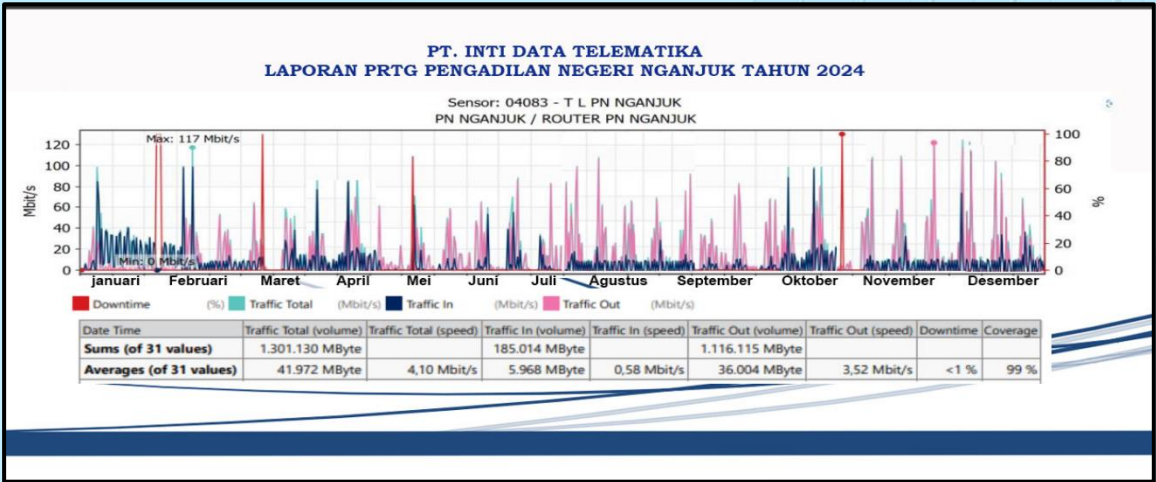
Pada tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator jumlah kapasitas banwith yang memadai adalah 100 Mbps, sedangkan realisasinya adalah 120 Mbps , jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 120%.

Capaian kinerja indikator jumlah kapasitas banwith yang memadai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.92. Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai	100 Mbps	120 Mbps	120%

Gambar 3.6. Gambar Grafik Laporan Ketersediaan Banwith Internet Tahun 2024



Gambar diatas merupakan grafik laporan pemakaian internet pada Pengadilan Negeri Nganjuk serta ketersediaan banwith internet selama tahun 2024. Dalam grafik tersebut digambarkan rata- rata tingkat kebutuhan internet maksimal pada angka 40-50 Mbps, sedangkan ketersediaan banwith dari profider adalah 120 Mbps, sehingga kapasitas banwith yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk sudah tercukupi.

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.92. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang Memadai Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai	100 Mbps	100 Mbps	100%	100 Mbps	120 Mbps	120%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah kapasitas banwith yang memadai tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.93. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kapasita Banwith Yang Memadai Tahun 2022 - 2024

Tahun	Kapasitas Banwith yang tersedia	Target	Realisasi	Capaian
2024	100 Mbps	100 Mbps	120 Mbps	120%
2023	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100%
2022	50 Mbps	50 Mbps	50 Mbps	100%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah kapasitas banwith dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dimana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk meningkatkan kapasitas banwith yang semula dari 100 Mbps menjadi 120 Mbps untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memastikan bahwa jumlah kapasitas banwith yang ada memadai yaitu dengan cara:

- 1. Melakukan monitoring terhadap ketersediaan banwith.
- 2. Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia apabila terjadi kendala atau penurunan kapasitas banwith.

3. Persentase Distribusi Surat.

Indikator kinerja persentase distribusi surat mengukur perbandingan antara surat masuk dengan surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian.

Dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian

Jumlah surat masuk

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu tahun 2024, terdapat 780 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian.

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator persentase distribusi surat adalah 100%, sedangkan realisasinya adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebesar 100%.

Capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.94. Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase distribusi surat	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.95. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2023 – 2024

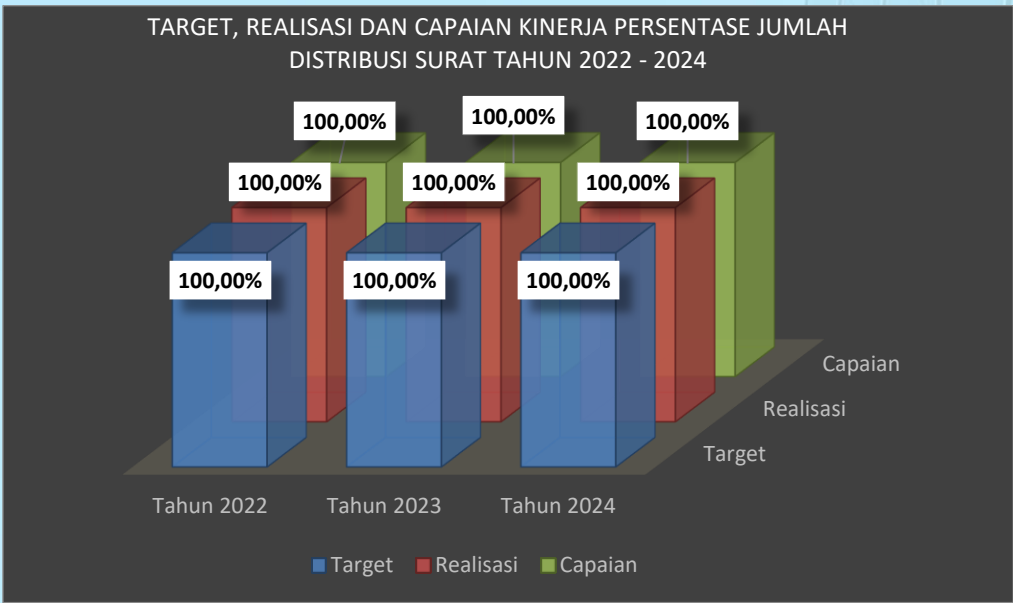
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase distribusi surat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase distribusi surat tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.96. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Surat masuk	Jumlah Surat Yang didistribusikan	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	780 surat	780 surat	100%	100%	100%
2.	2023	868 surat	868 surat	100%	100%	100%
3.	2022	1778 surat	1778 surat	100%	100%	100%

Grafik 3.25. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Distribusi Surat Tahun 2022 – 2024



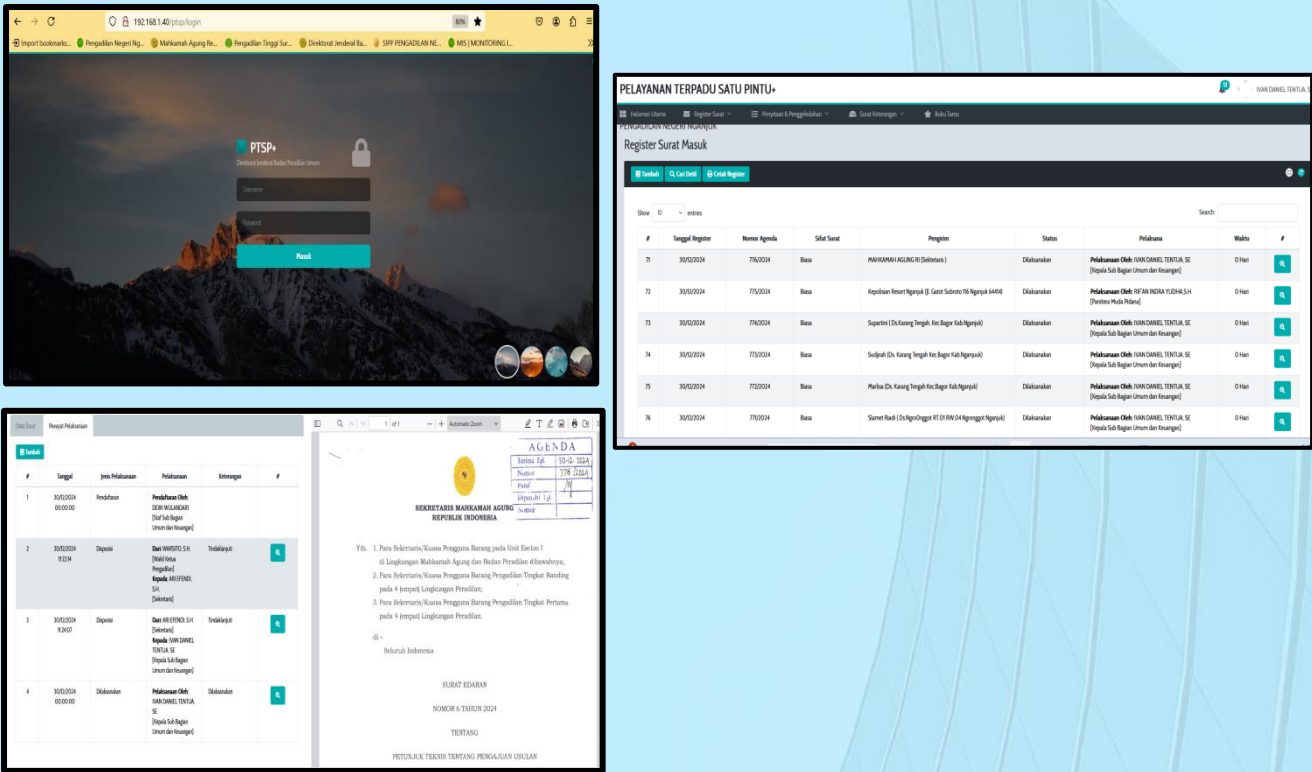
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 dengan 2024 pada indikator jumlah pendistribusian surat ini sama yaitu 100%.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Hal- hal yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memperlancar pendistribusian surat masuk adalah sebagai berikut.

- 1. Penggunaan aplikasi PTSP + dari Dirjen Badilum untuk pelayanan pesuratan dan untuk mempercepat pendistribusian surat masing-masing bagian.
- 2. Surat masuk di share pada wa grub sehingga surat masuk telah diketahui oleh masing – masing sambil menunggu disposisi berjalan.

Gambar 3.7 Aplikasi PTSP + Untuk Pendistribusian Surat.



4. Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu.

Indikator kinerja persentase tindak lanjut surat tepat waktu mengukur perbandingan antara surat yang telah ditindak lanjuti tepat waktu dengan surat masuk.

Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah jumlah surat yang ditindaklanjuti masing-masing bagian sesuai dengan disposisi pimpinan.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu

Jumlah surat masuk

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 100%, melebihi target yang telah ditetapkan, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebesar 111,11%.

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.97. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.98. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2023 – 2024

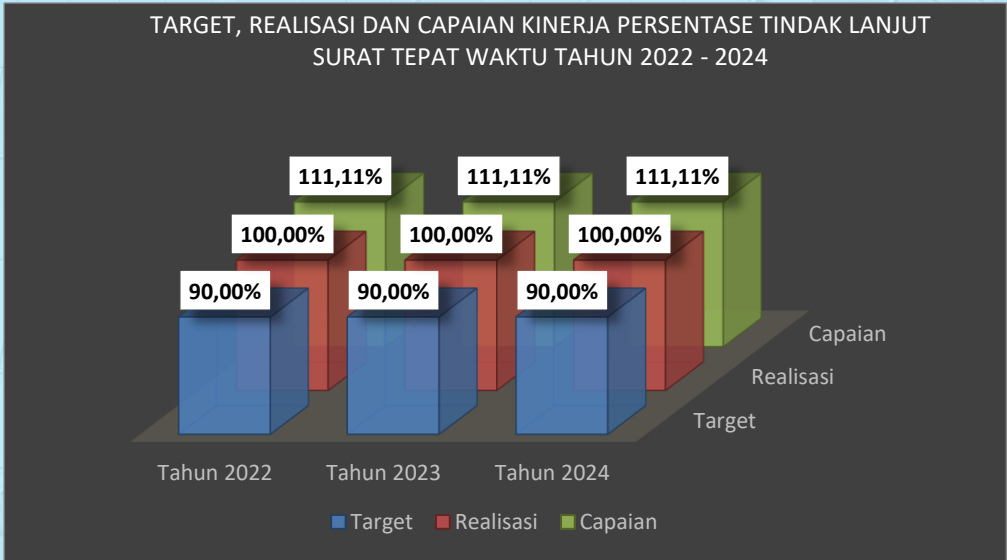
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%	90%	100%	111,11%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase tindak lanjut surat tepat waktu tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.99. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Surat masuk	Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	780 surat	780 surat	90%	100%	111,11%
2.	2023	868 surat	868 surat	90%	100%	111,11%
3.	2022	1778 surat	1778 surat	90%	100%	111,11%

Grafik 3.25. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 dengan 2024 pada indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu ini sama yaitu 111,11%. Dalam kurun waktu tahun 2024, terdapat 784 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian untuk ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai disposisi.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mempercepat tindak lanjut surat adalah sebagai berikut:

- 1. Surat masuk di share pada wa grub sehingga penanganan tindak lanjut surat pada masing- masing bagian segera dapat dilaksanakan sambil menunggu disposisi berjalan.
- 2. Segera melakukan tindak lanjut surat yang didisposisi ke bagiannya.
- 3. Melakukan kontrol terhadap batas akhir tindak lanjut surat yang telah diterima.

5. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat.

Indikator ini mengukur kemudahan dan kecepatan pencarian arsip surat yang telah masuk maupun surat keluar pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu

Jumlah surat

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator ini adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase arsip surat yang dapat ditemukan tepat waktu adalah sebesar 111,11%.

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.100. Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu	90%	100%	111,11%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.101. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2023 – 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu	90%	100%	111,11%	90%	100%	111,11%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.102. Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang dapat Ditemukan Dengan Cepat Dan Mudah Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Surat	Jumlah Surat dapat ditemukan dengan cepat dan mudah	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	2222	2222	90%	100%	111,11%
2.	2023	1655	1655	90%	100%	111,11%
3.	2022	3544	3544	90%	100%	111,11%

Grafik 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang dapat Ditemukan Dengan Cepat Dan Mudah Tahun 2022 – 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan cepat dan mudah pada tahun 2024 adalah 111,11% berbanding lurus dengan capaian di tahun 2024.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk diataranya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap bagian mempunyai buku register surat masuk dan keluar untuk mempermudah dalam pencarian surat yang didisposisikan pada setiap bagian.
- 2. Setiap Bagian melakukan pengelolaan arsip surat dengan baik.
- 3. Melakukan input surat masuk maupun keluar pada aplikasi PTSP +.

6. Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait.

Indikator ini mengukur jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan instansi terkait di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk khususnya.

Analisis Capaian Kinerja

Target yang ingin dicapai pada indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah 3, sedangkan realisasinya sepanjang tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk menjalin kerjasama dengan 3 instansi terkait yaitu:

- 1. Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk penerapan keberlanjutan aplikasi e-Berpadu.
- 2. Kepolisian Resor Nganjuk untuk penerapan keberlanjutan aplikasi e-Berpadu.
- 3. Lembaga Pemasyarakatan Nganjuk untuk keberlanjutan penerapan aplikasi e- Berpadu.

Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.

Capaian kinerja indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 3.103. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Kerjasama antar instansi terkait	3	3	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.104. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kerjasama antar instansi terkait	5	3	60%	3	3	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah kerjasama antar instansi terkait tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.105. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	3 Instansi	3 instansi	100%
2.	2023	5 Instansi	3 instansi	60%
3.	2022	5 Instansi	6 Instansi	120%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait pada tahun 2024 mengalami kenaikan, dikarenakan terdapat perubahan target pada indikator ini.

Sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, Perjanjian kinerja yang diperhitungkan adalah jumlah MoU dengan instansi terkait, jadi untuk Mou dengan lembaga seperti Posbakum dan penyedia jasa internet tidak diperhitungkan, meskipun tetap terdapat kerjasama untuk tahun ini dengan pertimbangan kedua lembaga tersebut bukan sebuah instansi pemerintah.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024, dilakukan reviu perubahan target kinerja ya semila 5 instansi mejadi 3 instansi. Perubahan target ini dikarenakan melihat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Nganjuk hanya melaksanakan MoU dengan Kepolisian, Rutan dan Kejaksaan terkait pelaksanaan E- Berpadu, agar capaian kinerja realistis maka target kinerja menyesuaikan.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini diataranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akselerasi penyelesaian pelayanan publik antar stakeholder
2. Memperbanyak kerjasama yg bersifat simbiosis mutualisme bagi stakeholder dan pengguna/ masyarakat.

7. Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media.

Indikator ini mengukur berapa banyak berita yang tentang Pengadilan Negeri Nganjuk yang dimuat di media khususnya Website dan media sosial Pengadilan Negeri Nganjuk.

Analisis Capaian Kinerja

Target pada indikator ini adalah 24 berita, sedangkan realisasinya, sepanjang tahun 2024 berita yang dimuat di media khususnya website Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 44 berita, sehingga capaian target pada indikator jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media adalah 183,33%.

Capaian kinerja indikator jumlah berita tentang satuan kerja di dimuat dimedia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.106. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	24 berita	44 berita	183,33%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.107. Perbadingan Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	30 berita	180 berita	600%	24 berita	44 berita	183,33 %

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.108. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat di Media Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	24 berita	44 Berita	183,33%
2.	2023	30 berita	180 berita	600%
3.	2022	24 berita	106 berita	441,66%

Dari data yang ditampilkan diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator ini mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja pada indikator ini mencapai 600% sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 183,33%.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Ketidakberhasilan capaian pada indikator ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 selama satu tahun juga tidak banyak. Selain media sosial lainnya, Website Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan media paling efektif untuk mempublikasikan kinerja maupun program kerja serta kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, selain itu website juga dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang layanan yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk seperti layanan publik, layanan hukum, serta profil pengadilan.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini diataranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk selalu dimuat di website atau media sosial lainnya dengan tujuan agar masyarakat lebih mengenal Pengadilan Negeri Nganjuk secara lebih dekat dan menghilangkan stigma dimasyarakat bahwa pengadilan adalah kantor yang tidak bersahabat
2. Membentuk tim pengelola website yang bertujuan untuk mengelola website sesuai dengan standart yang berlaku.
3. Melakukan monitoring secara berkala terhadap kegiatan update data website maupun media sosial lainnya.

8. Jumlah Layanan Pengadilan.

Indikator Jumlah layanan Pengadilan menjabarkan jumlah layanan pengadilan yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk.

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator jumlah layanan di Pengadilan adalah 7 Layanan, sedangkan realisasinya adalah 7 Layanan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.109. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Layanan Pengadilan	7 layanan	7 layanan	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.110. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Layanan Pengadilan	7 layanan	7 layanan	100%	7 layanan	7 layanan	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah layanan pengadilan tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.111. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	7 Layanan	7 Layanan	100%
2.	2023	7 Layanan	7 Layanan	100%
3.	2022	7 Layanan	7 Layanan	100%

Layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:

- 1. Layanan PTSP Pidana.
- 2. Layanan PTSP Perdata.
- 3. Layanan PTSP Hukum.
- 4. Layanan PTSP Umum.
- 5. Layanan e-Court.
- 6. Layanan e-Berpadu.
- 7. Layanan Posbakum.

Semua layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk berada pada Ruang PTSP yang bertempat di lobi depan kantor Pengadilan Negeri Nganjuk yang tentunya mudah diakses oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan. Pada ruang PTSP disediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung juga disediakan tempat khusus untuk para penyandang disabilitas agar dapat memperoleh layanan prioritas. Selain ruang tunggu yang nyaman, juga terdapat mesin antrian PTSP untuk mempermudah pengguna pengadilan dalam memperoleh haknya untuk dilayani serta

memberikan kemudahan petugas pelayanan dalam melayani masyarakat pengguna peradilan sehingga tercapai *service excellent*.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tahun ke tahun capaian indikator kinerja jumlah layanan pengadilan telah memenuhi target ditetapkan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Nganjuk selalu berupaya untuk melakukan pemenuhan layanan sesuai standart yang telah ditetapkan, seperti adanya ruangan PTSP, layanan terhadap penyelesaian perkara secara eletronik dan layanan Posbakum.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini diataranya adalah sebagai berikut:

- 1. Pembekalan petugas layanan agar dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
- 2. Mengusulkan anggaran untuk ketersediaan tempat serta sarana dan prasarana layanan kepada Badan Urusan Adminsitration MA RI.
- 3. Bekerjasama dengan stakeholder terkait hibah untuk ketersediaan sarana dan prasarana layanan di Pengadilan.

9. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan.

Indikator jumlah pengguna layanan pengadilan mengukur berapa banyak masyarakat yang menggunakan layanan peradilan pada periode tahun 2024.

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator jumlah pengguna layanan Pengadilan adalah 200 orang, sedangkan realisasinya adalah 341 orang , melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 259, 6%. Jumlah pengguna layanan di pengadilan dilihat dari jumlah masyarakat pengguna peradilan yang telah mengisi surveyy kepuasan masyarakat yang ada di desk info PTSP.

Capaian kinerja indikator jumlah pengguna layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.112. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan	200 orang	341 orang	170,5%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.113. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan	250 orang	649 orang	259,6%	200 orang	341 orang	170,5%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah pengguna layanan pengadilan tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.114. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	200 orang	341 orang	170,5%
2.	2023	250 orang	649 orang	259,6%
3.	2022	250 orang	411 orang	164,4%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, jumlah pengguna layanan pengadilan mengalami penurunan. Jumlah Pengunjung pengadilan yang semula mencapai angka 649 orang pada tahun 2024 turun menjadi 341 orang.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun sebab dari berkurangnya jumlah pengguna layanan pengadilan kemungkinan karena berkurangnya perkara yang masuk tahun ini. Upaya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melakukan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dilakukan dengan cara:

- 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kenyamanan para pengguna pengadilan guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.
- 2. Adanya petugas layanan yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik, serta mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

10. Jumlah Layanan Bantuan Hukum.

Indikator jumlah layanan bantuan hukum mengukur berapa jumlah layanan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah 80 orang, sedangkan realisasinya adalah 266 orang , melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 120%.

Capaian kinerja indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.115. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang	266 orang	332,5 %

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.116. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 – 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang	240 orang	259,6%	80 orang	266 orang	332,5 %

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah layanan bantuan hukum tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.117. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	80 orang	266 orang	332,5%
2.	2023	200 orang	240 orang	120%
3.	2022	200 orang	240 orang	120%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi masayarakat yang tidak mampu cukup banyak dan mengalami kenaikan.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pos bantuan hukum yaitu diantaranya:

1. Pengadilan Negeri Nganjuk telah menanda tangani MOU dengan lembaga bantuan hukum yang terakrediatsi dan emmenuhi syarat untuk melakukan layanan bantuan hukum.
2. Memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan layanan bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu sehingga dapat memaksimalkan pelayanannya.
3. Sosialisasi adanya layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Nganjuk melalui website dan media sosial lainnya.

11. Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian.

Indikator kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian mengukur perbandingan antara jumlah pengusulan kepegawian seperti usualan jabatan dan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) dengan penyelesaian usulan Kepegawaian.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian

Jumlah Usulan Kepegawaian

x 100%

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 100% orang, sedangkan realisasinya adalah 100%, sesuai target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Capaian kinerja indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.118. Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.119. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah layanan bantuan hukum tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.120. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Usulan Kepegawaian (Usulan Jabatan dan KGB)	Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	28	28	100%	100%	100%
2.	2023	17	17	100%	100%	100%
3.	2022	20	20	100%	100%	100%

Grafik 3.27. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022- 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, capaian kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 100%, artinya setiap usulan kepegawian yang diajukan semua diselesaikan dengan baik.

Pada tahun 2024 terdapat 8 (deapan) usulan jabatan, untuk usulan KGB sejumlah 19 (sembilan belas) orang dan semua usulan telah diselesaikan dan ditindaklanjuti.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja ini tidak terlepas dari upaya Pengadilan Negeri Nganjuk diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Membuat rencana usulan kepegawaian berupa rencana kenaikan gaji berkala dan rencana usulan jabatan.
- 2. Mengusulkan KGB Pegawai secara tepat waktu
- 3. Melakukan monitoring terhadap pegawai yang akan diusulkan kenaikan gaji berkala.
- 4. Melakukan monitoring terhadap usulan jabatan.

Pengusulan kepegawian baik usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan jabatan ataupun kenaikan gaji berkala adalah hak setiap pegawai yang harus dipenuhi untuk menunjang kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pengguna pengadilan.

12. Jumlah Pemeliharaan Gedung.

Indikator jumlah pemeliharaan gedung mengukur jumlah luasan gedung Pengadilan dan anggaran yang didapat oleh satuan kerja.

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah 3.000 m², dihitung dari luasan gedung dan bangunan yang dilakukan pemeliharaan sesuai dengan RKA-KL tahun 2023, sedangkan realisasinya adalah 3.000 m² sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.121. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m ²	3.000 m ²	100%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.122. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2023 – 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m ²	3.000 m ²	100%	3.000 m ²	3.000 m ²	100%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah pemeliharaan gedung tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.123. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	3.000 m2	3.000 m2	100%
2.	2023	3.000 m2	3.000 m2	100%
3.	2022	2.259 m2	2.259 m2	100%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator ini dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mencapai 100%. Volume kegiatan untuk belanja gedung dan bangunan pada tahun 2024 adalah 3.000 m² terdiri dari :

- 1. Gedung kantor 2.000 m²
- 2. Halaman gedung 1.000 m²

Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dengan pagu awal sebesar Rp. 182.734.000, oleh karena terdapat perubahan kebutuhan satuan kerja, maka diadakan revisi anggaran sehingga anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi Rp. 258.234.000,-

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk belum mendapatkan anggaran pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan SBM yang berlaku, namun demikian telah melaksanakan pemeliharaan kantor dengan baik dan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran pemeliharaan gedung.
- 2. Percepatan realisasi pemeliharaan gedung yang dilaksanakan sesuai aturan.
- 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung.

13. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas.

Indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas menghitung jumlah rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan dengan anggaran yang didapatkan satuan kerja.

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 5 unit sesuai dengan volume yang ada di RKA-KL tahun 2024, sedangkan realisasinya adalah 3 unit , sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 60 %.

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.124. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah pemeliharaan rumah Dinas	5 unit	3 unit	60%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.125. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemeliharaan rumah Dinas	5 unit	3 unit	60%	5 unit	3 unit	60%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah pemeliharaan rumah dinas tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.126. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	5 unit	3 unit	60%
2.	2023	5 unit	3 unit	60%
3.	2022	5 unit	3 unit	60%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator ini dari tahun 2022 samapi dengan tahun 2024 masih sama yaitu 60%. Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki rumah dinas sebanyak 6 rumah dinas terdiri dari 3 (tiga) rumah dinas Hakim, 1 (satu) rumah dinas Panitera, 1 (satu) rumah dinas Ketua dan 1 (satu) rumah dinas Wakil Ketua. Rumah dinas yang bisa ditempati yaitu rumah dinas Ketua, rumah dinas Wakil Ketua dan rumah dinas Panitera, sedangkan 3 rumah dinas yang lain dalam keadaan rusak berat. Untuk pemeliharaan rumah dinas pada anggaran rkakl 2024 sebesar Rp.49.000.000 dan setelah revisi pagu anggaran menjadi 53.680.000.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Ketidakberhasilan capaian kinerja pada idikator ini disebabkan karena rumah dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Nganjuk 3 diantaranya menagلامي rusak berat dan tidak mungkin untuk dilakukan pemeliharaan, namun harus dilakukan renovasi. Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengupayakan pengajuan usulan pengadaan pembangunan rumah dinas dan masih dalam tahap pengajuan ke dinas PUPR untuk analisa tingkat kerusakan bangunan dan kemudian diajukan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

14. Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor.

Indikator jumlah pemeliharaan peralatan mesin/kantor menghitung jumlah pemeliharaan peralatan mesin kantor dan anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan peralatan mesin kantor satuan kerja.

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 114 unit, sedangkan realisasinya adalah 119 unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.127. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor	114 unit	119 unit	104,39 %

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.128. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Tahun 2023 – 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor	114 unit	114 unit	100 %	114 unit	119 unit	104,39 %

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.129. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2022 - 2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	114 unit	119 unit	104,39%
2.	2023	114 unit	114 unit	100%
3.	2022	103 unit	103 unit	100%

Dari data diatas dapat dilihat capaian kinerja pada indikator jumlah pemeliharaan peralatan/ mesin pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk memperoleh anggaran belanja tambahan berupa 1 AC standing, 3 Ac split dan 1 proyektor, dan untuk tahun 2024 dan meskipun biaya pemeliharaan untuk 5 unit peralatan/mesin yang baru belum dianggarkan,namun biaya pemeliharaan tersebut telah di cover dengan angagran pemeliharaan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, artinya semua peralatan /mesin kantor telah mendapatkan pemeliharaan dengan dana yang terdapat pada DIPA satan kerja.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin dengan pagu awal sebesar Rp. 110.850.000, setelah mengalami penyesuaian kebutuhan, pagu pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami revisi menjadi Rp. 154.300.000,-.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin.

15. Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga.

Indikator Layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga mengukur jumlah layanan yang diberikan oleh kesekretaraiatan sebagai supporting unit untuk keberlangsungan administrasi perkantoran di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah 12 layanan , sedangkan realisasinya adalah 12 layanan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.130. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 Layanan	12 Layanan	100 %

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.131. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2023 - 2024

Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 Layanan	12 Layanan	100 %	12 Layanan	12 Layanan	100 %

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.132. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2022 - 2023

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	12 Layanan	12 Layanan	100%
2.	2023	12 Layanan	12 Layanan	100%
3.	2022	12 Layanan	12 Layanan	100%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga secara efektif dan efisien.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini antara lain:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat berjenjang dan ditindaklanjuti pada rapat bulanan
- 2. Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan setiap minggu untuk dilaporkan kepada kooridinator pengawasan.

Sasaran Startegis 8 Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.133. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%	100%	111,11%
NILAI CAPAIAN KINERJA				111,11%

Analisis Sasaran Strategis VIII

1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

Indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan menghitung jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk guna menunjang kinerja serta mendukung pelayanan terhadap masyarakat pengguna pengadilan.

Analisis Capaian Kinerja

Target untuk indikator Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan 90%, sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 111,11%.

Capaian kinerja indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.134. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	90%	100%	111,11%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.135. Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2023 – 2024

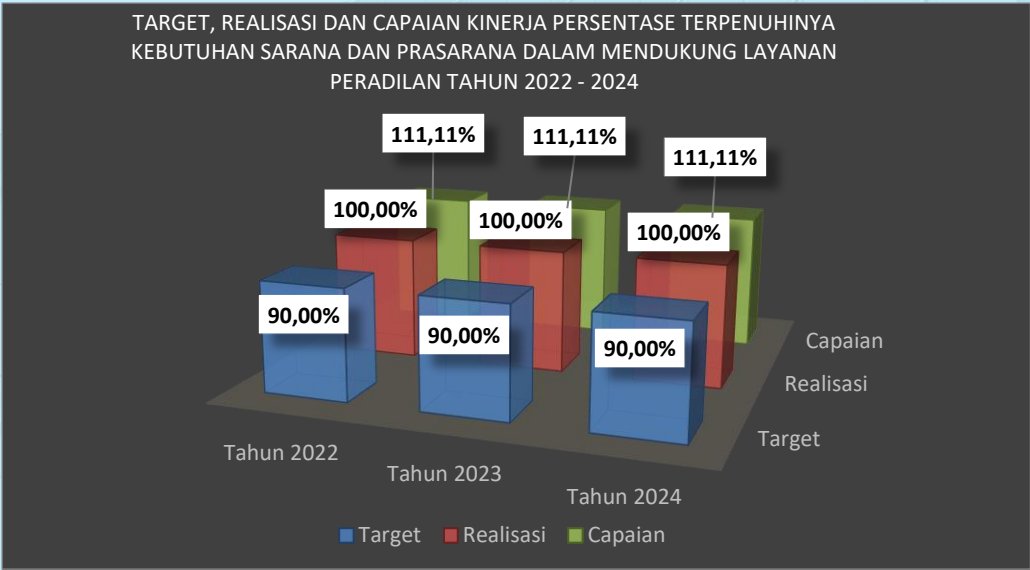
Indikator kinerja	Tahun					
	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	90%	100%	111,11%	90%	100%	111,11%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.136. Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	90%	100%	111,11%
2.	2023	90%	100%	111,11%
3.	2022	90%	100%	111,11%

Grafik 3.28. Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2024



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini berbading lurus dengan tahun sebelumnya yaitu 111,11%.

Analisis Kenaikan / Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari hasil capaian tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk antara lain :

- Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada triwulan I;
- Memastikan pembentukan kelompok kerja (pokja) harus lebih awal untuk mengantisipasi gagal lelang yang akan menghambat proses pelaksanaan anggaran;
- Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada triwulan III.
- Melakukan usulan anggaran belanja tambahan (ABT) untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan pengadilan.

Berikut kami sajikan data perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan rencana jangka menengah (Renstra 2020-2024) :

Tabel 3.137. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Rencana Jangka Menengah (Renstra 2020- 2024)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kiinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk	Persentase perkara yang diselesaikan tepat	85	Terwujudnya peradilan yang	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100 100	100 100	100 70	100 70	95 75	86,3 8	100 100	100 100	100 99,5	100 97,2	86,3 8	100 100	100 142,	100 142,	105, 26
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	1	1	1	0	0	0	0	100	-- NA--	-- NA--	-- NA--	-- NA--	10.0 00

		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94	90	80	80	80	96,08	96,76	97,36	92,96	93,67	102,21	107,51	121,70	116,2	117,9
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94	95	90	90	90	96,98	97,90	97,36	95,52	95,61	103,17	103,05	108,17	106,13	106,23
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi peradilan	70		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10	15	70	70	10	15,28	0	100	100	0	153,8	0	142,86	142,86	0

		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85	90	90	90	90	85,10	91,86	97,32	95,76	95,28	100	102,06	108,17	106,4	105,87
2	Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu	90	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	100	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	111,11	11,11	111,11
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	15	10	7	7	10	17,78	10,25	14,29	9	11,9	118,53	100	204,14	128,57	119

3	Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	0	1	100	0	0	0	0	0	-- NA--	-- NA--	-- NA--	-- NA--	
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	100	100	0	1	1	0	0	0	0	0	-- NA--	-- NA--	-- NA--	-- NA--	-- NA--
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75	80	50	50	50	0	60	100	40	78,5 7	0	80	200	80	157, 14

5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	80	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	-	-	80	80	90	-	-	80	90	90	-	-	100	112,5	100
		Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80		Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	-	-	100	100	80	-	-	100	100	100	-	-	100	100	125
		Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100		Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100

		Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100		Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	Nilai LKjIP minimal "BB"	BB	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	Nilai LKjIP minimal "BB"	-	-	BB	BB	BB	-	-	BB	BB	BB	-	-	100	100 1	100
		Predikat Pembangunan Zona Integritas . WBK / WBBM	WBK		Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	-	-	WBK	WBK	WBK	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		Nilai IPK	90		Nilai IPK	-	-	90	90	90	-	-	98,3	98,6	98,9	-	-	109,	109,	109,
		Nilai IKM	90		Nilai IKM	-	-	90	90	90	-	-	97,3	95,7	95,2	-	-	108,	106,	105,
		Predikat Ampuh	Unggul		Predikat Ampuh	-	-	-	-	Unggul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	100		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100

		Persentase realisasi anggaran belanja	95		Persentase realisasi anggaran belanja	-	-	97	97	95	-	-	97,56	97,30	95,62	-	-	100,52	100,31	104,13
		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	-	-	95%	95%	95%	-	-	100	100	100	-	-	105,26	105,26	105,26
		Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%		Prosentase nilai Kinerja Anggaran	-	-	80%	80%	90%	-	-	94,16	95,36	99,18	-	-	117,72	119,18	110,2
		Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%		Prosentase kedisiplin masuk kerja	-	-	95%	95%	95%	-	-	95,53	98,36	97,92	-	-	100,55	105,26	103,07
	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 mbps		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	-	-	50 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	-	-	50 Mbps	100 Mbps	120 Mbps	-	-	100	100	120
		Persentase distribusi surat	100		Persentase distribusi surat	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
		Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90		Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	-	-	90	90	90	-	-	100	100	100	-	-	111,11	111,11	111,11
		Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90		Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	-	-	90	90	90	-	-	100	100	100	-	-	111,11	111,11	111,11
		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5 Instansi		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	-	-	5 Instansi	5 Instansi	3 Instansi	-	-	6	3	3	-	-	120	60	100

		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	25 berit a		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	-	-	24 beri ta	30 beri ta	24 berit a	-	-	106 beri ta	180 beri ta	44 berit a	-	-	441, 66	600	183, 33
		Jumlah layanan pengadila n	7 laya nan		Jumlah layanan pengadilan	-	-	7 laya nan	7 laya nan	7 laya nan	-	-	7 laya nan	7 laya nan	7 laya nan	-	-	100	100	100
		Jumlah pengguna layanan pengadila n	250 oran g		Jumlah pengguna layanan pengadilan	-	-	250 oran g	250 oran g	200 oran g	-	-	411	649	341	-	-	164, 4	259, 6	170, 5
		Jumlah layanan bantuan hukum	200 oran g		Jumlah layanan bantuan hukum	-	-	200 oran g	200 oran g	80 oran g	-	-	240	240	266	-	-	120	120	332, 5
		Persentase pengusula n dan penyelesai an usulan kepegawai an	100 %		Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepega waian	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100

		Jumlah pemeliharaan gedung	2.25 9 m2		Jumlah pemeliharaan gedung	-	-	2.25 9 m2	3.00 0 m2	3.00 0 m2	-	-	2.25 9 m2	3.00 0 m2	3.00 0 m2	-	-	100	100	100
		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	-	-	5 unit	5 unit	5 unit	-	-	3 unit	3 unit	3 unit	-	-	60	60	60
		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	103 unit		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	-	-	103 unit	114 unit	114 unit	-	-	103	114	119	-	-	100	100	104,39
		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	-	-	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	-	-	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	-	-	100	100	100

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan	Terpenuhi nya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan	Terpenuhi nya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	-	-	90	90	90	-	-	100	100	100	-	-	111,11	111,11	111,11
---	--	---	-----	--	---	---	---	----	----	----	---	---	-----	-----	-----	---	---	--------	--------	--------

BENCHMARK KINERJA

REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2023

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	95%	97,50%	102,50 %	50%	50%	100%	85%	88%	103%	95%	100,00%	105%	10%	33%	130%	95%	99%	104%	106,71%
Pengadilan Negeri Bangkalan	95,50 %	88,39%	92,55%	2%	0%	0%	84%	68,08%	81,04%	90,50 %	84,62%	93,50%	10%	11,11%	111,1%	96%	97,73%	101,80 %	82,89%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	80%	89,23%	115,23 %	1%	0%	0%	70%	90,12%	128,74%	70%	91,96%	131,40%	1%	0%	0%	90%	98,28%	109,20 %	120,22%
Pengadilan Negeri Blitar	95%	95,72%	100,73 %	3%	N/A	N/A	98%	97,40%	99,38%	98%	98,04%	100,04%	3%	N/A	N/A	93%	98,82%	106,26 %	101,43
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	99%	99%	2%	0%	0%	90%	95%	105%	90%	97%	107%	50%	70%	140%	96,40%	99,67%	103%	92,33%
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	94%	94%	80%	80%	100%	95%	95%	100%	97%	97%	100%	50%	0%	0%	100%	98,72%	98,72%	82,12%
Pengadilan Negeri Gresik	100%	84,18%	84,18%	96,67 %	N/A	N/A	5%	21,34%	426,78%	5%	6,56%	131,10%	5%	N/A	N/A	80%	98,64%	123,30 %	127,56%
Pengadilan Negeri Jember	95%	100,00%	105,26	80%	81,82%	102,28	92%	92,71%	100,77	93%	97,24%	104,56	5%	18,18%	363,6	93%	96,7%	103,97	146,74
Pengadilan Negeri Jombang	94%	92%	98,92%	5%	0%	0%	93%	90,34	97,15	95%	91,46	96,28%	7%	21,05%	300,75%	83%	96,89%	116,73	115,21%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	95%	99,59%	104,79 %	1%	0%	N/A	40%	98,05%	245,13%	40%	98,74%	246,84%	20%	20%	100%	90%	96,08%	106,75 %	183,59%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	90 %	93,72 %	104,13 %	1 %	100 %	100 %	90%	95,26%	105,85%	90%	95,26%	105,85%	5%	8%	154%	85%	91,01%	107,07 %	129,68%
Pengadilan Negeri Kediri	100%	95,09%	95,09%	NA	0%	100%	80%	81,10%	101,38%	80%	83,90%	104,88%	NA	0%	100%	90%	92,15%	102,39 %	100,62%
Pengadilan Negeri Kepanjen	82%	82%	100%	1%	N/A	N/A	94%	95%	101%	98%	98%	100%	20%	20%	100%	92%	93%	101%	100%
Pengadilan Negeri Kraksaan	100%	75,74%	75,74%	-	-	-	70%	92,05%	131,49%	70%	100%	111%	90%	0%	0%	80%	98%	122,34 %	94,27%

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Lamongan	100%	100%	100%	3%	0%	0%	80%	111%	138,75%	90%	95,80%	106,40%	3%	9%	300%	80%	95,06%	118,80 %	127,30%
Pengadilan Negeri Lumajang	95%	97,30%	102,42 %	20%	33,33%	166,67%	87,50%	93.07%	106,37%	90%	96,06%	106,73%	35%	40%	114,29%	95%	94%	99,29%	115,96%
Pengadilan Negeri Madiun	100 %	100%	100%	2%	0%	0%	75%	94,80%	126,40%	75%	98,90%	131,80%	10%	57,14%	571,40%	90%	98,25%	108%	206,31%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,23%	96,23%	100%	97,60%	97,60%	100%	100%	100%	100%	96,91%	96,91%	96,96%
Pengadilan Negeri Malang	94,34 %	95,11%	100,86 %	1,00%	N/A	N/A	95,60%	94,40%	98,74%	97,49 %	97,41%	99,92%	6,67%	33,33%	499,75%	97,82%	99,70%	101,92 %	167,01%
Pengadilan Negeri Mojokerto	91%	98%	101,50 %	0	N/A	N/A	67%	80,60%	119%	45%	84,30%	110,50%	0%	N/A	N/A	94%	98,66%	105%	133%
Pengadilan Negeri Nganjuk	85%	99,77%	117,38 %	1%	N/A	N/A	80%	92,96%	116,12%	90%	95,52%	106,13%	70%	100%	142,86%	90%	95,76%	106,40 %	118,95%
Pengadilan Negeri Ngawi	100%	94,55%	94,55%	-	-	N/A	80%	97,76%	122,20%	90%	98,40%	109,33%	85%	100%	117,65%	90%	94,12%	104,58 %	109,66%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	87,05%	87,05%	0%	0%	0%	85%	98,08%	115%	85%	98,08%	115%	50%	0%	0%	80%	98,58%	123%	130,58%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	100%	100%	90%	0%	0%	85%	87,83%	103,33%	90%	95,77%	106,41%	15%	0%	0%	96%	97%	101,2%	68%
Pengadilan Negeri Pasuruan	98%	98,70%	100,39 %	85	0	0	90,00%	88,89%	98,77%	95%	92,81%	97,70%	20%	25%	125%	88%	99,91%	125%	93,33%
Pengadilan Negeri Ponorogo	100%	93,10%	93,10%	90%	0%	0%	90%	97,21%	108,01%	90%	98,98%	109,97%	10%	0%	0%	80%	88,33%	110,41 %	105,37%
Pengadilan Negeri Probolinggo	100%	100%	100%	75%	0%	0%	95%	94%	98%	95%	95%	100%	10%	0%	0%	80%	98%	122%	66,50%
Pengadilan Negeri Sampang	100%	100%	100%	100%	0%	0%	80%	83%	104%	80%	81,90%	102,40%	10%	0%	0%	95%	92,81%	97,69%	67,34%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	95%	74%	77%	1%	0	0	75%	50%	65%	80%	85.5%	106.5%	7%	2,90%	19%	90%	92,20%	102%	73.9%
Pengadilan Negeri Situbondo	100 %	100 %	100 %	20 %	0 %	0 %	85 %	97 %	114 %	90 %	99 %	101 %	10 %	0 %	0 %	90 %	98,30 %	109,2	70,7 %

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																			
	INDIKATOR KINERJA																			
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran	
Pengadilan Negeri Sumenep	93%	92%	98%	5%	0	0	85%	75%	78,50%	85%	75%	78,50%	2%	0	0	95%	95%	100%	153,17%	
Pengadilan Negeri Surabaya	88%	92,37%	105,42 %	1%	0%	0%	77%	76,01%	101,93% %	80%	82,39%	102,77%	1%	0%	0%	95%	92,12%	96,97%	67,84%	
Pengadilan Negeri Trenggalek	100%	100%	100%	90%	0%	0%	90%	96,21%	106,90%	90%	96,89%	107,65%	90%	25%	27,77%	90%	98%	109,43 %	80,41%	
Pengadilan Negeri Tuban	95%	98,18%	103.54 %	0%	0%	0%	95%	98,80%	104,09%	94%	99,18%	105,51%	5%	57,14%	1142%	85%	86,19%	101,4%	259%	
Pengadilan Negeri Tulungagung	90%	99,33%	110,36 %	5%	0%	0%	80%	98,36%	122,95%	80%	98,70%	123,37%	5%	100%	2000%	85%	89,60%	105,41 %	367,49%	

BENCHMARK KINERJA
REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-
WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2023

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 2 = Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
	INDIKATOR KINERJA						
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	100%	100%	100%	6%	6,80%	113%	106,50%
Pengadilan Negeri Bangkalan	100%	100%	100%	10%	0%	0%	50%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	80%	100%	125%	1%	3,43%	343%	234%
Pengadilan Negeri Blitar	100%	100%	100%	9%	12,16%	135,14%	111,71%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	100%	100%	10%	8%	80%	90%
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	100%	100%	50%	35%	70%	85%
Pengadilan Negeri Gresik	95%	100%	105%	10%	12,64%	126,44%	55,77%
Pengadilan Negeri Jember	95%	100%	100,00	1%	2,01%	201	150,50
Pengadilan Negeri Jombang	100%	100%	100%	10%	19,69%	196,96	148,48%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	95%	94,97%	99,97%	20%	22,58%	112,90%	104,28%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	100%	100%	100%	5%	14,29%	285,71%	192,86%
Pengadilan Negeri Kediri	100%	100%	100%	5%	5,81%	116%	108%
Pengadilan Negeri Kepanjen	100%	97,50%	97,50%	8%	10%	120%	105%
Pengadilan Negeri Kraksaan	100%	100%	100%	100%	12,50%	12,50%	56,25%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 2 = Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
	INDIKATOR KINERJA						
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Lamongan	100%	100%	100%	3%	10,30%	343%	221,50%
Pengadilan Negeri Lumajang	100%	100%	100%	10%	17,14%	171,43%	123,81%
Pengadilan Negeri Madiun	100%	100%	100%	10%	56,97%	569,70%	334,85%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	100%	100%	100%	5%	5%	52,50%
Pengadilan Negeri Malang	99,28%	99,85%	100,58%	5,23%	11,96%	228,61%	164,60%
Pengadilan Negeri Mojokerto	100%	100%	100%	10%	26%	260%	153%
Pengadilan Negeri Nganjuk	90%	100%	111,11%	7%	9%	128,57%	119,84%
Pengadilan Negeri Ngawi	100%	100%	100%	5%	0%	0%	50%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	100%	100%	50%	10%	2%	90%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	100%	100%	15%	11%	73,33%	87%
Pengadilan Negeri Pasuruan	100%	100%	100%	10%	13,16%	131,58%	107,89%
Pengadilan Negeri Ponorogo	100%	100%	100%	5%	9,52%	11,90%	111,90%
Pengadilan Negeri Probolinggo	100%	100%	100%	10%	15,70%	157%	128,50%
Pengadilan Negeri Sampang	100%	100%	100%	10%	0%	0%	50%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	100%	100%	100%	10%	6,70%	67%	83.5%
Pengadilan Negeri Situbondo	100 %	100 %	100 %	10 %	106,00%	1060,00 %	580%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 2 = Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
	INDIKATOR KINERJA						
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Sumenep	100%	100%	100%	10%	10%	115%	153,13%
Pengadilan Negeri Surabaya	95%	98,90%	104,10%	3%	4,45%	148,32%	126,21%
Pengadilan Negeri Trenggalek	100%	100%	100%	10%	19,04%	190,40%	145,20%
Pengadilan Negeri Tuban	100%	100%	100%	2%	8%	400%	250%
Pengadilan Negeri Tulungagung	90%	100%	111,11%	5%	52,81%	1056,18 %	426,13%

BENCHMARK KINERJA
REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-
WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2023

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 3 = Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan									
	INDIKATOR KINERJA									
	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	105%	95%	100%	130%	25%	100%	105%	95%	100%	113,33%
Pengadilan Negeri Bangkalan	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	1%	0%	0%	1%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Blitar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	66,66%
Pengadilan Negeri Bondowoso	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Gresik	25%	100	400	5%	0%	N/A	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Jember	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	100%	105,26	35,09
Pengadilan Negeri Jombang	0%	0%	0%	0%	0	0	100%	100	100	33,33%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	1%	0%	N/A	1%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kediri	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kepanjen	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kraksaan	50%	0%	0%	100%	0%	0%	90%	100%	111%	111,11%
Pengadilan Negeri Lamongan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Lumajang	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Madiun	2%	0%	0%	2%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Malang	66,67 %	100,00%	149,99 %	N/A	N/A	N/A	90,00%	99,85%	110,94%	130,47%
Pengadilan Negeri Mojokerto	0%	0%	N/A	0%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Nganjuk	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Ngawi	-	-	N/A	-	-	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pacitan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	33%
Pengadilan Negeri Pasuruan	100%	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	50%
Pengadilan Negeri Ponorogo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Probolinggo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 3 = Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan									
	INDIKATOR KINERJA									
	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Sampang	0%	-	-	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Situbondo	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %
Pengadilan Negeri Sumenep	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Surabaya	70%	96,88%	138,39 %	100%	100%	100%	100%	0,23%	0,23%	79,54%
Pengadilan Negeri Trenggalek	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Tuban	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	100%	102,04%	102,04%
Pengadilan Negeri Tulungagung	90%	100%	111,11 %	0%	100%	N/A	90%	100%	111,11%	107,41%

BENCHMARK KINERJA
REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-
WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2023

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 4 = Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
	INDIKATOR KINERJA			
	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	107%	90%	96%	107%
Pengadilan Negeri Bangkalan	0%	20%	0%	0%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	25%	58,46%	233,84%	233,84%
Pengadilan Negeri Blitar	93%	100%	107,53%	107,53%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	50%	75%	150%	154%
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Gresik	20%	73,33%	366,67%	46,67%
Pengadilan Negeri Jember	28%	31,58%	113%	113%
Pengadilan Negeri Jombang	29,41%	85%	25%	29,41%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	40%	43,48%	108,70%	108,70%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	20%	33%	167%	167%
Pengadilan Negeri Kediri	25%	26,70%	106,80%	106,80%
Pengadilan Negeri Kepanjen	65%	67%	103%	103%
Pengadilan Negeri Kraksaan	90%	100%	111%	158,73%
Pengadilan Negeri Lamongan	5%	13,79%	275,80%	275,80%
Pengadilan Negeri Lumajang	40%	52,94%	132,35%	132,35%
Pengadilan Negeri Madiun	50%	149,80%	299,60%	299,60%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Malang	60,00%	114,29%	190,48%	190,48%
Pengadilan Negeri Mojokerto	40%	73,90%	185%	185%
Pengadilan Negeri Nganjuk	50%	40%	80%	80%
Pengadilan Negeri Ngawi	80%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Pamekasan	95%	100%	105%	105%
Pengadilan Negeri Pasuruan	80%	100%	125%	125%
Pengadilan Negeri Ponorogo	80%	50%	50%	50%
Pengadilan Negeri Probolinggo	80%	81%	101%	101%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 4 = Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
	INDIKATOR KINERJA			
	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			Capaian Per Sasaran
Pengadilan Negeri Sampang	10%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	50%	4,70%	9,40%	9,40%
Pengadilan Negeri Situbondo	50 %	25 %	50 %	50 %
Pengadilan Negeri Sumenep	10%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Surabaya	3%	14,89%	33,10%	33,10%
Pengadilan Negeri Trenggalek	30%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Tuban	30%	66,67%	222,23%	222,23%
Pengadilan Negeri Tulungagung	75%	72,73%	96,97%	96,97%

BENCHMARK KINERJA
REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2024

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	95%	97,50%	102,50%	50%	50%	100%	85%	88%	103%	95%	100,00%	105%	10%	33%	130%	95%	99%	104%	106,71%
Pengadilan Negeri Bangkalan	95,50 %	88,39%	92,55%	2%	0%	0%	84%	68,08%	81,04%	90,50 %	84,62%	93,50%	10%	11,11%	111,1%	96%	97,73%	101,80 %	82,89%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	80%	83,50%	106,60%	1%	100%	10000%	70%	88,20%	126,00%	70%	91,50%	130,70%	1%	100%	10000%	90%	99,74%	110,80 %	2314,00 %
Pengadilan Negeri Blitar	95%	95,72%	100,73%	3%	N/A	N/A	98%	97,40%	99,38%	98%	98,04%	100,04%	3%	N/A	N/A	93%	98,82%	106,26 %	101,43
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	99%	99%	2%	0%	0%	90%	95%	105%	90%	97%	107%	50%	70%	140%	96,40 %	99,67%	103%	92,33%
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	93%	93%	80%	N/A	N/A	95%	152%	160%	97%	79%	81%	50%	N/A	N/A	100%	97,75%	97,75%	107,88%
Pengadilan Negeri Gresik	80%	84,18%	84,18%	96,67 %	N/A	N/A	5%	21,34%	426,78%	5%	6,56%	131,10%	5%	N/A	N/A	80%	98,64%	123,30 %	127,56%
Pengadilan Negeri Jember	95%	99,83%	105,08	80%	100,00%	125,00	92%	99,60%	108,26	93%	99,79%	107,30	10%	42,85%	428,5	93%	94,3%	101,34	162,58
Pengadilan Negeri Jombang	94%	92%	98,92%	5%	0%	0%	93%	90,34	97,15	95%	91,46	96,28%	7%	21,05%	300,75 %	83%	96,89%	116,73	115,21%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	90%	100%	111,11%	1%	N/A	N/A	80%	97,07%	121,34%	80%	98,71%	123,39%	1%	N/A	N/A	90%	96,46%	107,18 %	1845,71 %
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	90%	94.11%	104,57%	1 %	60%	6000%	90%	92,46%	102,74%	90%	94,97%	105,53%	5%	23%	462%	85%	94,85%	111.59 %	1147,74 %
Pengadilan Negeri Kediri	95%	97,08%	102,19%	100%	100%	80%%	50%	81,47%	162,94%	90%	100,00%	111,11%	90%	100%	100%	90%	99,25%	109,08 %	116,07%
Pengadilan Negeri Kepanjen	82%	82%	100%	1%	80%	N/A	94%	95%	101%	98%	98%	100%	20%	20%	100%	92%	93%	101%	100%
Pengadilan Negeri Kraksaan	90%	100,00%	111,11%	N/A	N/A	N/A	50%	89,67%	179,34%	50%	100%	200%	N/A	N/A	N/A	80%	96%	119,83 %	152,96%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Lamongan	100%	100%	100%	3%	0%	0%	80%	111%	138,75%	90%	95,80%	106,40%	3%	9%	300%	80%	95,06%	118,80%	127,30%
Pengadilan Negeri Lumajang	95%	99,40%	104,64%	20%	33,33%	166,67%	87,50%	93,07%	106,37%	90%	96,06%	106,73%	35%	40%	114,29%	95%	94%	99,29%	115,96%
Pengadilan Negeri Madiun	100 %	100%	100%	2%	0%	0%	75%	98,50%	131,33%	75%	99,96%	133,28%	10%	80%	800,00%	90%	97,90%	109%	212,23%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	100%	100%	,	100%	100%	100%	96,23%	96,23%	100%	97,60%	97,60%	100%	100%	100%	100%	96,91%	96,91%	96,96%
Pengadilan Negeri Malang	94,34 %	95,11%	100,86%	1,00%	N/A	N/A	95,60 %	81,80%	98,74%	97,49 %	97,41%	99,92%	6,67%	33,33%	499,75 %	97,82 %	99,70%	101,92 %	167,01%
Pengadilan Negeri Mojokerto	91,5%	94,3%	103%	1%	0	N/A	82,5%	99%	111%	80%	81,50%	111%	65%	67%	103%	94%	95,63%	102%	101%
Pengadilan Negeri Nganjuk	85%	98,59%	117,43%	100%	100%	100%	80%	93,67%	117,09%	90%	95,61%	106,23%	10%	N/A	N/A	90%	95,28%	105,87 %	110,68%
Pengadilan Negeri Ngawi	100%	94,55%	94,55%	-	-	N/A	80%	97,76%	122,20%	90%	98,40%	109,33%	85%	100%	117,65 %	90%	94,12%	104,58 %	109,66%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	100,00%	100,00%	1%	0%	0%	85%	96,00%	118%	85%	96,06%	107%	25%	0%	0%	85%	96,89%	117%	100,00%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	100,00%	100,00%	85%	0%	0%	85%	90,47%	106,40%	90%	97,62%	108,40%	15%	50%	333%	99%	99%	100,0%	124,63%
Pengadilan Negeri Pasuruan	95%	95,42	100,44%	85	100	117,65	90,00 %	89,92%	99,91%	95%	92,74%	99,91%	20%	1%	1%	88	99,9	112,5	90,48
Pengadilan Negeri Ponorogo	90%	95,12%	105,68%	1%	0%	0%	90%	98,73%	109,70%	90%	98,75%	109,72%	5%	0%	0%	90%	92,20%	102,44 %	71,26%
Pengadilan Negeri Probolinggo	95%	95%	100,42%	75%	0%	0%	90%	94%	104,44%	95%	95%	100%	10%	33%	333%	80%	97%	121,25 %	126,57%
Pengadilan Negeri Sampang	100%	100%	100%	0%	0%	N/A	80%	74%	93%	80%	75,12%	93,91%	0%	0%	N/A	95%	93,87%	93,80%	74,07%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	95%	99%	104%	N/A	N/A	N/A	78%	85%	109%	75%	76,95%	101,50%	7%	20,00%	200%	90%	93,18%	104%	150%
Pengadilan Negeri Situbondo	85%	70,50%	83%	1%	0	0	86%	83%	96,80%	91%	99,10%	108,90%	10%	33,3%	333%	91%	97%	106%	121,20%
Pengadilan Negeri Sumenep	100%	100%	100%	15%	0	0	85%	83%	95,00%	85%	80%	85,00%	2%	0	0	95%	100%	100%	102,00%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Surabaya	85%	89,02%	105%	0%	0%	N/A	76%	76,13%	100%	79%	81,43%	103%	0%	0%	N/A	94%	98,06%	104,32 %	103,57%
Pengadilan Negeri Trenggalek	100%	98,04%	98,04%	2%	0%	0%	90%	83,57%	92,85%	90%	85,00%	94,44%	1%	40%	400,00 %	90%	99,94%	111,04 %	132,73%
Pengadilan Negeri Tuban	95%	98,26%	103,5	1%	0%	N/A	95%	96,17%	101,21%	94%	97,80%	104,03%	5%	0	0%	95%	96,42%	101,49 %	103%
Pengadilan Negeri Tulungagung	95%	99,22%	104,69 %	1%	0%	N/A	80%	97,79%	122,24%	80%	98,11%	122,64%	5%	0%	N/A	85%	87,16%	102,54 %	111,36%

BENCHMARK KINERJA
REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-
WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2024

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 2 = Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
	INDIKATOR KINERJA						
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	100%	100%	100%	6%	6,80%	113%	106,50%
Pengadilan Negeri Bangkalan	100%	100%	100%	10%	0%	0%	50%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	80%	100%	125%	1%	20,50%	205%	165%
Pengadilan Negeri Blitar	100%	100%	100%	9%	12,16%	135,14%	111,71%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	100%	100%	10%	8%	80%	90%
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	100%	100%	50%	11%	21%	61%
Pengadilan Negeri Gresik	100%	100%	100%	80%	9,23%	11,54%	55,77%
Pengadilan Negeri Jember	95%	100%	105,26	1%	4,41%	441	273,13
Pengadilan Negeri Jombang	100%	100%	100%	10%	19,69%	196,96	148,48%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	90%	100%	111,11%	20%	23,86%	119,30%	115,21%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	100%	100%	100%	5%	27,59%	551,72%	325,86%
Pengadilan Negeri Kediri	100%	100%	100%	10%	15,22%	152%	126%
Pengadilan Negeri Kepanjen	100%	97,50%	97,50%	8%	10%	120%	105%
Pengadilan Negeri Kraksaan	85%	100%	118%	20%	3,08%	15,38%	66,52%
Pengadilan Negeri Lamongan	100%	100%	100%	3%	10,30%	343%	221,50%
Pengadilan Negeri Lumajang	100%	100%	100%	10%	17,14%	171,43%	123,81%
Pengadilan Negeri Madiun	100%	100%	100%	10%	26,00%	260,00%	180,00%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	100%	100%	100%	5%	5%	52,50%
Pengadilan Negeri Malang	99,28%	99,85%	100,58%	5,23%	11,96%	228,61%	164,60%
Pengadilan Negeri Mojokerto	100%	100%	100%	25%	26,61%	106,42%	102,42%
Pengadilan Negeri Nganjuk	90%	100%	111,11%	10%	12%	119,00%	115,06%
Pengadilan Negeri Ngawi	100%	100%	100%	5%	0%	0%	50%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 2 = Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
	INDIKATOR KINERJA						
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	100%	100%	50%	33%	66%	83%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	100%	100%	15%	11%	73,33%	87%
Pengadilan Negeri Pasuruan	100%	100%	100%	10%	22,73%	227,27%	139
Pengadilan Negeri Ponorogo	100%	100%	100%	5%	8,00%	160,00%	130,00%
Pengadilan Negeri Probolinggo	100%	100%	100%	10%	8,00%	80,00%	90,00%
Pengadilan Negeri Sampang	100%	100%	100%	10%	20%	200%	150%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	100%	100%	100%	7%	9,66%	138%	119%
Pengadilan Negeri Situbondo	100%	100%	100%	10%	2%	24%	120%
Pengadilan Negeri Sumenep	100%	100%	100%	10%	2%	20%	110,00%
Pengadilan Negeri Surabaya	95%	98,69%	103,89%	3%	5,90%	196,55%	150,22%
Pengadilan Negeri Trenggalek	100%	100%	100%	1%	10,00%	100,00%	100,00%
Pengadilan Negeri Tuban	100%	100%	100%	2%	8%	416%	258%
Pengadilan Negeri Tulungagung	100%	100%	100,00%	30%	32,88%	109,59%	103,20%

BENCHMARK KINERJA
REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-
WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2024

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 3 = Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan									
	INDIKATOR KINERJA									
	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	105%	95%	100%	130 %	25%	100%	105%	95%	100%	113,33 %
Pengadilan Negeri Bangkalan	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33 %
Pengadilan Negeri Banyuwangi	1%	100%	10000 %	1%	0	N/A	100%	100%	100%	5050%
Pengadilan Negeri Blitar	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	66,66 %
Pengadilan Negeri Bondowoso	0%	100%	100%	70%	N/A	N/A	100%	100%	100%	66,66 %
Pengadilan Negeri Gresik	5%	N/A	N/A	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33 %
Pengadilan Negeri Jember	10%	100%	1000	10%	100%	1000	95%	100%	105,26	70175,44 %
Pengadilan Negeri Jombang	0%	0%	0%	0%	0	0	100%	100	100	33,33 %
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kediri	90%	100%	111,11 %	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	103,70 %
Pengadilan Negeri Kepanjen	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kraksaan	40%	91%	227%	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%	111,11 %
Pengadilan Negeri Lamongan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33 %
Pengadilan Negeri Lumajang	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Madiun	2%	0%	0%	2%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33 %
Pengadilan Negeri Magetan	100%	0%	0%	100 %	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Malang	66,67 %	100,00 %	149,99 %	N/A	N/A	N/A	90,00 %	99,85%	110,94 %	130,47 %
Pengadilan Negeri Mojokerto	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Nganjuk	100%	0%	0%	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	50%
Pengadilan Negeri Ngawi	-	-	N/A	-	-	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pacitan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pasuruan	100%	100	100	-	-	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Ponorogo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 3 = Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan									
	INDIKATOR KINERJA									
	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Probolinggo	90%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	67%
Pengadilan Negeri Sampang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	75%	100%	133%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	117%
Pengadilan Negeri Situbondo	1%	0%	0%	1%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30 %
Pengadilan Negeri Sumenep	2%	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Surabaya	0%	0,00%	N/A	100 %	100%	100%	0%	0,00%	N/A	100%
Pengadilan Negeri Trenggalek	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30 %
Pengadilan Negeri Tuban	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98%	100%	102,04	102,04 %
Pengadilan Negeri Tulungagung	100%	100%	100,00 %	10%	0%	N/A	95%	100%	105,26	102,63 %

BENCHMARK KINERJA
REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-
WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA
TAHUN 2024

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 4 = Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
	INDIKATOR KINERJA			
	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	107%	90%	96%	107%
Pengadilan Negeri Bangkalan	0%	20%	0%	0%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	25%	35,30%	141,20%	141,20%
Pengadilan Negeri Blitar	93%	100%	107,53%	107,53%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	50%	75%	150%	154%
Pengadilan Negeri Bondowoso	90%	83%	93%	93%
Pengadilan Negeri Gresik	100%	46,67%	46,67%	46,67%
Pengadilan Negeri Jember	50%	77,77%	156%	156%
Pengadilan Negeri Jombang	29,41%	85%	25%	29,41%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	25%	26,32%	105,28%	105,28%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	20%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Kediri	40%	42,86%	107,15%	107,15%
Pengadilan Negeri Kepanjen	65%	67%	103%	103%
Pengadilan Negeri Kraksaan	50%	33%	67%	66,67%
Pengadilan Negeri Lamongan	5%	13,79%	275,80%	275,80%
Pengadilan Negeri Lumajang	40%	52,94%	132,35%	132,35%
Pengadilan Negeri Madiun	50%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Malang	60,00%	114,29%	190,48%	190,48%
Pengadilan Negeri Mojokerto	50%	50,00%	50%	100%
Pengadilan Negeri Nganjuk	50%	79%	157%	157%
Pengadilan Negeri Ngawi	80%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pamekasan	95%	100%	105%	105%
Pengadilan Negeri Pasuruan	80%	100%	125%	125%
Pengadilan Negeri Ponorogo	30%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Probolinggo	80%	83%	104%	104%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 4 = Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
	INDIKATOR KINERJA			
	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			Capaian Per Sasaran
Pengadilan Negeri Sampang	10%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	30%	26,00%	86,00%	87%
Pengadilan Negeri Situbondo	50%	54,50%	109%	109%
Pengadilan Negeri Sumenep	5%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Surabaya	15%	18,18%	121,21%	121,21%
Pengadilan Negeri Trenggalek	1%	100%	10000%	10000%
Pengadilan Negeri Tuban	30%	50%	167%	167%
Pengadilan Negeri Tulungagung	70%	53,85%	76,92%	76,92%

A.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu tantangan utama dalam sebuah instansi/ lembaga. Di mana instansi dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Singkatnya, efisiensi sumber daya manusia mengacu pada seberapa baik instansi menggunakan sumber daya manusia yang ada untuk bisa menjalankan roda organisasi dengan baik.

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan aparatur pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi pengadilan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama para pencari keadilan, ditentukan oleh unsur sumber daya manusia yang handal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Secara kuantitas, Sumber daya manuasi di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.138. Komposisi Sumber Daya Manusia
Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	5
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda	3
7.	Kepala Sub. Bagian	3
8.	Panitera Pengganti	8
9.	Jurusita	1
10.	Jurusita Penganti	5
11.	Analisis Perkara Peradilan (termasuk Calon Hakim)	12
12.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2
13.	Pengadministrasian Register Perkara	2
14.	Pengadministrasian pesuratan	-
15.	Pengelola perkara	-
16.	Arsiparis Pelaksana	1
Jumlah SDM		47 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah 47 orang. Untuk jabatan struktural formasi telah terpenuhi, namun masih terdapat rangkap jabatan seperti bendahara penerima yang merangkap jurusita dikarenakan terdapat keterbatasan personil. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat mengelola SDM yang terbatas namun tetap dapat mmeberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.

Tabel 3.139 Data Pegawai/PPNP Yang Diperbantukan Tahun 2024

No	Jabatan/ Tugas Pokok	Jumlah Pegawai /PPNP	Jumlah Pegawai/ PPNP yang diperbantukan	Keterangan	Efisiensi
1.	Panitera Pengganti	8	3	- 1 orang di Bagian Pidana - 1 orang dibagian Perdata - 1 orang dibagian hukum	Efisien Pengukuran efisiensi dilihat dari terselesaikann ya semua pekerjaan meskipun terdapat rangkap tugas / jabatan.
2.	Jurusita /Jurusita Pengganti	6	6	- 1 orang sebagai bendahara pengeluaran - 1 orang bendahara penerima - 1 orang sebagai petugas PTSP - 1 orang dibagian pidana - 1 orang sebagai petugas perpustakaan - 1 orang dibagian perdata	
3.	Cleaning Service	5	5	- 2 orang dikepegawaian - 2 orang petugas PTSP - 1 orang petuas e- court	
4.	Sopir	1	1	Diperbantukan di bagian PTIP (Tim IT)	

UPAYA YANG DILAKUKAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Pembagian perkara yang adil dan sesuai urutan terhadap semua SDM yang menangani perkara dari Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita.
2. Jurusita /Jurusita Pengganti diperbantukan untuk mendukung tugas pengadministrasian di bagian kepaniteraan dan kesekretariatan.
3. Tenaga honorer sejumlah 9 orang diperbantukan pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai pengadministrasi umum.

Dari segi kualitas, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan manajemen sumber daya manusia yang baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk, telah dilakukan beberapa usaha diantaranya:

1. Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin.
3. Memberikan kesempatan untuk mengajukan ide atau gagasan demi kemajuan Pengadilan Negeri Nganjuk.
4. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
5. Memberikan hak pegawai seperi hak kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, hak pengusulan pensiun tepat waktu dan hak berkaitan dengan finansial.

A.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan.

Sebuah organisasi berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan rencana sebagai arahan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerjanya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang dilakukan salah satu contohnya adalah dibuatnya rencana jangka pendek atau yang biasa disebut sebagai anggaran. Anggaran dibuat cukup terinci guna memungkinkan disusunnya laporan keuangan bagi entitas tersebut untuk suatu periode di masa depan. Anggaran berperan penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan keuangan secara rinci disusun untuk membantu tercapainya program kegiatan organisasi.

Ada 3 (tiga) hal yang harus diingat dan dipahami ketika Pengadilan Negeri Nganjuk mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatannya yaitu:

- 1. Apa hasil dan manfaat yang bisa diperoleh masyarakat pengguna layanan (*output and outcome oriented*), hal ini untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai;
- 2. Tugas-fungsi yang melekat pada struktur organisasi (*money follow function*) hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran; dan
- 3. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*) (PMK 94/PMK.02/2017).

Untuk mewujudkan kinerja Pegadilan Negeri Nganjuk tahun 2024, didukung program dan kegiatan serta anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.140 Program dan Anggaran Pendukung Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1	Program Dukungan Manajemen	Rp.	6.596.385.000,-
	A. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	77.278.000,-
	B. Layanan Perkantoran	Rp.	6.519.107.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	140.969.000,-
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp.	1.500.000,-
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp.	111.000.000,-
	C. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Rp.	28.000.000,-
	D. Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp.	469.000,-

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan Pokok

- a. Layanan Perkantoran: Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraa Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
- b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
- b. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik
- c. Mewujudkan pelayanan kesekretaraian yang baik dan prima.
- d. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Kegiatan Pokok :

- a. Percepatan Penyelesaian Perkara
- b. Perkara Pidana yang diselesaikan Ditingkat Pertama
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Perhitungan tingkat efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan pagu anggaran, semakin kecil hasil perhitungan maka semakin efisien. dengan formulasi sebagai berikut:

Realisasi

Pagu Anggaran

x 100%

Tabel 3.141 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% Keatas	Tidak efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang Dari 100%	Efisien

Tabel 3.142 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Tahun 2024

No.	Sasaran Staregis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	104.380.000	96.626.678	92,57%	Efisien

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	6.620.000	4.168.000	62,96%	Efisien
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	28.469.000	27.844.000	97,80 %	Efisien
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	-	-	-	-
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	-	-	-	-
6.	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1.405.208.000	1.383.400.312	98,45%	Efisien
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima.	5.113.899.000	5.064.625.804	99,04%	Efisien
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.	77.278.000	76.790.000	99,37%	Efisien

A.3 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pengadilan Negeri Nganjuk telah berupaya menerapkan berbagai program dan kegiatan antara lain:

- 1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- 2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk agar menjadi professional
- 3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

4. Dalam hal penyelesaian perkara, batas waktu penyelesaian perkara sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutasi. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya melebihi waktu 5 (lima) bulan, Majelis Hakim membuat laporan ke Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.
6. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu, yaitu *one day publish* (satu hari setelah putus).
7. Mengikutsertakan aparaturnya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengikuti Diklat teknis maupun Non teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung RI.
8. Mensosialisasikan produk layanan pengadilan kepada masyarakat melalui website maupun media sosial lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dengan pagu awal sebesar Rp. 6.069.107.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 6.596.385.000,-
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , dengan pagu awal sebesar Rp. 142.510.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 140.969.000,-

B.1 DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 6.596.385.000,- (Enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai.

Jumlah belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 5.113.899.000 (Lima milyar seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Belanja pegawai untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai selama tahun 2024.

2. Belanja Barang.

Jumlah belanja barang tahun 2024 sebesar Rp. 1.405.208.000,- (Satu milyar empat ratus lima juta dua ratus delapan ribu rupiah. Anggaran belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan kantor selama 1 (satu) tahun.

3. Belanja Modal.

Jumlah Belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 77.278.000,- (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) . Anggaran ini merupakan anggaran belanja tambahn yang diberikan pada bulan Juli tahu 2024 untuk pembelian 1 unit AC Standing, 3 unit AC Slpit dan1(satu) proyektor. Pagu dan realisasi anggaran DIPA (01) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.143 Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2024

No	Kode Satker	Program	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	098242	Program duku ngan Manaje men	Belanja Pegawai	5.113.899.000	5.064.625.804	99,04%
			Belanja Barang	1.405.208.000	1.383.400.312	98,45%
			Belanja Modal	77.278.000	76.790.000	99,37%
			Jumlah	6.596.385.000	6.524.816.116	98,92%

REVISI DIPA (01)

Dalam rangka penyesuaian anggaran belanja dengan perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja, perlu dilakukan perubahan rincian anggaran belanja Pengadilan Negeri Nganjuk melalui revisi DIPA.

Selama periode berjalan Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengadakan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA 01 Pengadilan Negeri Nganjuk selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

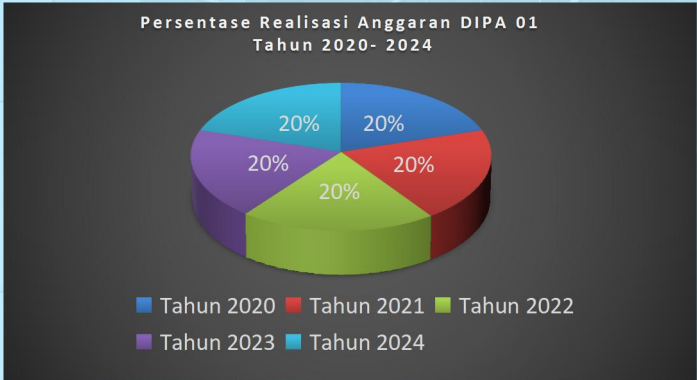
- 1. Revisi 1 tanggal 20 Februari 2024, revisi halaman 3 DIPA;
- 2. Revisi 2 tanggal 18 April 2024, revisi halaman 3 DIPA;
- 3. Revisi 3 tanggal 7 Juni 2024, revisi pergeseran anggaran;
- 4. Revisi 4 tanggal 19 Juni 2024, revisi pergeseran anggaran ;
- 5. Revisi 5 tanggal 12 Juli 2024, revisi halaman 3 DIPA;
- 6. Revisi 6 Tanggal 7 Agustus 2024, revisi halaman 3 DIPA;
- 7. Revisi 7 Tanggal 16 Oktober 2024, revisi halaman 3 DIPA;
- 8. Revisi 8 Tanggal 13 November 2024, revisi belanja pegawai dan revisi halaman 3 DIPA;
- 9. Revisi 9 Tanggal 11 Desember 2024, revisi pemutakhiran data POK dan revisi halaman 3 DIPA;

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran pada DIPA (01) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.144 Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2024

No	Tahun	Pagu	Realisaisi	%
1.	2024	6.596.385.000	6.524.816.116	98,92%
2.	2023	6.346.277.000	6.065.964.437	95,58%
3.	2022	6.335.156.000	6.266.202.956	98.91%
4.	2021	5.464.326.000	5.412.253.319	99,04%
5.	2020	5.319.263.000	5.266.014.802	99%

Grafik 3.29 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 - 2024



B.2 DIPA (03) Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA 03 tahun 2024 sebesar Rp. 140.969.000,- (Seratus empat puluh juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) digunakan untuk pembiayaan program kerja penegakan dan pelayanan hukum dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian perkara.
Anggaran ini digunakan membiayai belanja perjalanan dinas dalam kota untuk Kimwasmat, dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 111.000.000,- (Seratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk pembiayaan pendaftaran berkas perkara, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan disidang pengadilan, pengiriman petikan / salinan putusan kepada JPU dan terdakwa, minutasi, penanganan banding di Pengadilan tingkat pertama dan penanganan perkara kasasi dan PK di Pengadilan tingkat pertama.
3. Layanan pos bantuan hukum.
Anggaran layanan pos bantuan hukum pada tahun 2024 sebesar Rp. 28.000.000 diguankan untuk pembayaran jasa konsultan yang piket pada Posbakum.
4. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama.
Aloaksi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), digunakan untuk biaya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (03) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.145 Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2024

No	Kode Satker	Program	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	099148	Program Penegakan dan pelayanan hukum	Belanja Barang	140.969.000	130.138.678	92,32%
			Jumlah	140.969.000	130.138.678	92,32%

REVISI DIPA (03)

Selama periode berjalan Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengadakan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Revisi 1 tanggal 21 Februari 2024, revisi halaman 3 DIPA;
- 2. Revisi 2 tanggal 24 April 2024, revisi halaman 3 DIPA;
- 3. Revisi 3 tanggal 31 Juli 2024, revisi pergeseran anggaran;
- 4. Revisi 4 tanggal 9 Oktober 2024, revisi pergeseran anggaran ;
- 5. Revisi 5 tanggal 7 November 2024, Revisi DJA;

Perbandingan pagu dan realisasasi anggaran pada DIPA (03) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.146 Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2024

No	Tahun	Pagu	Realisaisi	%
1.	2024	140.969.000	130.138.678	92,32%
2.	2023	123.800.000	122.576.633	99,01%
3.	2022	142.806.000	137.235.000	96,10%
4.	2021	146.806.000	142.340.000	96,96%
5.	2020	143.700.000	128.362.100	89,33%

Grafik 3.30 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 - 2024



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan anggaran, baik DIPA 01 maupun DIPA 03 secara optimal dan telah berjala sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut kami sajikan matriks realisasi anggaran yang mendukung sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk.

Tabel 3.147 Matriks Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Sumber Anggaran	Pagu (Rp.)	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi	
								Rp.	%
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	Program penegakan dan pelayanan hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	140.969.000	Belanja barang operasional	140.969.000	130.138.000	92,32%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif							
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding							
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi							

		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.							
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.							
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.							

		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.							
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum							
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).							
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	Program Dukungan manajemen	Dipadai Badan Urusan Administrasi	6.596385000	Belanja Pegawai	5.113.899.000	5.064.625.804	99,04%

		Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian				Belanja Barang	1.405.208.000	1.383.400.312	98,45%
		Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu				Belanja Modal	77.278.000	76.790.000	99,37%
		Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	Program Dukungan manajemen	Dipa 01 Badan Urusan Administrasi	6.596385000	Belanja Pegawai	5.113.899.000	5.064.625.804	99,04%
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	Nilai LKJiP minimal “BB”				Belanja Barang	1.405.208.000	1.383.400.312	98,45%
		Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM				Belanja Modal	77.278.000	76.790.000	99,37%
		Nilai IPK							
		Nilai IKM							

		Predikat Ampuh							
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)							
		Persentase realisasi anggaran belanja							
		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu							
		Prosentase nilai Kinerja Anggaran							
		Prosentase kedisiplin masuk kerja							
7.	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan							

	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai							
	Persentase distribusi surat							
	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu							
	Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat							
	Jumlah kerjasama antar instansi terkait							
	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia							
	Jumlah layanan pengadilan							

		Jumlah pengguna layanan pengadilan							
		Jumlah layanan bantuan hukum	Program Dukungan manajemen	Dipa 01 Badan Urusan Administrasi	6.596385000	Belanja Pegawai	5.113.899.000	5.064.625.804	99,04%
		Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian				Belanja Barang	1.405.208.000	1.383.400.312	98,45%
		Jumlah pemeliharaan gedung				Belanja Modal	77.278.000	76.790.000	99,37%
		Jumlah pemeliharaan rumah dinas							
		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor							
		Jumlah layanan pengelolaan keamanan,							

		urusan tata usaha, dan rumah tangga							
8.	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan							

PENGHARGAAN YANG DIRAIH PENGADILAN NEGERI
NGANJUK KELAS I B TAHUN 2024

1.



Piagam Penghargaan “Peringkat I”
Kategori Pengelolaan dan Pelaporan
Keuangan Terbaik DIPA 03 Tahun
Anggaran 2024

2.



Piagam Penghargaan “Peringkat II”
Kategori Pengelolaan dan Pelaporan
Keuangan Terbaik DIPA 01 Tahun
Anggaran 2024

BAB IV

PENUTUP



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB tahun 2024 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dan rata memperoleh capaian diatas 100%, tetapi terdapat sasaran strategis yang masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja yaitu pada sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan dengan capaian kinerja 33, 33% dan pada sasaran srategis mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik dengan capaian kinerja 83,50%. Namun demikian secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk dinyatakan berhasil karena telah memenuhi target yang diinginkan.

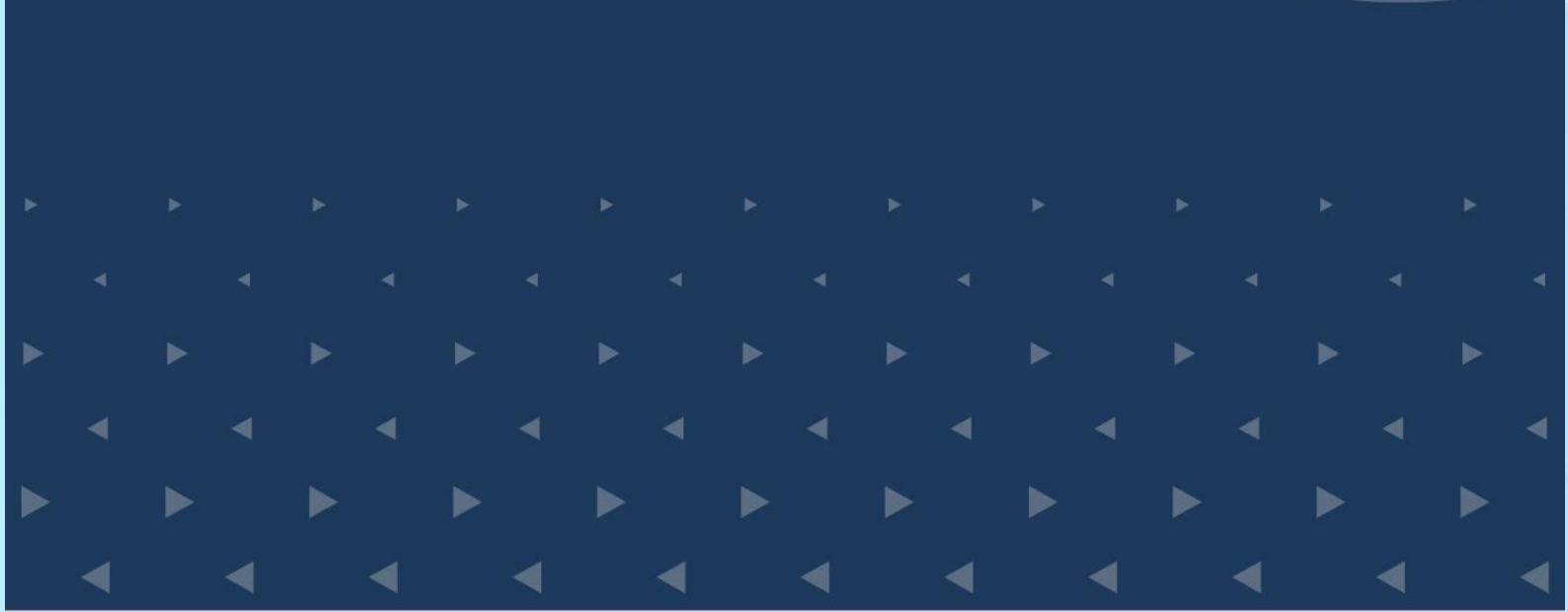
B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang, untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

1. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
2. Penguatan kualitas dan integritas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Penguatan kualitas dan integritas sumber daya manusia untuk menghasilkan target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja dan pelayanan masyarakat.
5. Meningkatkan komitmen bersama untuk mencapai program – program yang telah dicanangkan Mahkamah Agung seperti komitmen untuk pembangunan

Zona Integritas serta pelaksanaan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH).

6. Meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin.
7. Pelaksanaan evaluasi kinerja secara periodik.
8. Peningkatan ketaatan terhadap kode etik aparatur sipil negara.
9. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024





KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 99 /KPN.W14-U27/SK/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI
NGANJUK**

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024
Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;**
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;**
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk
mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan
tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2024;**
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun Anggaran 2024;**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.**

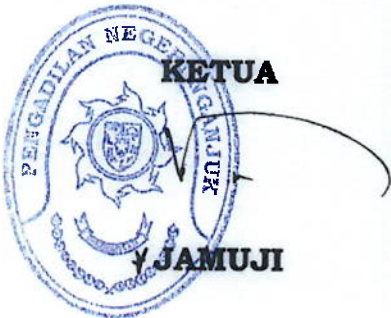
Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Januari 2025



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor : 99 /KPN.W14-U27/SK/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	JAMUJI, S.H., M.H. NIP. 19690810 199003 1 006
2.	Koordinator Validasi Data	1. FACHRIANSYAH NOOR, S.H. NIP. 19790101 200704 1 001 2. ARI EFENDI, S.H. NIP. 19820912 200604 1 002
3.	Ketua	WARSITO, S.H. NIP. 19760202 200112 1 003
4.	Sekretariat	1. RATIH DWI ANGGARENI, S.E. NIP. 19810926 200502 2 002 2. ROSI DENOVI PUSPITASARI, S.E. NIP. 19950907 201903 2 011 3. TAUFIK ARODI, S.E. NIP. 19950522 202203 1 009 4. SRI WAHYU HANDAYANI, S.Md. NIP. 19990306 202321 2 002
5.	Anggota	1. RIF'AN INDRA YUDHA, S.H. NIP. 19821022 200912 1 005 2. AGUS PRASETYO, S.H. NIP. 19720123 200112 1 002 3. PUJIYATI, S.H., M.H. NIP. 19720723 200604 2 001 4. KAMIRAN SUDIADI, S.H. NIP. 19810924 200812 1 0002 5. IVAN DANIEL TENTUA, S.E. NIP. 19841103 201101 1 008 6. LILY FARADINA, S.H. NIP. 19970822 202012 2 003 7. MELSIADA MUSTIKA KARLINA, A.Md. NIP. 19951129 202203 2 025 8. LAUDIA VALLENTINE.A.A, A.Md. NIP. 19980624 202012 2 002 9. AHMAD KOIRUL, S.H. NIP. 19730512 201212 1 002
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. DYAH RATNA PARAMITA, S.H., M.H. NIP. 19810204 200604 2 003 2. MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. 19760611 200704 1 001



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor : /KPN.W14-U27/SK/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusun Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas

KETUA

JAMUJI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator: • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan	a. Definisi Operasional Indikator: • SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang	Panitera	Laporan Bulanan

	pendekatan keadilan restoratif.	Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum - Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : < 50%		Dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah perkarayang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunutasi pada tahun berjalan b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, anantara lain perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%		
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi		a. Definisi Operasional Indikator: • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perara pidana anak yang diajukan diversi • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : >70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		a. Definisi Operasional Indikator: • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan: Index Kepuasan Pencari Keadilan c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator: • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak. • Sama nomor 1 tahun 2011 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus /dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486 /Dju/HM.0.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Formula Perhitungan: Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu Jumlah Putusan $\times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	a. Definisi Operasional Indikator: • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			oleh mediator kepada Hakim memeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : < 50%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan. a. Definisi Operasional Indikator: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tifak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : < 50%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan. a. Definisi Operasional Indikator: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan	

			b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : < 50%			
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	a. Definisi Operasional Indikator: • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan Hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdana yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).	a. Definisi Operasional Indikator: • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum tetap. • Putusn yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan,	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan	

		perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : 50 %		
--	--	---	--	--

		b. Formula Perhitungan : Dapat dilihat dari Monitoring Kelegkapan Data Dan kelengkapan E Doc pada Aplikasi SIKEP. c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 85%		
c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu		a. Definisi Operasional Indikator: • Pengusulan kenaikan pangkat pegawai dilaksanakan (2) dua bulan sebelum TMT kenaikan pangkat yang bersangkutan, yaitu pada bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang naik Pangkat}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 95%	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
d. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu		a. Definisi Operasional Indikator: • Pengusulan pensiun pegawai dilakukan satu tahun sebelum TMT pegawai tersebut pensiun. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Pengusulan Pensiun tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang pensiun}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 95%		
6.	Mewujudkan regulasi dan Tata Kelola Yang Baik	a. Nilai LKjIP minimal "BB"	a. Definisi Operasional Indikator: • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan. • Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. • Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap laporan SAKIP dan kemudian dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dilakukan evaluasi serta penilaian kembali. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Pengusulan Pensiun tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang pensiun}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Angka d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : BB	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Predikat Pembangunan Zona Integritas	a. Definisi Operasional Indikator: • Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian,	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan

		lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. • Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. b. Formula Perhitungan : Pentilaian ZI menuju WBK dan WBBM dilakukan oleh TIM Penilai dari Badilium Dan Permenpan RB c. Satuan yang digunakan : Angka d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : ≥ 75		Laporan Tahunan
	c. Nilai IPK	a. Definisi Operasional Indikator: • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membuat inovasi e- survey untuk mengukur Indeks persepsi anti korupsi dengan menggunakan aplikasi e- Survey Badilium dengan alamat website esurvey.badilium.mahkamahagung.go.id. b. Formula Perhitungan : Nilai IPK diperoleh dari hasil survey lewat aplikasi SISUPER c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : $> 80\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 80%		
	f. Persentase nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	a. Definisi Operasional Indikator: PNBP yang diterima Pengadilan Negeri Nganjuk dari DIPA 01 didapat dari sewa tanah gedung dan bangunan untuk kantin, sedangkan untuk DIPA 03 didapat dari pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya, pendapatan leges dan pengesahan dan pendaftaran surat dibawah tangan. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah PNBPN yang disetor ke kas negara}}{\text{Jumlah PNBPN yang diterima}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 95%	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	g. Persentase Realisasi anggaran belanja	a. Definisi Operasional Indikator: Realisasi anggaran belanja adalah perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya. Perbandingan ini disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang juga mencakup informasi realisasi pendapatan, transfer, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Anggaran Belanja}}{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja}}$	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 90% x 100%		
	h. Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator: • Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu ini mengukur perbandingan antara pegawai yang wajib lapor LHKPN dan LHK ASN dengan pegawai yang lapor tepat waktu. • Batas waktu pelaporan LHKPN/LHKASN adalah 31 Maret Tahun berikutnya. • Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 2 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) menyatakan bahwa yang sebelumnya ASN dibebankan melaporkan LHKASN maka ditahun 2023 ASN cukup melaporkan SPT Tahunan. • Untuk wajib lapor LHKPN tetap melakukan pelaporan LHKPN. • Data wajib Lapor LHKPN adalah Hakim, Pejabat Pengelola Keuangan, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. b. Formula Perhitungan : Jumlah Pegawai Yang Lapor Tepat Waktu Jumlah Pegawai Yang Wajib Lapor LHKPN/LHKASN x 100%	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan	
		c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 90%			
	i. Persentase nilai kinerja anggaran	a. Definisi Operasional Indikator:	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan	

		- Indikator kinerja persentase nilai kinerja anggaran ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. - Pengukuran nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada nilai IKPA yang diperoleh satuan kerja. b. Formula Perhitungan : - Revisi DIPA: 10% - Deviasi Halaman III DIPA: 10% - Penyerapan Anggaran: 20% - Belanja Kontraktual: 10% - Penyelesaian Tagihan: 10% - Pengelolaan UP dan TUP: 10% - Dispensasi SPM: 5% - Capaian Output: 25% c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 95%		Laporan Tahunan
	j. Persentase kedisiplinan masuk kerja	a. Definisi Operasional Indikator: Indikator kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja ini mengukur tingkat kedisiplinan pegawai untuk mematuhi jadwal kerja yang telah ditetapkan. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Ketidakhadiran Pegawai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$ Persentase Kehadiran = 100% - Jumlah Ketidakhadiran Pegawai c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 90%	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

7.	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a. Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	a. Definisi Operasional Indikator: • Sarana aplikasi yang diselesaikan oleh satuan kerja adalah sarana aplikasi layanan dari Mahkamah Agung, Dirjen Badilum maupun dari satuan kerja. • Pemeliharaan sarana aplikasi termasuk perbaikan fitur aplikasi dan update aplikasi. b. Formula Perhitungan : Jumlah pemeliharaan aplikasi yang dimiliki satuan kerja Jumlah Aplikasi x 100% c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 90%	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	a. Definisi Operasional Indikator: • Bandwidth jika dijabarkan secara lengkap adalah jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan client yang ditentukan dalam hitungan bit per second (bps). Dapat dikatakan pula, bandwidth adalah maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran data dalam satu waktu tertentu.. • Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 724/SEK/OT.01.1/5/2019, tentang petunjuk pelaksanaan SP-SABA disebutkan bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan e-court berupa peningkatan bandwidth yang regular menggunakan jasa telekomunikasi bersifat dedicated dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah rendahnya 50 Mbps dan Pengadilan Tingkat pertama serendah-rendahnya 50 Mbps.	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan : Menghitung bandwidth dengan menggunakan layanan pengukuran kecepatan internet , kemudian menghitung kebutuhan bandwidth rata- rata per perangkat c. Satuan yang digunakan : Angka d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : 50 Mbps		
	c. Persentase distribusi surat	a. Definisi Operasional Indikator: • Kegiatan mendistribusikan surat ke bagian – bagian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh bagian yang dituju. b. Formula Perhitungan : Jumlah surat yang didistribusikan ke masing masing bagian x 100% c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 90%	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan	
	d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator: • Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah jumlah surat yang ditindaklanjuti masing-masing bagian sesuai dengan disposisi pimpinan. b. Formula Perhitungan : Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu x 100% c. Satuan yang digunakan : Persentase (%)	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan	

		d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 90% a. Definisi Operasional Indikator: - Indikator ini mengukur tingkat kemudahan dan kecepatan pencarian arsip surat yang telah masuk maupun keluar. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah surat yang ditemukan dengan mudah}}{\text{Jumlah surat}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 90% a. Definisi Operasional Indikator: - Indikator ini mengukur jumlah kerjasama yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan instansi terkait di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Penandatanganan MoU selama tahun berjalan.}}{\text{Satuan yang digunakan}} : \text{Angka}$ d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 3 a. Definisi Operasional Indikator: - Pemuatan berita di media Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan akses berita kepada khalayak secara cepat dan mudah. - Samakin banyak berita di upload, semakin mudah khalayak mengetahui update kegiatan serta program kerja yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah berita tentang satuan kerja yang di muat website Pengadilan Negeri Nganjuk.}}{\text{Satuan yang digunakan}} : \text{Angka}$			
	e. Persentase arsip surat yang dpt ditemukan dengan mudah dan cepat			Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait			Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia			Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 24		
	h. Jumlah layanan pengadilan		a. Definisi Operasional Indikator: • Layanan Pengadilan terdiri dari Layanan pada meja PTSP, Layanan E-Court, Layanan E-Berpadu dan Layanan Informasi persidangan. b. Formula Perhitungan : Jumlah Layanan Yang Disediakan di Pengadilan Negeri Nganjuk. c. Satuan yang digunakan : Angka d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 7 layanan	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	i. Jumlah pengguna layanan pengadilan		a. Definisi Operasional Indikator: • Jumlah pengguna layanan Pengadilan adalah jumlah Pengguna layanan yang telah mendapatkan pelayanan oleh petugas layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk b. Formula Perhitungan : Jumlah Pengguna layanan pengadilan dalam satu tahun. c. Satuan yang digunakan : Angka d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 200 orang	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	j. Jumlah layanan bantuan hukum		a. Definisi Operasional Indikator: • Jumlah layanan bantuan hukum adalah jumlah masyarakat pengguna pengadilan yang kurang mampu khususnya yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum. b. Formula Perhitungan : Jumlah Layanan bantuan hukum yan telah dilaksanakan dalam satu tahun. c. Satuan yang digunakan : Angka d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 80 orang	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	k. Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan		a. Definisi Operasional Indikator: • Pengusulan kepegaaian seperti pengusulan diklat, pengusulan Kenaikan gaji berkala.	Sekretaris	Laporan Bulanan Dan

			kepegawaian b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah penyelesaian usulan kepegawaian}}{\text{Jumlah usulan kepegawaian}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 95%			Laporan Tahunan
		l. Jumlah pemeliharaan gedung a. Definisi Operasional Indikator: Luasan gedung yang di ajukan peemliharan. b. Formula Perhitungan : Jumlah luasan gedung yang diajukan pemeliharaan. c. Satuan yang digunakan : Angka d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : = 3000m2			Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas a. Definisi Operasional Indikator: Rumah dinas yang di ajukan peemliharan. b. Formula Perhitungan : Jumlah rumah dinas yang diajukan pemeliharaan. c. Satuan yang digunakan : Angka d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : = 5			Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor a. Definisi Operasional Indikator: Peralatan / mesin yang diajukan pemeliharaan. b. Formula Perhitungan : Jumlah peralatan dan mesin diajukan pemeliharaan. c. Satuan yang digunakan : Angka			Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 100 a. Definisi Operasional Indikator: Mengukur jumlah layanan yang diberikan oleh kesekretariatan sebagai supporting unit untuk keberlangsungan administrasi perkantoran di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk. b. Formula Perhitungan : Jumlah layanan kesekretariatan sebagai supporting unit dalam satu tahun berjalan. c. Satuan yang digunakan : Angka d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : = 12 layanan		Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Peradilan Dalam mendukung	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	a. Definisi Operasional Indikator: Standart sarana dan prasarana yang harus terpenuhi anatar lain Ruang PTSP,Ruang Sidang umum dan anak, Ruang Mediasi, Ruang Tamu terbuka, Ruang laktasi, Genset, Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Sarana disabilitas, Toilet. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sarpras yang telah disediakan}}{\text{Jumlah sarpras yang harus terpenuhi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 85%		Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

Nganjuk, 27 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Nganjuk
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung.
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024		Anggaran (Rp)				
														Jum lah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	85%	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 70%	100% 70%	95% 75%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manaje men peradilan umum	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	356	PKR	119200.000	98.806.000	117.306.000	98.300.000	111.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

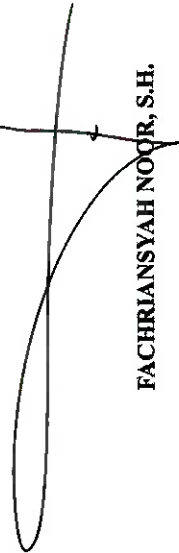
8	Penenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	Penenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung	Terpenuhi nya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan	-	-	90%	90%	90%	.	.	.	.	.	.	.
---	--	--	-----	--	---	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---



Mengetahui,
Ketua

Nganjuk , 30 Desember 2024

Panitera.



FACHRIANSYAH NOOR, S.H.



ARI EFENDI, S.H.

Sekretaris

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
NOMOR: 1443/KPN.W14-U27/RA1.9/XII/2024

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1.	Pidana	95%
		2.	Perdata	75%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
		f.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%
		c.	Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal “BB”	BB
		b.	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Ampuh	Unggul
		f.	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Persentase realisasi anggaran belanja	95%
		h.	Persentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i.	Persentase nilai Kinerja Anggaran	90%
		j.	Persentase kedisiplin masuk kerja	95%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretaraian yang baik dan prima	a.	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps

		c	Prosentase distribusi surat	100%
		d	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita
		h	Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang
		k	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%

Nganjuk, 30 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



REVIU PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : JAMUJI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

N a m a : H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001

Pihak Kedua,



JAMUJI, S.H., M.H.
NIP. 19690810 199003 1 006

Nganjuk, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		1	Pidana	95%
		2	Perdata	75%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	100%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%
		e	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak.tepat waktu	90%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	10%
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	1%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%
		c	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a	Nilai LKjIP minimal “BB”	BB
		b	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c	Nilai IPK	90%
		d	Nilai IKM	90%
		e	Predikat AMPUH	UNGGUL
		f	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g	Prosentase realisasi anggaran belanja	95%
		h	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%
		j	Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%
		b	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100Mbps
		c	Prosentase distribusi surat	100%
		d	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	24 berita
		h	Jumlah layanan pengadilan	7 layanan
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 orang
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	80 orang
		k	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	3000 m2
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	114 unit
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Peradilan Dalam mendukung	a	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2024 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	
1	Program Dukungan Manajemen	Rp.	6.596.385.000,-
	A. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	77.278.000,-
	B. Layanan Perkantoran	Rp.	6.519.107.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	140.969.000,-
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp.	1.500.000,-
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp.	111.000.000,-
	C. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Rp.	28.000.000,-
	D. Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan melauai Pembebasan Biaya Perkara	Rp.	469.000,-



Pihak Kedua,

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001



Nganjuk, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

JAMUJI, S.H., M.H.
NIP. 19690810 199003 1 006

Lampiran I
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	70%	100%	142,86%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	0%	--NA--
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	-	-
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	-	-
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	0%	0%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	96,06%	106,7%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan Maret 2024, belum terdapat perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Maret 2024, tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversi. Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.	Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk

		perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	membantu para pihak untuk melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan Maret 2024 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	-	-
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	4,55%	40%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Dari 16 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi, hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan Maret tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pihak yang berperkara atau pemohon memilih untuk membayar biaya perkara karena biaya perkara lebih ringan dan mereka merasa mapu untuk membayar	Mensosialisasikan kepada pengguna Pengadilan baik melalui media sosial PN Nganjuk dan petugas PTSP mengenai keuntungan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Maret tahun 2024, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokat untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	57,14%	114%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 7 (tujuh) permohonan eksekusi masuk selama triwulan I dan telah terdapat 4 pelaksanaan eksekusi pada triwulan I, termasuk permohonan eksekusi tahun sebelumnya	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmaning	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan annmaning.

Nganjuk, 31 Maret 2024
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



Lampiran I
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	70%	100%	142,85%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	0%	--NA--
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	94,89%	118,61%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	94,16%	104,62%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	0%	0%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	94%	104,44%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim

		pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.		Pengawas Bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan Juni 2024, belum terdapat perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Juni 2024, tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversi. Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.	Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.

5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak dapat tidak melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan Juni 2024 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	-	-
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Sampai dengan bulan Juni 2024, perkara yang tidak mengajukan upaya banding sebesar 260 perkara dari 274 perkara yang telah diselesaikan.	Perkara yang mengajukan upaya hukum banding jumlahnya lebih kecil daripada perkara yang telah diselesaikan dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Sampai dengan bulan Juni 2024, dari 274 perkara yang diselesaikan, 258 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	3,70%	37%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Sampai dengan tiwulan II, keberhasilan mediasi sangatlah kecil dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan.	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi.	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi mesyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan Juni tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pihak yang berperkara atau pemohon memilih untuk membayar biaya perkara karena biaya perkara lebih ringan dan mereka merasa mapu untuk membayar	Mensosialisasikan kepada pengguna Pengadilan baik melalui media sosial PN Nganjuk dan petugas PTSP mengenai keuntungan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Juni tahun 2024, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokat untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

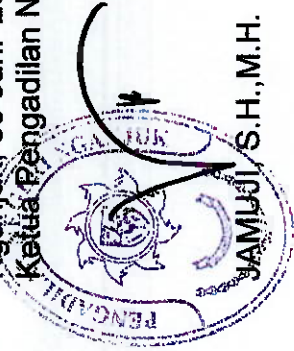
		pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik		
--	--	--	--	--

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)		50%	36,36%	72,72%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 11 (sebelas) permohonan eksekusi masuk selama triwulan II, sedangkan pelaksanaan eksekusi sejumlah 4 perkara	perkara eksekusi yang berjalan masih dalam proses teguran eksekusi.	Melaksanakan koordinasi yang baik antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi seperti pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan eksekusi, perangkat desa serta pemohon dan termohon eksekusi.

Nganjuk, 30 Juni 2024
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



Lampiran I
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	70%	100%	142,85%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	0%	--NA--
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	-	-
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	-	-
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	0%	0%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	96,94%	107,71%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim

		pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.		Pengawas Bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan September 2024, belum terdapat perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan September 2024, tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversi. Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.	Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.

5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan September 2024 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	-	-

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90% 10%	100% 5,56%	111,11% 55,60%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Sampai dengan tiwulan III, keberhasilan mediasi sangatlah kecil dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan.	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi.	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

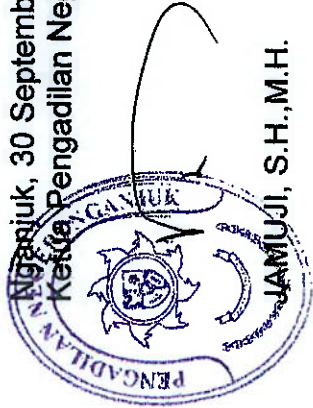
No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan September tahun 2024, terdapat 1 (satu) perkara prodeo yang masuk dan masih dalam proses persidangan	Perkara masih dalam proses persidangan.	Penyelesaian perkara prodeo segera dilaksanakan pada tahun berjalan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan September tahun 2024, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokad untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 12 (dua belas) permohonan eksekusi masuk selama triwulan III, sedangkan pelaksanaan eksekusi sejumlah 6 perkara	perkara eksekusi yang berjalan masih dalam proses teguran eksekusi.	Melaksanakan koordinasi yang baik antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi seperti pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan eksekusi, perangkat desa serta pemohon dan termohon eksekusi.

Nganjuk, 30 September 2024
 Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



JAMUJI, S.H., M.H.

Lampiran I
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN IV
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	75%	97,20%	129,6%
		2. Pidana	95%	100%	105,26%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	93,67%	117,09%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	95,61%	106,23%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	--NA--	--NA--
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,28%	105,87%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim

		pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.			Pengawas Bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.		Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.		Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan Desember 2024, belum terdapat perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.		Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Desember 2024, tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversi. Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan. Maka dari itu untuk indikator ini tidak dapat dihitung	Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara diselesaikan melalui diversi.

5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan Desember 2024 terdapat 1 perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Penyelesaian perkara tindak pidana ringan atau perkara pidana anak yang aggal dilakukan diversi, dilakukan melalui pendekatan Restoratif Justice

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	11,90%	119%
--	---	-----	--------	------

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Sampai dengan tiwulan IV, keberhasilan mediasi sangatlah kecil dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan, namun target pada indikator ini telah tercapai.	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi.	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	--NA--	--NA--
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan Desember tahun 2024, terdapat 1 (satu) perkara prodeo yang masuk dan masih dalam proses persidangan	Perkara masih dalam proses persidangan.	Penyelesaian perkara prodeo segera dilaksanakan pada tahun berjalan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Desember tahun 2024, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokad untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	78,57%	157,14%

AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Pelaksanaan eksekusi	Samapi dengan Triwulan IV terdapat 14 perkara permohonan eksekusi (termasuk permohonan eksekusi tahun lalu, dan telah ditindaklanjuti sebanyak 11 permohonan, sisanya masih berjalan.	perkara eksekusi yang berjalan masih dalam proses teguran eksekusi.	Melaksanakan koordinasi yang baik antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi seperti pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan eksekusi, perangkat desa serta pemohon dan termohon eksekusi.

Nganjuk, 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,

